

Sekolah Menengah Atas Dari Masa ke Masa



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PROFIL SMA

SEKOLAH MENENGAH ATAS
DARI MASA KE MASA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017

Profil SMA: **Sekolah Menengah Atas, Dari Masa ke Masa**

©2017 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah:

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si (Direktur Pembinaan SMA)

Penanggungjawab:

Suhadi, S.Pd, MT (Kasubdit Program dan Evaluasi)

Kontributor:

Dr. Eko Warisdiono

Suharlan, SH, MM

Dr. Harizal

Penulis:

Umi Wahyuningsih Muhadi

Wawan Setiawan

Sopian Wadi

Editor:

Muamar Surawidarto, SE, MBA

Luna Titi Aprilyana, SE

Ir. Akhmad Supriyatna, M.Pd

Jim Bar Pen, SH

Nurul Mahfudi, ST

Wiwiet Heriyanto, MT

Uce Veriyanti, SE

Muhammad Adji Susilo Nugroho, ME

Kusriyah, M.Pd

Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA

Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan

Telp: 021-75911532

www.pisma.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya buku *Profil SMA: SMA dari Masa ke Masa*. Buku ini merupakan informasi tentang kondisi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari waktu ke waktu dalam perjalanan Bangsa Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini.

Buku ini bukanlah naskah sejarah yang disusun dengan metodologi penyusunan sejarah. Buku ini disusun dengan metodologi jurnalistik, jadi merupakan penelusuran fakta-fakta sejarah berdasarkan metode liputan jurnalistik oleh tim di Direktorat Pembinaan SMA. Tim menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan berdasarkan liputan ke berbagai sekolah SMA yang memiliki nilai historis di seluruh provinsi. Oleh karena itu, buku ini adalah naskah hidup yang perlu terus dilengkapi dengan sumber yang lebih lengkap.

Secara garis besar, perkembangan SMA di Indonesia dipotret dalam beberapa periode yang penting sejalan dengan perkembangan Indonesia. Mulai di masa kolonial, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, Orde Reformasi dan SMA kini dan masa mendatang. Masing-masing periode memiliki ciri dan warna tersendiri sesuai dengan karakteristik zamannya.

Buku ini juga disajikan secara populer agar dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan dalam rangka memahami bagaimana kondisi pendidikan SMA dalam berbagai periode. Dengan pemahaman ini diharapkan semua pihak dapat memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMA.

Mengetahui perkembangan SMA sangatlah perlu untuk dapat memahami bagaimana perkembangan kebijakan dalam pembinaan SMA di masa silam yang korelasinya dengan kondisi SMA masa kini. Potret SMA di masa lalu juga diperlukan juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan SMA di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2017
Direktur Pembinaan SMA

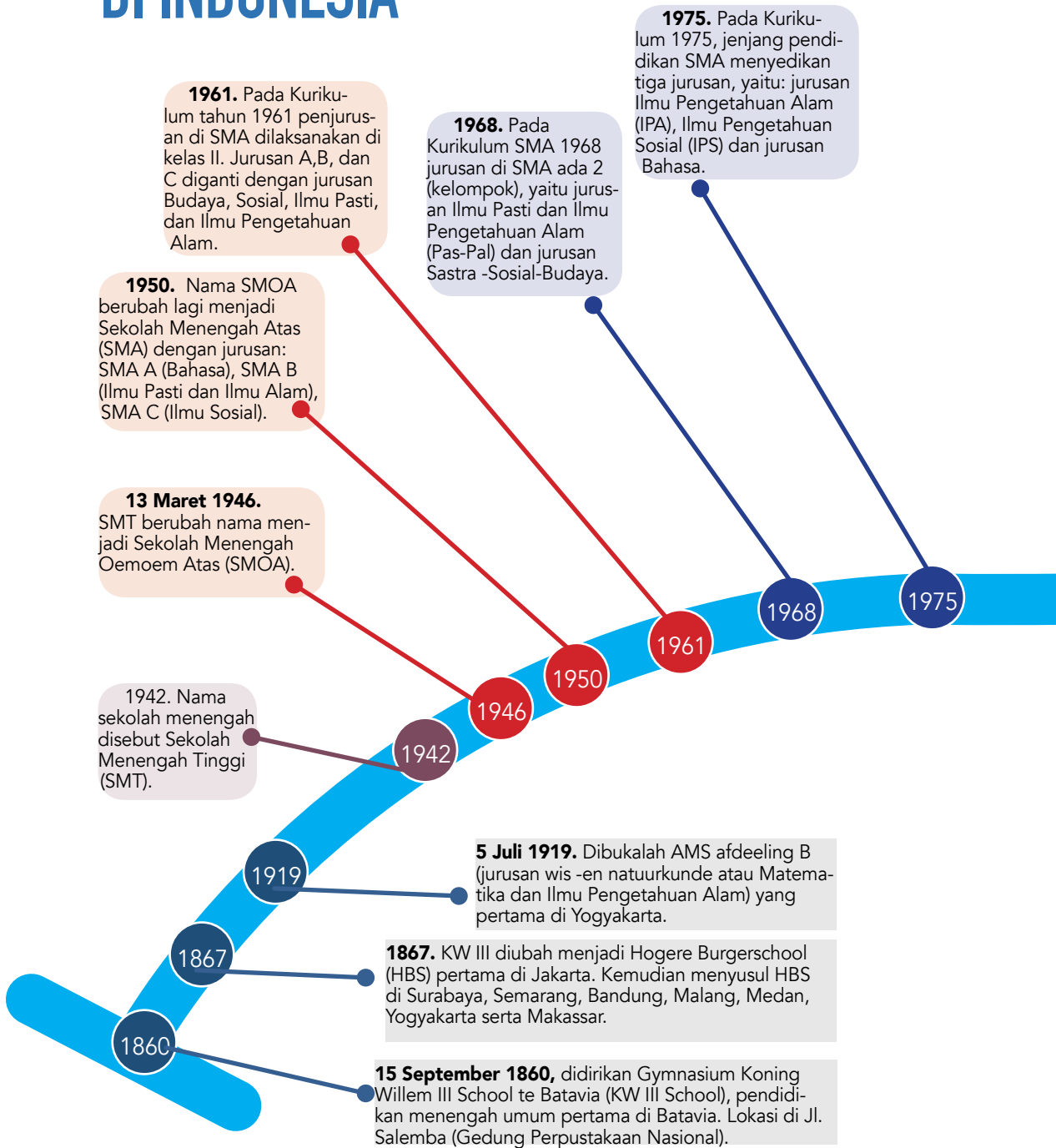
Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP: 19610404 1985031003

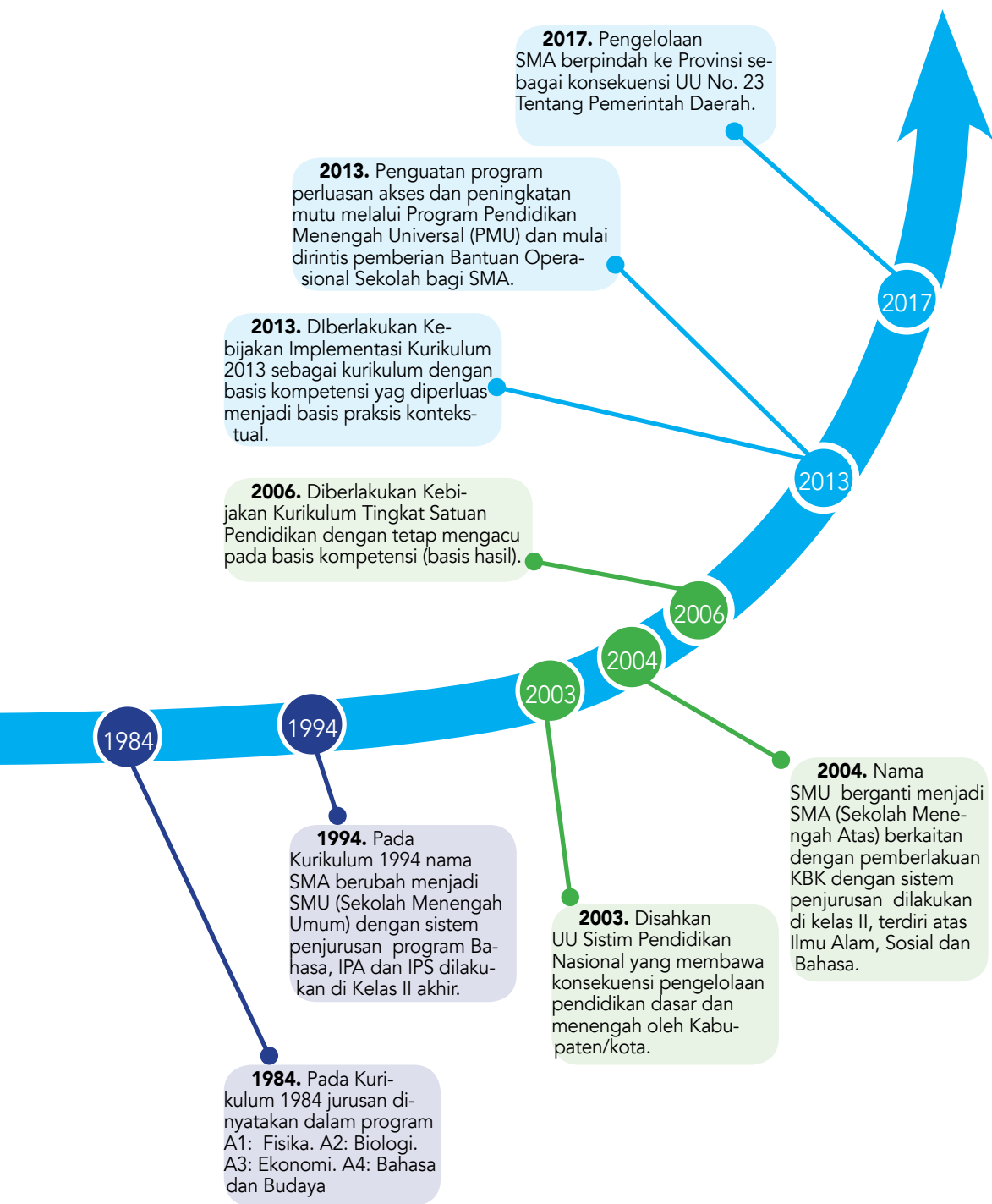
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
MILESTONE PERJALANAN SMA DI INDONESIA	viii
BAB 1 SMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA.....	1
A. Pendidikan di Indonesia	2
B. Pendidikan Menengah	3
C. Landasan Sekolah Menengah Atas	6
BAB 2 SMA DI ZAMAN KOLONIAL	9
A. Kondisi Pendidikan	10
B. Pergerakan	12
C. Sekolah Menengah di Era Kolonial	14
BAB 3 SMA DI MASA KEMERDEKAAN	23
A. Situasi Menjelang Kemerdekaan	24
B. Kebijakan Pendidikan Masa Kemerdekaan	26
C. Kebijakan Kurikulum	30
BAB 4 SMA PADA MASA ORDE BARU	35
A. Latar Belakang	36
B. Kebijakan Pendidikan Pada Awal Orde Baru	38

C. Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif	51
D. Kebijakan Pendidikan Pada Era Tahun 1990-an.....	54
E. Penerapan Kurikulum 1994 di Jenjang SMA	59
F. Metode Pembelajaran pada Kurikulum 1994 SMU	64
G. Sistem Pendidikan Nasional	67
BAB 5 SMA DI ERA REFORMASI HINGGA KINI	71
A. Latar Belakang	72
B. Praktek Pendiikan di Sekolah	76
C. Pengelolaan Sekolah	77
D. Kebijakan Kurikulum	79
E. Mendikbud Dari Era Reformasi hingga Kini	86
F. Direktorat Pembinaan SMA	87
BAB 6 SEKOLAH-SEKOLAH BERSEJARAH	89
BAB 7 SMA MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21	189
A. Kondisi Abad 21	190
B. Tuntutan Pengembangan Potensi Diri	195
C. Perubahan Paradigma Belajar.....	197
D. Pendidikan Berbasis Standar	199
E. Lingkungan Belajar SMA Masa Depan	200
BAB 8 PENUTUP	205
DAFTAR PUSTAKA	209

MILESTONE PERJALANAN SMA DI INDONESIA





Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber



Bab I

SMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Sebagai sebuah satuan pendidikan menengah di Indonesia, Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mengalami perjalanan yang panjang dan berliku. Perjalanan SMA tidak lepas dari posisi SMA dalam Sistem Pendidikan Nasional dari masa ke masa. Berikut tentang SMA di Indonesia.

A. PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dalam pengertian UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan UU tersebut jelas terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, tapi mengembangkan kepribadian mereka secara utuh dan dalam prosesnya membutuhkan kehadiran orang dewasa. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Ngalim Purwanto, 2002:11).

Ahli pendidikan, Pestalozzi lebih dahulu memiliki pandangan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha pertolongan (bantuan) pada anak agar mampu menolong dirinya sendiri serta mengembangkan daya-daya jiwa yang dimiliki anak sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negaranya (Pestalozzi dalam Heafford, 1961).

Masalah pendidikan memiliki cakupan yang cukup luas, bahkan dalam mendefinisikan pengertian pendidikan juga bervariasi. Ada yang mengartikan pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di lingkungan masyarakat di mana ia berada. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (contoh paling nyata sekolah) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal (Dictionary of Education dalam T. Sulistyono, 2003).

Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan posisi pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat dari sudut pandang psikologis atau dari sudut pandang sosiologis. Namun demikian, yang pasti bahwa pendidikan adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat survive dalam menjalani hidupnya.

Pendidikan tidak hanya sekedar mencerdaskan anak secara intelektualitas, tapi lebih kepada membangun secara utuh kepribadian dan karakternya.

B. PENDIDIKAN MENENGAH

Pendidikan menengah, adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah ditempuh dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun. Jenis pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah keagamaan (Madrasah Aliyah) dan sederajat (Paket C dan lainnya).

1. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Berdasarkan ketentuan tersebut, SMA pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan yang berfungsi untuk menyelenggarakan “pendidikan bersifat umum”. Yang dimaksud dengan pendidikan bersifat umum yaitu pendidikan yang menyediakan kurikulum dengan sejumlah bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan “*the student’s rational thought and general intellectual capabilities*”. Melalui pendidikan umum, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggali, mengolah, dan menggunakan informasi (*well-informed person*) yang dimuat dalam berbagai bahan kajian dan pelajaran melalui pemikiran dan diskusi rasional.

Dengan demikian, pendidikan bersifat umum berbeda dengan pendidikan yang menekankan pada sifat profesional, vokasional, dan teknikal. Dalam konteks universal, bahan kajian dan pelajaran bagi satuan pendidikan bersifat umum (*liberal arts education*) dikelompokkan ke dalam bidang keilmuan: *Humanities* (Humaniora); *Language & Arts* (Bahasa dan Seni); *Mathematics* (Matematika); *Natural Sciences* (Ilmu-ilmu Alam); dan *Social Sciences* (Ilmu-ilmu Sosial).

Peserta didik SMA adalah mereka yang berusia antara 16 dan 18 tahun di mana pada usia ini sedang berada pada fase remaja antara 10

dan 19 tahun. Masa remaja (*adolescence*) adalah periode peralihan atau perkembangan dari masa kekanakan (*childhood*) menuju masa dewasa (*adulthood*). Seseorang yang berada pada masa remaja ini ditandai antara lain dengan pubertas (keinginan untuk mendekat ke lawan jenis) dan pencarian jati diri. Jelasnya bahwa peserta didik SMA berada pada masa remaja yang sangat berdekatan dengan gejala, stres, pubertas, dan tingkat kemampuan berpikir abstrak dan memaknai suatu obyek tanpa memerlukan fisiknya atau bahkan pengalaman sebelumnya.

2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi pendidikan di SMA sebagai pendidikan menengah yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Adapun Tujuan pendidikan di SMA adalah membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Rumusan fungsi dan tujuan SMA ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Rumusan tujuan ini sejalan dengan perkembangan diri dari siswa di jenjang pendidikan menengah atas di mana mereka masuk dalam kelompok remaja yang memiliki rentang usia antara 16-18 tahun dan dapat dikatakan merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam tahap perkembangan ini sudah muncul kesadaran siswa untuk membina hubungan sosial dengan lingkungannya serta ada kebutuhan berprestasi atau *need of achievement* karena didorong keinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis.

3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pengelolaan Sekolah Menengah Atas di Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Di masa lalu, pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi sejalan dengan era reformasi di mana terjadi otonomi daerah, pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya.

Adapun penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta oleh masyarakat. Khusus untuk status SMA negeri, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai kewenangannya. Satuan pendidikan di bawah tanggungjawab provinsi adalah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sedangkan pendidikan formal dan non formal menjadi tanggungjawab kabupaten/Kota.

Sejalan dengan perubahan UU tentang Pemerintahan daerah, yakni UU No. 23 Tahun 2014, pendidikan dasar dan pendidikan non formal menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus menjadi tanggungjawab Provinsi.

Perkembangan SMA sedemikian pesatnya seperti saat ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang keberadaan jenjang pendidikan ini di Indonesia, mulai dari era kolonialisme, zaman kemerdekaan

sampai kondisi sekarang. Pemerintah tentu terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap perubahan kebijakan yang terkait dengan sistem pendidikan menengah atas dengan tujuan untuk menghadirkan SMA yang berkualitas dan mencerdaskan siswanya.

Dalam bab berikutnya akan diulas perjalanan sejarah dimulainya jenjang pendidikan SMA yang dapat dijadikan informasi berguna bagi siswa untuk mengenal lebih jauh perkembangan SMA dari zaman ke zaman.

C. LANDASAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Dasar pendidikan menengah atas mengacu kepada dasar pendidikan nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Secara operasional pendidikan menengah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010.

Adapun mengenai tata kelola satuan pendidikan secara umum terdapat dua jenis satuan pendidikan yakni yang dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta satuan pendidikan yang dimiliki masyarakat. Keduanya memiliki tata kelola yang berbeda dan diatur dalam berbagai aturan teknis dari kementerian teknis. □



Bab II

SMA PADA MASA KOLONIAL

Pada masa kolonial, SMA mencatat perjalanan yang sangat penting. Pada masa itu sekolah begitu eksklusif dan tidak dapat dengan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Berikut perkembangan penting SMA di masa kolonial.

A. KONDISI PENDIDIKAN

Di zaman kolonial, pendidikan sebagai cermin dari sistem ekonomi kolonial yang bersifat penghisapan bangsa atas bangsa. Pendidikan pun bersifat diskriminatif yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendidikan bagi kaum kolonialis dan pendidikan bagi bangsa terjajah atau kaum pribumi. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Kepedulian pemerintah Belanda kepada bidang pendidikan pun dipicu oleh adanya gerakan *Aufklarung* (pencerahan) dalam bahasa Jerman dan di Inggris dikenal dengan istilah *Enlightenment*. Gerakan ini muncul di Eropa pada abad ke-18 di mana pada masa itu masyarakat di Eropa ingin bebas dari pengaruh gereja dan menuju ke masa pencerahan dari masa kegelapan, sejalan dengan penemuan-penemuan besar di bidang ilmu pengetahuan alam. Pada masa *aufklarung*, falsafah rasionalisme menjamur di Perancis dan Belanda. Gelombang *Aufklarung* dari Eropa memberikan pengaruh positif bagi pendidikan di Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, sebagai perwujudan pemikiran mengenai pemisahan antara negara dan gereja, pihak gereja harus melepaskan diri dari keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan. Dengan kata lain, paham *Aufklarung* ini menjadi pelopor sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang kemudian menjelma menjadi sekolah-sekolah negeri.

Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja atau penganut agamanya masing-masing, paham baru tersebut memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat atau rakyat banyak yang membebaskan kewajiban itu kepada pemerintah (M. Rifa'i, 2011:69).

Pengaruh paling nyata *Aufklarung* terhadap pendidikan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya keputusan Raja Belanda tertanggal 30 September 1848 nomor 95, yang memberi wewenang kepada Gubernur jenderal (Van de Bosch) untuk menyediakan dana sebesar f25.000 setahun bagi pendirian sekolah-sekolah bumiputera di Pulau Jawa dengan tujuan mendidik calon-calon pegawai negeri. Sebagai langkah pertama, pada tahun itu didirikan sebanyak 20 sekolah dasar negeri, di mana setiap keresidenan berdiri satu sekolah untuk bumiputera.

Terdapat dua jenis sekolah dasar yang diperkenalkan kala itu yakni ELS dan HIS. Dua jenis sekolah ini berbeda target sasaran. ELS (*Europesche Leger*

School) yakni sekolah setara SD dengan lama pendidikan 7 tahun yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan segelintir anak-anak pribumi. Sedangkan HIS kependekan dari *Hollandische Inlandische School* jalur sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dan timur asing.

Untuk sekolah menengah umum, Pemerintah Hindia Belanda sampai dengan akhir abad ke-19 belum memikirkan pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi. Kedua tingkat pendidikan ini baru dimulai pada abad ke-20. Sekolah lanjutan yang dibuka lebih dahulu adalah kejuruan seperti sekolah pertukangan dan sekolah guru. Itupun dipelopori oleh pihak swasta Kristen (*Zending*). Tujuannya adalah untuk mengisi kebutuhan tenaga pabrik gula yang sedang maju, terutama di Jawa Timur.

Baru pada tahun 1839, ada pemikiran untuk mendirikan sekolah menengah umum *Hoogere Burger School* yang disingkat HBS. untuk menampung lulusan ELS. HBS itu terutama diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dengan masa pendidikan lima tahun. Pendidikan ini setara dengan SMP dan SMA. Sedangkan untuk lulusan HIS dibangun MULO (*Meer Utger-BreidLager Onderwijs*). MULO ini setingkat SMP dengan masa pendidikan tiga tahun. Jika hendak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, untuk anak pribumi disediakan AMS (*Algemere Middleberre School*) setingkat SMA dengan lama pendidikan tiga tahun.

Sementara dasar pendidikan yang diterapkan adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Bermula dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-anak bangsawan bumi putera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial untuk dijadikan kepanjangan tangan kepentingan Belanda di Indonesia. Hal ini tergambar mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan selanjutnya.

Sejak permulaan abad ke-20, akibat langsung atau tidak langsung dari penerapan pendidikan etnis pemerintah kolonial, mulai muncul golongan cerdas pandai di antara masyarakat Indonesia, yaitu mereka yang telah mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Namun mereka tidak mendapat tempat. Keadaan ini menjadikan mereka terbuka hatinya bahwa sistem pemerintahan, sistem persekolahan dll yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sangat merugikan rakyat Indonesia. Mereka kemudian menginginkan perubahan, pembaruan dan

persamaan hak bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme mereka makin berkobar ketika pada saat yang sama di negara lain seperti di India, muncul gerakan kebangsaan.

B. PERGERAKAN

Belakangan muncul tokoh dan organisasi pergerakan yang peduli pada kemerdekaan, perbaikan harkat martabat bangsa Indonesia dan salah satu perwujudannya dengan memajukan dunia pendidikan tanah air. Pada 20 Mei 1908, lahirlah perkumpulan yang disebut “Budi Utomo. Perkumpulan ini meminta kepada pemerintah kolonial untuk memperbanyak sekolah-sekolah bagi anak-anak bumiputra dan materi pendidikan serta pengajaran hendaknya sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Ternyata gerakan “ Budi Utomo” menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan lain, semisal gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912. Lembaga ini berasaskan Islam dan sosial, salah satunya bergerak di bidang pendidikan. Tujuannya adalah menyiapkan kader-kader yang berilmu pengetahuan dan taat kepada agama Islam. Sampai tahun 1925, Muhammadiyah telah memiliki 8 sekolah HIS, 1 sekolah guru, 32 sekolah Kelas II, 1 *schakelschool* dan 14 sekolah agama. Baru pada Oktober 1948, Muhammadiyah membuka kelas SMA yang diberi nama SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Kemudian di Jawa Barat, ada tokoh gerakan wanita yang peduli akan pendidikan, yaitu Dewi Sartika. Beliau lahir di Bandung pada 14 Desember 1884, anak seorang patih Bandung bernama R.D. Somanegara. Pendidikannya hanya sempat belajar sampai di tingkat pendidikan rendah Belanda. Cita-citanya adalah mengangkat derajat kaum wanita dengan jalan memajukan pendidikannya. Baginya, kaum wanita harus mendapat kesempatan mengenyai pendidikan yang sama dengan kaum pria. Usahanya dimulai dengan mengajar membaca dan menulis bagi pelayan-pelayan neneknya. Baru pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk para istri dan usahanya ternyata mendapat sambutan positif dari para istri bupati. Sampai pada tahun 1912, di daerah Pasundan telah berdiri 9 Sekolah Istri Dewi Sartika yang kelak menjadi Sekolah Kepandaian Putri (SKP).

Sementara itu di Sumatera Barat, terdapat pula tokoh pergerakan di bidang pendidikan bagi kaum perempuan, bernama Rohana Kudus yang

berasal dari Kota Gadang (Bukit Tinggi). Pada usia 12 tahun ia telah mengajar membaca dan menulis untuk teman-temannya di kampung. Pada 1905 beliau mendirikan Sekolah Gadis di Kota Gadang. Sekolah ini menekankan pelajaran-pelajaran kerajinan wanita. Di samping itu beliau juga menjadi guru agama, pemimpin wanita Minangkabau dan juga memimpin majalah wanita *Soenting Melayu*. (Soemanto dan Soeyarno, 1983: 55-57)

Selanjutnya ada Perkumpulan Taman Siswa, nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di paguyuban Soso Kliwon. Taman Siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial yang berat sebelah. Janji pendidikan untuk rakyat bumiputera masih merupakan janji belaka.

Perkembangan lembaga pendidikan yang berasaskan Islam pada masa kolonial, menurut catatan, kurang menggembirakan. Institusi pendidikan kaum pribumi terserak dalam beberapa komunitas, seperti pesantren, masjid, madrasah dan pendidikan di dalam keraton-kerajaan. Karena penjajah bukan saja tidak menghiraukan, bahkan memusuhinya terutama berkaitan dengan perbedaan agama, budaya dan tradisi. Berbeda dengan institusi pendidikan berasaskan agama Kristen dan Khatolik. Pendidikan Kristen di masa penjajahan Belanda harus diakui mendapat subsidi yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pendidikan Islam dan lembaga pendidikan pribumi lainnya.

Terkait dengan pendidikan agama Kristen, keberadaannya sudah lebih dulu terlihat melalui Lembaga Kristen (Zending) yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak-anak bumiputera sejak 1898. Pada mulanya kebanyakan sekolah Kristen memakai bahasa pengantar Bahasa Belanda lalu dalam perkembangannya memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Lembaga ini berhasil mendirikan sekolah hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Indonesia bagian Timur (Maluku) sampai daerah-daerah lainnya. Kemudian dalam perkembangannya, pada 1936, dibentuk suatu organisasi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang disebut *Schoolraad voor Christelijk Scholen in Nederlands Indie*, yang berkedudukan di Jakarta dan di tiap-tiap provinsi ditunjuk Provinciale Schoolraden (M. Rifai, 2011:114).

Kemudian ketika Jepang berkuasa, semua sekolah swasta ditutup, akan tetapi sekolah-sekolah Kristen di Yogyakarta dan Surakarta masih diperbolehkan dibuka tanpa subsidi dari Pemerintah Jepang. Sesudah proklamasi kemerdekaan, lembaga Kristen ini segera bangkit dan pada 5 Juni 1950 dibentuk Majelis Pusat Pendidikan Kristen Indonesia (MPPK).

Sama halnya dengan pendidikan Kristen, penyelenggaraan pendidikan di bawah lembaga Khatolik di zaman penjajahan Belanda, mulai diizinkan membuka sekolah umum. Mulanya dibuka 2 sekolah putri di Jakarta, 1 sekolah putra dan 1 sekolah putri di Surabaya. Sekolah-sekolah itu didirikan oleh para Romo, bruder atau suster. Umumnya sekolah Khatolik menganut sekolah non-koedukasi, memisahkan antara murid putra dan putri. Di luar Pulau Jawa, sekolah Khatolik terdapat di Larantuka (Pulau Flores) dan di Pulau Bangka. Sekolah-sekolah Khatolik termasuk banyak menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Di antara 698 sekolah yang disubsidi, 1 sekolah tingkat AMS serta 3 sekolah tingkat HBS.

C. SEKOLAH MENENGAH DI ERA KOLONIAL

Di era kolonial, terdapat beberapa Sekolah menengah atas yang didirikan. Berikut beberapa di antaranya.

1. Koning Willem III School te Batavia (KW III)

Sekolah menengah yang didirikan pertama kali oleh Pemerintah Hin-



Foto:<http://sejarah.pancaproject.com/2015/05/koning-willem-iii-school-te-batavia.html>

Gedung Sekolah Gymnasium Koning Willem III di Salemba, Jakarta, tahun 1860

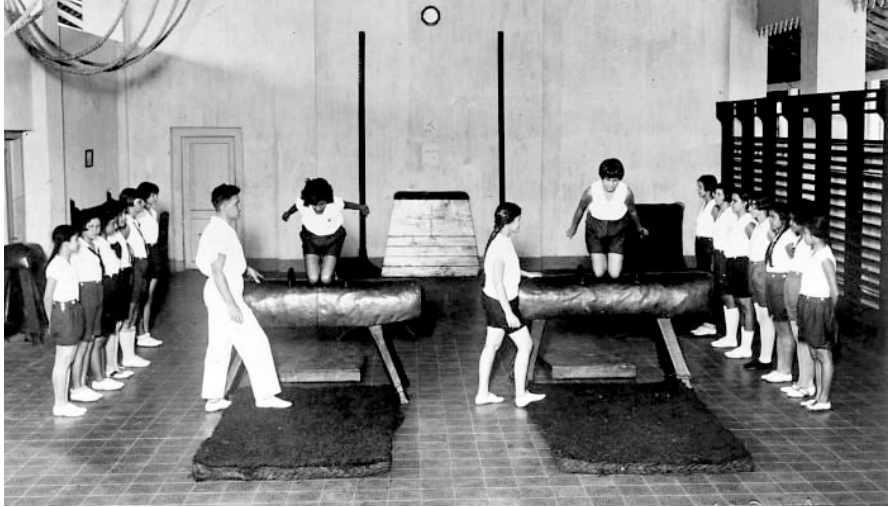


Foto: <http://sejarah.pancaproject.com/2015/05/koning-willem-iii-school-te-batavia.html>

Kegiatan siswa Gymnasium Koning Willem III

dia Belanda, bernama Gymnasium Koning Willem III School te Batavia (KW III) pada tahun 1860 di Jakarta. Nama sekolah ini diambil dari nama raja Belanda kala itu, yakni Koning (Raja) Willem III. Sekolah KW III berada di lokasi yang sekarang ditempati oleh Perpustakaan Nasional Indonesia, Jl. Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat. Keterangan bahwa bangunan kantor itu adalah bekas sekolah, terdapat di bawah tangga menuju lantai dua. Ada monumen yang menunjukkan bahwa Gymnasium Willem III didirikan pada tahun 1860, saat Menteri Negara Jajahan dijabat oleh Jan Jacob Rochussen dan Rektor alias Kepala Sekolah pertama adalah Dr. S. A. Naber.

Pada tahun 1867 KW III diubah menjadi Hogere Burgerschool (HBS) pertama di Jakarta. Namun nama sekolah tetap disebut KW III. Sekolah ini juga masuk dalam kategori Gouvernements HBS atau Openbare HBS. Artinya, bahwa HBS tersebut diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah dan berstatus sekolah negeri.

KW III School disebut juga sekolah raja karena awalnya hanya menerima murid, anak-anak para pejabat pemerintah kolonial, sehingga disebut juga "anak raja". Baru 14 tahun kemudian anak Indonesia pertama diterima (1874) dan anak Cina pertama pada tahun 1877. Kemudian berjalannya waktu, KW III memberi kesempatan kepada anak-anak pribumi untuk bersekolah di sini, di antaranya yang kelak menjadi tokoh pergerakan nasional, seperti Agus Salim, Achmad Dja-



Foto:<http://sejarah.pancaproject.com/2015/05/koning-willem-iii-school-te-batavia.html>

Murid pribumi Koning Willem III angkatan 1919-1920

jadiningrat, Mohammad Husni Thamrin, Ernest Douwes Dekker serta Johannes Latuharhary.

Seperti dikutip dari *Wikipedia*, berdasarkan Besluit Gouverneur Generaal 21 Agustus 1867 Nomor 1, Gymnasium KW III dibagi menjadi dua bagian: Bagian A: HBS dengan masa studi lima tahun yang dimaksudkan agar setelah selesai pendidikan ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagian B: masa belajar selama tiga tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan ini dimaksudkan agar siswa dapat melanjutkan ke pendidikan lanjutan perwira, pegawai negeri, atau pendidikan perdagangan dan kerajinan di Delf, Belanda.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, sekolah ini ditutup. Gedungnya dipergunakan untuk Pertahanan Sipil Belanda. Setelah Belanda menyerah, Jepang menggunakannya. Demikian juga saat sekutu mengalahkan Jepang, gedung ini dipakai oleh tentara sekutu. Tahun 1949, setelah Belanda mengakui kedaulatan RI, gedung KW III sempat menjadi markas kesatuan TNI Batalyon Kala Hitam. Kemudian beralih menjadi kantor dan perumahan Jawatan Kesehatan TNI AD.

2. Hogere Burgerschool (HBS)

Keberadaan HBS sebenarnya bermula dari pemikiran perlunya dibu-



Foto : Wikipedia

HBS Surabaya - sekarang digunakan SMA N 1,2,5 & 9 Surabaya

ka sekolah menengah di Indonesia untuk menampung lulusan dari ELS dan HIS, sehingga anak-anak tidak perlu lagi sekolah ke Netherland. Setelah sekolah KW III berubah menjadi HBS pertama di Batavia, pada tahun 1867, Pemerintah Kolonial secara bertahap membuka kembali HBS di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari HBS te Surabaya (1875), HBS te Semarang(1877), (PHS) Prins Hendrikschool te Batavia (1911), HBS te Bandoeng (1915), HBS te Malang (1927), HBS te Medan (1928). Kemudian HBS te Djogja (1931), HBS te Buitenzorg (1937), Christelijke Hoogere Burgerschool te Batavia (1937) serta HBS te Makassar (1939). Selain itu dibuka juga beberapa sekolah filial dari HBS.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk HBS kala itu, umumnya masa studi lima tahun. Anak-anak yang bisa bersekolah di sini hanya anak-anak warga Belanda, Eropa serta kalangan elit pribumi yang telah lulus ELS Kelas Satu di mana salah satu mata pelajarannya adalah Bahasa Perancis. Setelah lulus HBS, mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke universitas di Belanda.

Jumlah anak Indonesia di HBS pada tahun 1900 hanya 2%. Tahun 1915 meningkat 6.1% dari 915 peserta didik. Jumlah ini meningkat dikemudian hari akan tetapi tetap didominasi anak Belanda. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya jumlah itu antara lain disebabkan



Foto : Wikipedia

Siswa HBS Surabaya merayakan HUT ke-25, bendera sekolah tertera Hoogere Burgerschool te Soerabaia dengan motto Per aspera ad astra - melalui jerih payah untuk meraih bintang

sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS Kelas Satu untuk mempelajari Bahasa Perancis, tingginya uang masuk (sekitar f 15), tidak adanya hubungan antara Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sebagai sekolah Belanda untuk bumiputera dengan HBS dan karena terburuknya kesempatan memasuki MULO (S. Nasution, 2008: 134).

Pada mulanya HBS juga tidak menerima peserta didik wanita, karena banyaknya tantangan mengenai koedukasi. Selain itu masih terdapat anggapan bahwa penerimaan peserta didik wanita akan menimbulkan persoalan, sehingga menuai pro dan kontra. Namun pada tahun 1891 akhirnya terdapat perubahan, HBS mulai menerima anak perempuan untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sana.

Kurikulum HBS di Indonesia sama dengan kurikulum yang diterapkan di negeri Belanda. Jadi dalam pelaksanaannya tidak banyak mengalami perubahan. Apa yang diajarkan tampaknya universal. Bahannya dapat berubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun nama mata pelajaran tetap sama. Mata pelajaran yang diberikan meliputi 19 jenis di mana 11 mata pelajaran diberikan dari kelas satu sampai kelas lima yaitu: Berhitung, Aljabar, Matematika, Botani, Biologi, Sejarah, Geografi, Bahasa Belanda, Ba-

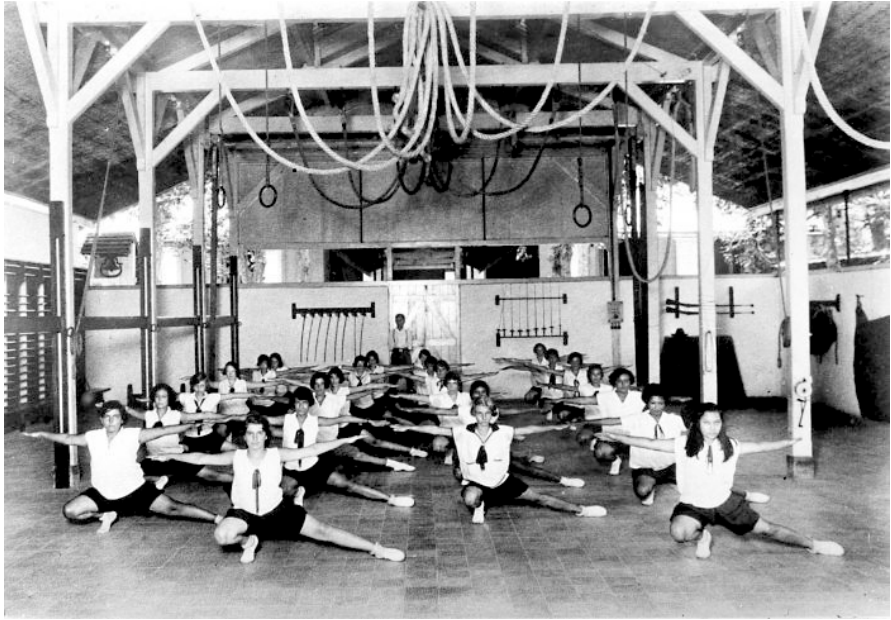


Foto : Wikipedia

Siswa HBS Semarang (sekarang SMAN 1 Semarang) sedang berlatih senam.

hasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Menggambar Tangan dan Olahraga (pelajaran wajib namun hanya dinilai sebagai kegiatan ekstrakurikuler). Enam pelajaran yang diberikan sejak kelas tiga hingga kelas lima adalah: Fisika, Kimia, Undang-undang Negara, Ekonomi, Tata buku serta Menggambar Garis. Sementara mata pelajaran yang diberikan sejak kelas empat adalah Mekanika dan Kosmografi. Berbeda dengan HBS di Belanda, Bahasa Latin dan Bahasa Yunani tidak diberikan di HBS di Hindia Belanda.

Sementara tenaga pendidik untuk HBS adalah mereka yang memiliki ijazah Ph.D (Doktor) atau diploma MO yang memiliki kualifikasi mengajar di HBS. Diploma MO – B adalah ijazah tertinggi yang dicapai oleh seorang guru, yang dapat disamakan dengan gelar Doktor. Namun karena sulitnya memperoleh guru dengan ijazah yang kualifikasi demikian, maka dipekerjakan guru dengan ijazah Ir, perwira AD dan AL, pemegang Diploma MO-A (wewenang mengajar pada tiga tahun pertama HBS). Bahkan yang berijazah HA (Hoofdacte) untuk sementara dapat dipekerjakan pada HBS, khususnya di kelas-kelas rendah. Pada tahun 1900 an, sekitar 80% - 90% dari guru HBS telah mencapai kualifikasi yang sama dengan yang dipersyaratkan oleh HBS di Nederland (S. Nasution, 2008: 134).

3. Algemene Middelbare Achool (AMS)

Sebagai konsekuensi dicanangkannya Politik Etis di mana salah satunya menyangkut bidang pendidikan, warga pribumi tamatan Meer Uitgebroid Lager Onderwijs (MULO) pun mendapat kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, di Algemene Middelbare School (AMS).

AMS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda yang setara dengan SMA pada saat ini dengan masa studi tiga tahun dan menggunakan bahasa pengantar, Bahasa Belanda. AMS membuka dua jurusan yakni Bagian A: Pengetahuan Kebudayaan (*Culturewetenschap*) yang dibagi lagi menjadi Bagian A1: Sastra Timur dan Bagian A2: Sastra Klasik Barat. Sementara Bagian B: Pengetahuan Alam. Siswanya adalah lulusan MULO-- pendidikan dasar yang diperluas - sekolah setingkat SMP waktu itu. Pada jalur pendidikan menengah ini masa studi ditempuh selama enam tahun dalam dua bagian. Bagian bawah disebut *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs (MULO) afdeeling der AMS* – pendidikan menengah umum bagian pendidikan dasar yang diperluas. Bagian kedua/atas disebut *Vorbereidend Hooger Onderwijs afdeeling der Algemeene Middelbare School (VHO AMS)* – pendidikan menengah umum bagian persiapan pendidikan tinggi. Tamatan afdeeling VHO ini dapat diterima berdasarkan peraturan di perguruan tinggi di Negeri Belanda.

Pada 5 Juli 1919 dibukalah AMS afdeeling B (jurusan *wis -en natuurkunde* atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) yang pertama di Yogyakarta dan kemudian AMS-I (jurusan *westersch-klassieke letteren* atau Sastra Klasik Barat) di Bandung pada tahun 1920. Menyusul kemudian AMS-I di Surakarta pada tahun 1926 dan AMS-B di Malang pada tahun 1927. Setelah itu berturut-turut dibuka sekolah AMS di di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) serta Makassar (Indonesia Timur) . Selain itu ada beberapa AMS Swasta yang dipersamakan dengan Negeri.

Umumnya orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS, dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu misalnya ke THS di Bandung (*Technische Hoogeschool te Bandoeng* - didirikan tahun 1920 - sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), RHS di Jakarta (*Rechtshoogeschool te Batavia* - didirikan tahun 1924 - sekarang Fakultas Hukum UI Jakarta), GHS di Jakarta (*Geneeskundige Hoogeschool te Batavia* - didirikan tahun 1927 - sekarang Fakultas Ke-

dokteran UI Jakarta), Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Filsafat - didirikan tahun 1940 di Jakarta), atau ke Bogor di Faculteit der Landbouwwetenschap (Fakultas Pertanian - didirikan tahun 1940 - sekarang Institut Pertanian Bogor - IPB).

Tingkat pendidikan di AMS memiliki standar yang sama dengan sekolah-sekolah di Belanda, sehingga bukan merupakan sesuatu hal yang aneh ketika ada murid yang *drop out* karena tidak mampu mengikuti pelajaran. Meskipun demikian, pada tahun 1922 AMS B berhasil mewisuda lulusan pertamanya sebanyak 32 orang, di mana 13 siswa berkebangsaan Eropa, 14 orang pribumi dan 5 orang etnis Tionghoa. Hanya ada 3 orang wanita di antara semua lulusan pada tahun tersebut. Dari 32 lulusan itu, 12 siswa di antaranya melanjutkan ke *Technische Hoogeschool te Bandoeng*. Sebagian lagi melanjutkan pendidikan di negeri Belanda.

Dalam 10 tahun perjalanannya, AMS B telah berhasil meluluskan 292 siswa. Ada 38 orang yang melanjutkan pendidikan di TH Bandung, ditambah 12 orang lagi yang sudah lulus dan menerima gelar Insinyur di bidang Teknik Sipil. Sedangkan dari para alumni yang melanjutkan pendidikan di Belanda, tujuh di antaranya melanjutkan di Delft. Selain itu, tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan Kedokteran dan Hukum di *Wetevreden*.

Kehadiran AMS di Tanah Air diakui banyak memberikan kesempatan bagi anak pribumi untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari jumlah murid pribumi yang lulus dari AMS B Yogyakarta, dalam 10 tahun, mencapai 168 murid atau sekitar 57,5% dari jumlah seluruh lulusan AMS B. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah seluruh lulusan pribumi keempat HBS di Hindia Belanda. Sepanjang eksistensi HBS yang sudah lebih dari 60 tahun ada di Hindia Belanda, tercatat hanya ada 147 lulusan HBS yang berasal dari kaum pribumi. Hal ini merupakan suatu cerminan kesuksesan AMS B dalam memperbaiki pendidikan menengah bagi kaum pribumi di Hindia Belanda. □



Bab III

SMA DI MASA KEMERDEKAAN

Menjelang masa kemerdekaan, kondisi pendidikan menengah, khususnya SMA kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikut kondisi SMA pada masa pendudukan Jepang pada masa menjelang kemerdekaan hingga masa kemerdekaan.

A. SITUASI MENJELANG KEMERDEKAAN

Berdasarkan catatan sejarah, Jepang menyerang Sumatera Selatan pada Februari tahun 1942, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar menggantikan Bahasa Belanda. Bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib; (2) adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial (dualisme pendidikan) di era penjajahan Belanda. Dengan dihapusnya dualisme dalam pendidikan ini maka siapapun boleh mengenyam pendidikan formal tanpa ada diskriminasi. Inilah tonggak sejarah demokratisasi pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang, menghasilkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

- Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat), lama studi 6 tahun. Termasuk SR (Sekolah Rakyat) adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda;
- Pendidikan Lanjutan, yang terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun;
- Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian;
- Pendidikan Tinggi.

Dalam menerapkan kebijakannya, guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di bawah pimpinan Sukarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Mas Mansyur pada Maret 1943.

Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan *The Triple Movement* yang sudah dibentuk sebelumnya tetapi tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi Putera akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hadjar Dewantara sebagai penasehat bi-

dang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan Cina yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengkomodasi kurikulum berorientasi lokal.

Pendidikan pada masa Jepang yang disebut "*Hakko Ichiu*" adalah mengajak Bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai "*Kemakmuran Bersama Asia Raya*". Cara yang ditempuh adalah melalui pola pembinaan kesiswaan di mana Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin setiap pagi melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo;
- Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika;
- Melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya;
- Wajib melakukan Taiso, senam Jepang;
- Melakukan latihan-latihan fisik dan militer;
- Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan di sekolah.

Kehadiran Jepang di Indonesia membawa dampak positif di satu sisi dan negatif di sisi yang lain bagi pendidikan. Dampak positifnya antara lain: Bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh kepulauan, buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama, ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia dilatih dan didik untuk memegang jabatan pimpinan walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang serta sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegrikan meskipun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah. Taman Siswa dan sekolah-sekolah bekas Zending dan Missei diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai sekolah negeri.

Sementara hal yang memperhatikan adalah merosotnya jumlah sekolah dibandingkan dengan keadaan pada zaman Hindia Belanda. Jumlah Sekolah Dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan dari

850 menjadi hanya 20. Demikian juga jumlah murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% dan murid sekolah menengah merosot sampai 90%.

Jumlah guru juga makin berkurang karena beratnya tugas sebagai guru dan gaji yang rendah (Gunawan, 1995:26-28). Selain mengajar, guru juga mendapat beban ganda. mereka juga harus melakukan pekerjaan politik, seperti kampanye propaganda, kursus pencerahan, pengajaran untuk umum, dan lain-lain (Aiko Kurasawa, 1993: 370). Upaya untuk mengatasi kelangkaan guru dilakukan pemerintah Jepang dengan merekrut guru-guru baru, guru bantu, atau memberi pelatihan jangka pendek. Bahkan mendatangkan guru dari Jepang, terutama untuk mengajarkan Bahasa Jepang.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MASA KEMERDEKAAN

Setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sejak itu Pemerintah Indonesia mengelola urusan dalam negerinya sendiri, termasuk urusan di bidang pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara, kendati baru pada penentuan saja karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap-tiap pelajaran (Somarsono Moestoko, 1986: 145). Pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semangat patriotisme.

Segera setelah kemerdekaan, para pemimpin Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan nasional dan mencanangkan dalam 10 tahun ke depan seluruh anak Indonesia harus bisa menikmati sekolah. Oleh karena itu dilakukan berbagai pembenahan seperti penambahan jumlah pengajar, pembangunan gedung sekolah, dan sebagainya.

Pemerintah juga membagi tingkatan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Pada awal kemerdekaan, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air, sesuai dengan program Soekarno, presiden pertama Indonesia, yaitu semangat "*nation and character building*". Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar.

Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2. (Rianti Nugroho, 2008: 16). Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan.

Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan agar secepat mungkin menjalankan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru

Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950, harus diakui, bangsa Indonesia mengalami kesusahan di berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan nasional, kondisinya kurang tertata dengan baik, terlepas hal tersebut dipengaruhi oleh faktor persoalan internal pendidikan nasional atau karena faktor persoalan eksternal. Hal ini tercermin dari terjadinya beberapa kali pergantian Menteri Pendidikan (waktu itu Menteri Pengajaran). Selama lima tahun tersebut atau di era Kabinet Presidensial, tercatat ada enam Menteri Pengajaran, yaitu:

1. Ki Hajar Dewantara, periode 19 Agustus 1945-14 November 1945 yang juga merupakan Menteri Pendidikan pertama setelah kemerdekaan Indonesia.
2. Mr. Dr. Todung Sutan Gunung Mulia, periode 14 November 1945- 12 Maret 1946.
3. Moh. Syafei, periode 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.
4. Mr. Suwandi, periode 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.
5. Ali Sastroamidjojo, periode 3 Juli 1947 – 4 Agustus 1946.
6. S. Mangunsarkoro, periode 4 Agustus 1949 – 6 September 1950.

Karena singkatnya waktu para menteri tersebut bertugas, dapat dimaklumi jika usaha-usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau berkaitan kurang tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Tetapi ada juga beberapa kebijakan yang diketahui oleh masyarakat luas, seperti pembukaan Sekolah Guru A, Sekolah Guru B dan Sekolah Guru C, yang masing-masing lama pendidikannya enam tahun, empat tahun dan dua tahun sejak

tamat sekolah rendah. Pembukaan sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang dirasakan sangat mendesak, berhubung pada masa itu pemerintah banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah baru.

Menteri Suwandi dengan keputusan No. 104/Bhg-0/1946 tertanggal 1 Maret 1946 telah membentuk suatu Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretarisnya Soegarda Poerbakawatja yang bermaksud mengatur sekolah-sekolah yang ada. Panitia tersebut kemudian mengatur pertemuan-pertemuan, diskusi, seminar dan rapat-rapat yang menghasilkan Pengaturan Pendidikan dan Pengajaran mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, dari pendidikan untuk anak desa sampai pendidikan anak kota. Dari pendidikan umum sampai pendidikan kejuruan. Terutama membahas program paling mendesak berkaitan dengan pemberantasan butu huruf (Syamsuddin, 1983:13).

Sementara itu terkait dengan pendidikan umum pada masa awal kemerdekaan, Ada dua jenis pendidikan Umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Pada 13 Maret 1946, SMT berubah nama menjadi Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMOA). Pada tahun 1950 yang merupakan masa Republik Indonesia Serikat, di mana Menteri Pengajarannya dipegang oleh Abu Hanifah, nama SMOA kemudian berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikategorikan menjadi tiga bagian yakni:

- SMA A (Bahasa)
- SMA B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam)
- SMA C (Ilmu Sosial)

Khusus untuk SMT, Kementerian PPK hanya mengurus sekolah yang ada di Jawa terutama yang berada di kota-kota seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya perhubungan dengan pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil.

Pada periode setelah kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia

memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat. Di dalam UUD 1945, BAB XIII, Pasal 31, Ayat 1 dikatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Demikian pula dalam Undang-undang No.4 tahun 1950, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Bab XI, Pasal 17 menegaskan bahwa: "Tiap tiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu."

Kedua penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberi kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak, baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini juga berarti bahwa setiap anak dari golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. Kesempatan belajar yang diberikan kepada anak-anak berakibat pada perkembangan peserta didik dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dalam tahun 1950 jumlah peserta didik SD, SLTP, dan SLTA mengalami pertumbuhan rata-rata 100% dibandingkan dengan jumlah peserta didik pada tahun 1945.

Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan belajar bagi golongan masyarakat untuk mencapai tingkat yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat. Bagi warga masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah namun berprestasi dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi dengan bantuan pemerintah yaitu beasiswa. Pemerintah juga memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Saat Menteri Pengajaran dipegang oleh Ki Hadjar Dewantara, dikembangkan pendidikan dengan sistem "among" berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan yang dikenal sebagai "Panca Dharma Taman Siswa". Serta semboyan "*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*".

Kemudian pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

C. KEBIJAKAN KURIKULUM

Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. Perbedaannya hanya pada mata pelajaran Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Kurikulum AMS bagian B memberikan pelajaran Bahasa Belanda dan tidak memberikan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kurikulum SMA jurusan B memberikan pelajaran Bahasa Indonesia dan tidak memberikan Bahasa Belanda.

Sementara pada periode tahun 1951-1969 kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk meneruskan pelajaran ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.

Setelah itu Kurikulum SMA mengalami beberapa kali perubahan kebijakan Kurikulum SMA 1952 dilaksanakan mulai tahun 1952 sampai tahun 1961, kurikulum 1961 dilaksanakan mulai tahun 1962 sampai 1964, kurikulum 1964 dilaksanakan mulai tahun 1965 sampai tahun 1968, sedangkan kurikulum 1968 dilaksanakan mulai tahun 1969. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita.

Berikut kurikulum yang diterapkan di sekolah sepanjang era setelah kemerdekaan:

1. Kurikulum SMA 1952

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan tanggal 13 Mei dan 26 Mei 1952, dibentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk membuat rancangan rencana pelajaran (kurikulum) SMA yang baru. Di antara hasil kerja panitia tersebut adalah tersusunnya

tujuan SMA, pembagian SMA dan rencana pelajaran. Tujuan SMA dirumuskan untuk mendidik siswa menjadi manusia yang berbudi baik dan mempunyai kepandaian serta kecakapan yang cukup untuk dapat mengikuti pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi dan dapat pula menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pembagian atau penjurusan di SMA tidak mengalami perubahan. SMA tetap dibagi dalam tiga bagian atau jurusan, yaitu bagian A (sastra), B (ilmu pasti-alam) dan C (yuridis-ekonomi). Ketiga bagian tersebut terpisah sejak awal (sejak kelas satu) dan tidak ada integrasi dari ketiga bagian tersebut selama siswa menempuh pendidikannya.

Adapun struktur program Rencana Pelajaran (Kurikulum) SMA 1952 di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan, terdapat pembagian program ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok: Pokok, Penting, dan Pelengkap. Urutan kelompok tersebut menunjukkan prioritas kedudukannya ataupun tingkat kepentingannya dan kelompok Pokok menjadi ciri utama dari bagian-bagian atau jurusan-jurusan di SMA tersebut. Misalnya kelompok Pokok pada bagian A (sastra) terdiri dari mata pelajaran-mata pelajaran utama ilmu bahasa dan sastra. Sedangkan kelompok Pokok pada bagian B (pasti alam) terdiri dari mata pelajaran-mata pelajaran utama ilmu pasti dan ilmu alam. Hal ini berlaku juga untuk kelompok Penting dan Pelengkap.

Selain itu dalam Kurikulum SMA 1952 secara jelas tidak ada yang disebut program pendidikan umum ataupun yang dapat dikategorikan sebagai program pendidikan umum. Dalam Kurikulum SMA 1952 memang ada beberapa mata pelajaran yang arahnya untuk pembinaan keharmonisan kepribadian para siswa, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai pendidikan umum.

Misalnya Pendidikan Agama, sekalipun diarahkan untuk membina kepribadian siswa, namun menurut ketentuan UU no. 4/1950, mata pelajaran Pendidikan Agama bukanlah mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa, karena siswa boleh mengikutinya ataupun tidak. Jadi mata pelajaran Pendidikan Agama pada Kurikulum SMA 1952 tidak mempunyai kedudukan yang penting dan boleh diikuti atau tidak, sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai pendidikan umum.

2. Kurikulum SMA 1961

Kurikulum SMA 1961 diterapkan ketika Kementerian dipimpin Men-

teri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto. Kurikulum ini dikembangkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap usaha pembaruan kurikulum yang telah dilakukan. Kurikulum SMA 1961, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Tujuan SMA ialah mengembangkan cita-cita hidup serta mengembangkan kemampuan dan kesanggupan sebagai anggota bermasyarakat dan mendidik tenaga ahli dalam pelbagai lapangan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
- b. Penggolongan mata pelajaran di SMA dibagi menjadi empat
- c. Kelompok yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu: (1) Kelompok dasar (enam mata pelajaran) yaitu kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi, dan pendidikan jasmani dan kesehatan; (2) Kelompok khusus (tujuh mata pelajaran), yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan bakat siswa dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; (3) Kelompok Penyerta (tiga mata pelajaran) yang dianggap perlu untuk memperluas mata pelajaran kelompok khusus; dan (4) Kelompok prakarya dan krida.
- d. Penjurusan di SMA mulai dilaksanakan di kelas II dan menghapus jurusan A, B, dan C dengan mengganti jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan.

Kurikulum SMA tahun 1961 disebut kurikulum Gaya Baru atau kurikulum SMA Gaya Baru.

3. Kurikulum SMA 1964

Kurikulum SMA 1961 berubah menjadi kurikulum SMA 1964, karena pengaruh kehidupan politik. Kurikulum 1964 disebut dengan kurikulum Pancawardhana. Tujuan kurikulum ini yaitu tujuan SMA semakin kompleks, tidak hanya untuk meneruskan ke perguruan tinggi tetapi juga terjun ke semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat.

4. Kurikulum SMA 1968

Kurikulum SMA 1968 bertujuan untuk mengembalikan posisi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila pasca terjadinya peristiwa G 30 S pada tahun 1965. Berdasarkan kurikulum ini, tujuan pendidikan SMA adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehendaki oleh Pembukaan dan Isi UUD 1945.
- b. Mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi dengan jalan mematangkan mental dan intelegensi yang dilengkapi dengan dasar-dasar umum kecakapan kejuruan dan pembinaan perkembangan fisik yang kuat dan sehat.
- c. Memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dalam pelbagai lapangan sehingga tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lembaga-lembaga pendidikan lain dan lembaga masyarakat. □



Bab IV

SMA PADA MASA ORDE BARU

Di masa Orde Baru pengelolaan pendidikan dilakukan lebih baik. Demikian pula Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengelolaan pendidikan terpusat menjadi warna tersendiri yang menjadi pijakan penyebaran sekolah di seluruh Indonesia. Berikut tentang SMA di masa orde baru.

A. LATAR BELAKANG

Berbicara masalah perkembangan kondisi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, tentu tak bisa dilepaskan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah pada zamannya. Kebijakan pendidikan ini tertuang dalam kurikulum pendidikan. Pada zaman orde baru, kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Orde baru sendiri adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selain ekonomi, sektor pendidikan merupakan aspek yang menjadi fokus utama pemerintahan Orde Baru dengan mengusung tujuan untuk “membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya”. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dua landasan utama Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk dalam sektor pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional yang pertama kali ditetapkan sejak era Orde Baru di Indonesia adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab II Ayat 3. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan manusia yang berjiwa Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Implikasi dari dikeluarkannya TAP MPRS di bidang pendidikan adalah, lembaga pemerintah di bidang pendidikan disederhanakan, baik dalam jumlah maupun struktur. TAP MPRS juga melihat keadaan dunia pendidikan pada masa itu dan perkembangan belajar pada masa-masa yang akan datang. Berangkat dari pemikiran ini pada 28-30 April 1969, pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengundang para pakar di bidang pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi semua persoalan di bidang pendidikan, menyusun prioritas pemecahan sesuai dengan arah pembangunan nasional, serta mencari alternatif pemecahan. (Tilaar, 1995:113-114).

Salah satu hasil Konferensi Cipayung yang terkenal adalah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan pada 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud Tanggal 26 Mei 1969 Nomor 033/1969. Isi SK tersebut adalah dalam jangka waktu dua tahun (kemudian diubah menjadi tiga tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kajian PPNP kemudian dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 84/1969 tanggal 18 Oktober 1969. Tugas Badan Pengembangan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan
2. Mengadakan eksperimen-eksperimen dan proyek-proyek perintis dalam rangka pengembangan pendidikan
3. Menyiapkan rencana, program dan kebijaksanaan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mengingat Orde Baru diidentikkan dengan ideologi atau slogan pembangunan, arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerak pembangunan dari setiap program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada Pelita I, rumusan kebijakan pendidikan nasional saat itu dihubungkan dengan persoalan ketenagakerjaan yang tentunya ada kaitannya dengan pembangunan. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah jangka panjang mewujudkan keterkaitan antara pendidikan dan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Membuat peraturan untuk mengawasi atau membatasi pembukaan sekolah-sekolah menengah umum serta Fakultas Sosial Politik dan memperbanyak sekolah kejuruan, mendorong pengembangan fakultas ilmu pengetahuan eksakta
2. Meletakkan dasar bagi pengembangan sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum yang diarahkan kepada pengetahuan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan fasilitas seperti alat-alat serta laboratorium untuk praktik.
3. Memperluas pendidikan guru dan keguruan tinggi serta meningkatkan mutu
4. Dalam perguruan tinggi diprioritaskan untuk jurusan pertanian, teknik, ekonomi, kedokteran dan keguruan.

Dari rumusan tersebut terlihat ideologi pembangunan dan faktor ekonomi sudah diletakkan sejak awal oleh pemerintah Orde Baru. Perkembangan bidang pendidikan berlanjut ketika MPR hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan nomor IV/MPR/1973 yang dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "membentuk manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya serta mencintai sesama manusia sesuai den-

gan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.” (Mohammad Ali, 2007: 322).

Kemudian dilakukan pembaharuan tujuan pendidikan nasional yang diatur melalui Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1978 dan ditegaskan dalam GBHN yang berbunyi: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.” (Ary H. Gunawan, 1986: 51).

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA AWAL ORDE BARU

Pendidikan pada masa Orde Baru menjadi salah satu kebijakan politik dan pemerintahan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pendidikan pada masa ini dijadikan sebagai salah satu sektor utama untuk menyokong pembangunan ekonomi Orde Baru. Target utama pembangunan pendidikan nasional pada Repelita I (1969-1974) adalah pendidikan dasar 9 tahun, serta perbaikan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan yang semakin terarah demi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan inilah yang tertuang dalam GBHN tahun 1973.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “membentuk manusia manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Namun, target pemenuhan pendidikan dasar selama 9 tahun ternyata masih cukup sulit untuk dijalankan sehingga pemerintah Orde Baru mereduksinya menjadi program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 dengan target pengentasan pendidikan dasar hingga lulus Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau jenjang pendidikan lain yang sederajat.

Sementara kurikulum yang diterapkan di sekolah pada masa awal Orde

Baru adalah Kurikulum 1968 yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1969. Khusus untuk jenjang pendidikan SMA, struktur Program Rencana Pendidikan dan Pelajaran SMA tahun 1968 lahir selain karena perubahan ideologis-politis, juga karena Kurikulum SMA Gaya Baru 1964 masih memiliki beberapa kekurangan tapi tidak mengharuskan dilakukan perubahan mendasar. Karenanya Kurikulum SMA 1968 disebut sebagai kurikulum SMA Gaya Baru yang disempurnakan.

Beberapa perbedaan yang terdapat pada Kurikulum SMA 1968 dibandingkan Kurikulum SMA 1964 antara lain terdapat pada struktur jurusan. Jika dalam Kurikulum SMA 1964 terdapat empat jurusan (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam), maka dalam Kurikulum SMA 1968 disederhanakan menjadi dua jurusan (kelompok), yaitu jurusan Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (Pas-Pal) dan jurusan Sastra -Sosial-Budaya.

Dalam struktur program Kurikulum SMA 1968 terdapat tiga program atau kelompok mata pelajaran, yaitu Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Dari ketiga program tersebut, kelompok mata pelajaran dalam Kurikulum SMA 1968 yang dapat dikategorikan sebagai program pendidikan umum dan wajib adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila karena menitikberatkan pada pembinaan mental budi-pekerti Pancasila dan memperkuat keyakinan beragama. Program Pendidikan Umum (kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila) pada Kurikulum SMA 1968 terdiri dari empat mata pelajaran, yaitu:

- Pendidikan Agama;
- Pendidikan Kewargaan Negara;
- Bahasa Indonesia; dan
- Pendidikan Olahraga.

Keempat mata pelajaran tersebut di atas diberikan kepada setiap siswa mulai dari kelas satu sampai dengan kelas tiga dan diberikan pada semua jurusan (Sastra-Sosial-Budaya dan Ilmu Pasti & Ilmu Pengetahuan Alam).

Di samping adanya kebijakan-kebijakan yang baru dari lembaga tertinggi negara yang menyangkut pendidikan, lingkungan persekolahan, sejak Repelita I telah mengalami perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari usaha pembaharuan pendidikan. Usaha pembaharuan pendidikan itu antara lain melalui pencetakan buku-buku pelajaran dan pembaharuan

sekolah melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Juga adanya pembaharuan di dalam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efektif dan efisien.

Sedangkan pada Repelita II (1974 -1979), strategi kebijakan pendidikan nasional meliputi empat butir, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan (Mohammad Yamin, 2009: 99). Konsep pendidikan nasional ini bertahan cukup lama, bahkan masih diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru. Setahun masuk periode Repelita II, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum 1975.

Capaian pendidikan nasional pada Pelita II terlihat ada peningkatan jumlah siswa cukup signifikan di setiap jenjang pendidikan. Untuk siswa SD, jika dibandingkan dengan tahun 1954/1955, di tahun 1978 terjadi kenaikan sekitar 12%. Siswa SLTP sekitar 18,2% dan siswa SMA mencapai 31%, di kurun waktu yang sama. Dalam rangka melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan SMA, pemerintah juga telah membangun 495 unit gedung SMA dan 4.524 ruang kelas baru, serta merehabilitasi 837 gedung SMA. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, sejalan dengan pembangunan gedung dan ruang kelas baru, telah pula dilaksanakan penempatan 12.017 orang calon guru.

Begitu pula dengan fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar, sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah juga membangun 754 ruang laboratorium IPA, 327 ruang perpustakaan dan 277 ruang keterampilan. Pengadaan 1.816 set alat praktek laboratorium IPA, 2.032 set alat kesenian dan olahraga, 1.816 set alat peraga matematika dan 1.336 set alat keterampilan. Di samping itu telah diadakan penataran tenaga kependidikan, pengadaan buku pelajaran pokok dan buku perpustakaan baik untuk SMP maupun SMA.

Pada era ini Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan dan mengalami beberapa kali perubahan. Kurikulum yang dimaksud adalah:

1. Kurikulum SMA 1975

Seperti halnya perubahan kurikulum-kurikulum sebelumnya, penerapan kebijakan Kurikulum 1975 adalah peningkatan dari Kurikulum 1968. Lahirnya Kurikulum 1975 di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif

Thayeb (1974-1978), dimaksudkan sebagai sistem yang dapat menunjang tercapainya sasaran pembaruan dan pembangunan pendidikan, yaitu:

1. Pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan;
2. Meningkatkan mutu pendidikan;
3. Meningkatkan relevansi pendidikan;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendidikan (Soedijarto, 1980:8-9).

Kurikulum 1975 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, antara lain digunakannya pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Hal ini berarti bahwa segala beban pelajaran dan kegiatan belajar-mengajar dipilih, direncanakan dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Kurikulum ini berupaya agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (*Management by Objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirumuskan secara detail dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau yang kemudian dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Hal yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah kewajiban bagi guru untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung.

Selain itu dalam organisasi pelajarannya, Kurikulum 1975 menganut pendekatan bidang studi, sehingga lahirlah bidang studi IPA, IPS, PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan lain-lain. Dalam sistem belajar-mengajar juga menggunakan pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).

Pemerintah juga merumuskan ulang tujuan institusional jenjang pendidikan SMA. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembakuan Kurikulum SMA 1975 disebutkan bahwa tujuan umum Pendidikan SMA adalah agar lulusan:

1. Menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin;
2. Menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan

dari pendidikan di Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;

3. Memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh:
 - Program umum yang sama bagi semua siswa;
 - Program pilihan bagi mereka yang mempersiapkan dirinya untuk studi di lembaga pendidikan yang lebih tinggi;
4. Memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Pada Kurikulum 1975, jenjang pendidikan SMA menyediakan tiga jurusan, yaitu: jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan jurusan Bahasa. Pembagian jurusan ini berbeda dengan pembagian jurusan menurut Kurikulum SMA 1968 yang mengenal dua jurusan (Sastra-Sosial-Budaya dan Pas-Pal) ataupun dengan Kurikulum SMA 1964 yang mengenal empat jurusan (Budaya, Sosial, IPA, dan Ilmu Pasti).

Sementara Struktur program Kurikulum SMA 1975 terdiri dari tiga program, yaitu: (1) Program Pendidikan Umum, (2) Program Pendidikan Akademis dan (3) Program Pendidikan Keterampilan. Program Pendidikan Umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa, termasuk Program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik.

Pendidikan Akademis ialah pendidikan yang diberikan sebagai persiapan untuk melanjutkan studi. Sedangkan program Pendidikan Keterampilan ialah pendidikan yang, diberikan kepada siswa agar memiliki sesuatu kemampuan untuk bekerja yang dapat digunakan bila tidak melanjutkan studinya. Tentang mengapa Program Pendidikan Moral Pancasila menjadi mata pelajaran wajib, ada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengaturnya. Dalam Pembakuan Kurikulum SMA 1975 dinyatakan bahwa: Pendidikan umum ialah pendidikan yang, bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik.

Dilihat dari nama programnya, pengertiannya dan dari fungsinya, maka terlihat Program Pendidikan Umum dalam Kurikulum SMA 1975 terdiri dari empat mata pelajaran yang wajib diberikan kepada semua siswa di setiap kelas dan setiap jurusan. Keempat mata pelajaran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Moral Pancasila (PMP);
3. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan; dan
4. Pendidikan Kesenian.

Pendidikan Moral Pancasila (PMP)—nama pengganti untuk mata pelajaran Kewarganegaraan yang telah diterapkan sebelum tahun 1976—seperti halnya Pendidikan Agama, ditetapkan oleh GBHN 1973 untuk masuk dalam kurikulum setiap persekolahan.

Di dalam Kurikulum SMA 1975 itu, bidang studi PMP termasuk dalam satu bidang studi program pendidikan umum. Pendidikan Moral Pancasila bertujuan membentuk siswa menjadi manusia Indonesia, manusia Pancasila, yakni manusia warga negara Indonesia yang dapat hidup sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan hidup bernegara seperti yang diatur oleh UUD 1945.

Dalam kata pengantar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kurikulum SMA 1975 disebutkan bahwa Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum 1975 tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran PMP saja, melainkan juga terkandung maknanya pada mata pelajaran lain seperti Pendidikan Agama dan bidang studi lain, terutama program pendidikan umum dan bidang studi IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi).

Tentang buku penunjang pelajaran, Sejak Pelita II pengadaan buku bacaan atau pengadaan buku teks untuk melaksanakan Kurikulum 1975 telah dilaksanakan secara besar-besaran sejak dari penulisan, uji coba, penyempurnaan serta percetakan buku-buku tersebut. Industri perbukuan menjadi marak karena adanya kebutuhan akan buku-buku penunjang dalam jumlah besar. Mata pelajaran yang diprioritaskan pengadaan buku teksnya untuk tingkat sekolah lanjutan atas adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. Pengadaan buku teks ini dipenuhi dari dana Pelita program Pembangunan Bidang Pendidikan. Sementara buku-buku pelajaran penunjang diterbitkan oleh pihak swasta.

Kemudian dalam rangka pemanfaatan buku-buku bacaan, sejak Pelita II dibuka kesempatan lebih luas untuk memperoleh buku bacaan, baik untuk menunjang proses belajar-mengajar di sekolah maupun pendidikan

luar sekolah dan masyarakat. Hal ini terlihat dari dengan dibangunnya sejumlah perpustakaan umum. Begitu pula dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, dibuka juga “sudut-sudut membaca” maupun menggalakkan pendirian perpustakaan-perpustakaan di masyarakat, di lingkungan masjid, gereja dan lembaga-lembaga peribadatan lainnya serta pada organisasi-organisasi masyarakat (Tilaar, 1995:382-383).

Pada periode Pelita II dan IV atau di era tahun 1980-an, rumusan kebijakan pendidikan nasional tampaknya tidak mengalami banyak perubahan dengan apa yang dirumuskan pada periode-periode sebelumnya, yaitu Pelita I dan Pelita II. Hal ini bisa jadi mencerminkan bahwa jalannya pemerintahan pada saat itu relatif stabil, termasuk dalam bidang pendidikan nasional.

Baru pada tahun berikutnya Pemerintah melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap kurikulum yang sedang berjalan yaitu Kurikulum 1975. Sampai akhirnya keluar keputusan untuk memperbaharui dan melahirkan kurikulum baru, yang dinamakan Kurikulum 1984 yang dilatarbelakangi oleh kondisi melajunya pembangunan nasional. Kurikulum ini telah melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan, juga dalam pendidikan nasional. Pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef menggariskan kebijakan pendidikan sistem pendidikan nasional yang memiliki ciri yaitu:

- Semesta. Artinya meliputi semua unsur kebudayaan, yaitu logika, etika, estetika, ketrampilan, nilai-nilai moral dan spiritual
- Terpadu. Artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menghendaki satu sistem dan pengelola tunggal bagi sistem tersebut.
- Dalam rangka inilah muncul konsep pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pendidikan moral serta estetika. Jadi, pendidikan bukan hanya akan melahirkan tenaga-tenaga kerja trampil, melainkan juga bermoral dan beretika.

Keinginan Menteri Daoed Joesoef untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional diikuti dengan pembentukan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPPN) yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Imam Santoso dan

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai wakil ketua. Hasil kajian dari KPPN kemudian menjadi masukan yang berarti dalam usaha penyusunan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru, menggantikan UU No. 4 Tahun 1950.

2. Kurikulum SMA 1984

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983 tentang perbaikan kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum di bawah pimpinan Prof. Dr. Conny Semiawan periode 1980-1986, sesuai dengan tugasnya mengadakan perbaikan kurikulum. Sebelum dilakukan perbaikan terhadap Kurikulum 1975 yang telah berjalan selama lima tahun, sebenarnya telah ada beberapa masukan terhadap kurikulum tersebut, yakni (Conny R. Semiawan, 1984 : I), :

1. Adanya beberapa unsur baru dalam GBHN 1983 yang perlu ditampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
2. Masih terdapatnya kesenjangan antara program kurikulum dan kebutuhan-kebutuhan lapangan kerja serta pendidikan tinggi;
3. Belum sesuainya kurikulum berbagai bidang/ mata pelajaran dengan taraf kemampuan belajar siswa;
4. Adanya kelemahan-kelemahan isi kurikulum dalam berbagai bidang/ mata pelajaran di berbagai jenis/jenjang pendidikan, antara lain terlalu saratnya isi kurikulum yang harus diajarkan;
5. Adanya kesenjangan antara jumlah lulusan SMA yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan jumlah keseluruhan lulusan SMA
6. Adanya kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di lapangan.

Melalui berbagai diskusi, pemikiran, ujicoba dan evaluasi, kemudian dihasilkan Kurikulum Kurikulum 1984 TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, MA/SMALB, SPG/LB dan SMK baik yang setingkat dengan tingkat SMP maupun yang setingkat dengan tingkat SMA. Perbaikan terhadap kurikulum mencakup:

1. Peninjauan kembali secara menyeluruh kurikulum yang berlaku melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada:

- a. Pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikuasai dalam pembentukan kemampuan dan watak peserta didik.
 - b. Keterpaduan dan keserasian antara matra kognitif, afektif dan psikomotorik.
 - c. Penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum dengan perkembangan masyarakat, pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas, termasuk Pendidikan Luar Sekolah.

Dalam konteks perubahan, sebenarnya ada tiga pertimbangan dasar dilakukannya penyempurnaan Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984:

- Adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1983 di mana dinyatakan perlu adanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Secara operasional TAP MPR tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0461/U/1983 tertanggal 22 Oktober 1983 yang menyatakan perlunya perbaikan kurikulum.
- Hasil penilaian Kurikulum 1975 antara tahun 1979 sampai dengan 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ilmu dan teknologi.
- Hasil- hasil yang dicapai oleh Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, hasil studi kognitif, keberhasilan perintisan Bantuan Profesional Kepada Guru yang menekankan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif.

Pengembangan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor IV/MPR/1978 dan nomor II/MPR/1983 yaitu "Pendidikan Nasional berdasarkan azas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan pendidikan nasional tersebut termaktub juga di dalam GBHN 1983. Di dalam tujuan pendidikan nasional menurut GBHN di atas, terdapat unsur baru yang belum ditampung di dalam Kurikulum 1975, yaitu butir "mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air".

Hal inilah antara lain yang mendorong perlunya pembaharuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah (termasuk SMA). Butir tujuan "mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air" tersebut, secara khusus akan ditopang oleh mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Mata pelajaran ini pun telah ditetapkan dalam GBHN 1983 agar wajib diberikan di sekolah - sekolah. Rumusan penetapan GBHN tersebut adalah "Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta,wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa."

Dari tujuan pendidikan nasional tersebut, kemudian dikerucutkan tujuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, yaitu:

- Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, terutama di universitas dan institut dan juga memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, akademi, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat;
- Memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Tujuan SMA tersebut di atas memperlihatkan dua arah utama, yakni memberi bekal kepada siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memberi bekal kepada siswa yang akan terjun ke dunia kerja. Namun kedua kelompok siswa tersebut dalam kedudukannya sebagai warganegara Indonesia diharapkan menjadi manusia pembangunan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan

bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif.

2. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
3. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran.
4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan.
6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar-mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya.

Kebijakan dalam penyusunan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Kurikulum 1984 memiliki enam belas mata pelajaran inti.
2. Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing.
3. Perubahan program jurusan. Kalau semula pada Kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa, maka dalam Kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari:

- A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika;
- A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi;
- A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi;
- A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya;
- B, penekanan keterampilan kejuruan. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini akhirnya ditiadakan.

Pendidikan idiologi dalam kurikulum 1984 tetap menjadi warna yang dominan dalam kurikulum. Pemerintah menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum sejak SD sampai ke perguruan tinggi. Dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 ditetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dan diarahkan untuk menumbuhkan kerja jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945.

Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 ditetapkan pula Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai "penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh." Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) yang juga dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa ditetapkan sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila melalui TAP MPR Nomor II/MPR/1983.

Struktur Kurikulum SMA 1984 mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan Kurikulum SMA 1975. Pada kurikulum SMA 1984 mata pelajaran dikelompokkan Program Inti yang harus diikuti seluruh peserta didik dan Program Pilihan yang mengganti istilah penjurusan. Perubahan terjadi juga dalam penjurusan baik mengenai waktu maupun mengenai jumlah penjurusan. Peserta didik baru memilih jurusan yang dinamakan Program Pilihan pada saat mereka naik ke kelas II dan bukan pada semester II.

Orientasi pendidikan disiplin ilmu pada kurikulum SMA 1984 semakin kental dibandingkan kurikulum sebelumnya. Orientasi pendidikan disiplin ilmu tampak pada nama-nama mata pelajaran yang disamakan dengan nama disiplin ilmu dan pada mata pelajaran. Program Inti yang tidak saja terdiri dari mata pelajaran umum seperti agama, PMP, dan pendidikan

jasmani terdapat pula mata pelajaran untuk landasan pendidikan akademik. Mata pelajaran Sejarah (Indonesia dan Dunia), Geografi, Bahasa, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran dalam Program Inti. Kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak mengubah posisi belajar peserta didik. Peserta didik harus memegang peran aktif dalam belajar terus dipertahankan. Bahkan kurikulum baru menambah peran aktif itu dengan memperkenalkan ketrampilan proses. Peserta didik harus melaksanakan ketrampilan proses sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengembangkan masalah berdasarkan apa yang telah dibaca, diamati, dan dibahas.

Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 1984 adalah prinsip dekonstruksi yang mempunyai arti adanya pembagian kewenangan dalam pengembangan kurikulum antara pusat dan daerah. Kewenangan daerah dalam hal ini terutama terletak pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dan lapangan kerja di daerah. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pejabat di Departemen Pendidikan dan Kantor Depdikbud tingkat Kabupaten dan atau Tingkat Kecamatan serta instansi lain yang terkait, misalnya Kanwil Depnaker, Gubernur, Walikota/Bupati, dll.

Sementara pengembangan Kurikulum 1984 perlu berpedoman pada azas-azas (1) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan GBHN, (2) keluwesan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik pada umumnya maupun kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya, serta kebutuhan lingkungan, (3) pendekatan pengembangan yang berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus, yaitu dengan jalan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk maksud perbaikan/pemantapan dan pengembangan lebih lanjut dan (4) peran serta daerah di mana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk Sekolah Menengah Atas. Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap mulai dari kelas I pada tahun ajaran 1984/1985, kelas I dan kelas II pada tahun ajaran 1985/1986, dan seterusnya (Soedirdjo, dkk, 2010: 45-46).

C. PENDEKATAN CARA BELAJAR SISWA AKTIF

Tentang pendekatan CBSA atau *Student Active Learning* (SAL), yang merupakan salah satu ciri dalam Kurikulum 1984, dalam dunia pendid-

kan di Indonesia sempat menjadi pembicaraan dan mendapat perhatian yang sangat luas di masyarakat karena merupakan terobosan baru dalam proses belajar mengajar di kelas. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Pada hakekatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti: mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, memberikan prakarsa/gagasan, menyusun rencana, dan sebagainya. Keaktifan itu ada yang dapat diamati dan ada pula yang tidak dapat diamati secara langsung. Setiap kegiatan tersebut menuntut keterlibatan intelektual-emosional siswa dalam proses pembelajaran melalui asimilasi, dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk keterampilan (motorik, kognitif dan sosial), penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan.

Pemerintah, melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkurandik), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan uji coba penerapan pendekatan CBSA pada tahun 1979, dengan target Sekolah Dasar di Kabupaten Cianjur. Adalah Prof. Conny Semiawan, Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional periode 1980-1986, tokoh penting di balik lahirnya konsep pendekatan CBSA serta Kurikulum 1984. Apa yang dilakukan dalam uji coba di sekolah-sekolah Dasar di kabupaten Cianjur adalah model belajar-mengajar "cara baru". Titik tolak kegiatan ini adalah ingin dicapainya suatu tujuan: merangsang anak berkembang semaksimal mungkin dengan peran guru seminimal mungkin.

Pendekatan CBSA pada akhirnya diterapkan di semua tingkatan pendidikan. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak perubahan dan perbaikan saat diterapkan secara nasional. Secara umum karakteristik dari metode CBSA di antaranya adalah mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, faktor tujuan tetap penting.

Selain itu, pendekatan CBSA menitikberatkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar yang diwujudkan dalam berbagai

bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi dan sebagainya. Pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif.

Contoh nyata pendekatan CBSA pada proses belajar mengajar di jenjang SMA, misalnya pada mata pelajaran Fisika dengan pokok bahasan Suhu dan Kalor. Sub Pokok Bahasan: Suhu dan Termometer. Waktu satu kali pertemuan. Sumber bahan buku Fisika Kelas I dengan kompetensi dasar (tujuan instruksional khususnya/TIK) adalah: menentukan suhu benda dingin dan suhu benda panas dengan menggunakan termometer. Menyebutkan skala-skala dalam pengukuran suhu suatu benda. Menjelaskan perbandingan antara skala satu dan skala lainnya. Kemudian murid-murid ditugaskan membuat kelompok kecil untuk mengukur suhu air es (dingin) dan air yang mendidih (panas) dengan menggunakan termometer. Kemudian murid diminta menyebutkan suhu yang lebih tinggi antara air es (dingin) dan air mendidih (panas). Hasilnya kelompok murid menuliskannya pada lembar kerja untuk dipresentasikan di depan kelas.

Atau contoh lainnya adalah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra. Topik bahasan saat itu adalah Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Guru kelas memberikan tugas kepada siswa untuk membuat resensi sederhana dari roman/novel terbitan Balai Pustaka atau terbitan modern. Guru kelas hanya memberikan sumber bacaan dan garis besar ceritanya saja. Selanjutnya murid-murid yang membuat resensi sederhana secara berkelompok dan menceritakan kembali isi buku tersebut.

Tujuan/kompetesi yang hendak dicapai adalah: murid dapat menuliskan isi buku secara singkat, jelas dan padat. Murid dapat menceritakan kembali isi buku serta dapat membedakan roman/novel zaman Balai Pustaka dan modern. Dalam diskusi kelompok di kelas, tentu saja akan terjadi perdebatan dan saling sanggah sehingga tak jarang membuat suasana kelas menjadi gaduh. Di sini lah peran guru kelas diperlukan untuk menjadi fasilitator, komunikator dan organisator yang dapat menguasai kelas, di samping menguasai topik bahasan juga.

Menurut Drs. H. Muhsin Lubis, Anggota Tim Pengembangan Kurikulum 1984, sebenarnya filosofi dari pendekatan CBSA adalah "keterampilan proses". Kepala Pusat Kurikulum Conny Semiawan memiliki idealisme bahwa anak didik di sekolah Indonesia harus aktif, memiliki kreatifitas dan jalan keluar sendiri dalam memecahkan persoalan. Siswa harus mengetahui prosesnya. Guru bertugas sebagai fasilitator saja sehingga peran pendidik diupayakan seminimal mungkin. Tujuan yang hendak dicapai dari pendekatan CBSA adalah:

- Siswa dididik untuk dapat berfikir kritis;
- Mampu memecahkan permasalahan;
- Mampu mandiri;
- Mampu bersosialisasi/kerja kelompok;
- Dapat berkomunikasi yang efektif dan baik;
- Bersikap positif dan bermoral;

Sebenarnya inti dari belajar adalah perubahan dan pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas peserta didik. Ketiga ranah tersebut, menurut Drs. H. Muhsin Lubis, merupakan dasar peserta didik dalam mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yakni mampu hidup di masyarakat. Semakin tinggi dan terlatih ketiga ranah tersebut, semakin mudah peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Ketiga ranah tersebut haruslah diupayakan oleh para pendidik, khususnya di bidang pendidikan yang merupakan tempat meletakkan dasar kehidupan.

Kenyataan yang ada di lapangan justru sebaliknya, peserta didik hanya mendapat kesempatan untuk mengaktifkan satu ranah aspek pengetahuan/ingatan saja. Sedang aspek lainnya sedikit terabaikan. Selain itu dalam pembelajaran klasikal, peserta didik cenderung bersikap pasif, sedang guru berperan dominan. Kegiatan belajar cenderung lebih banyak diberikan oleh guru karena cara demikian dianggap lebih mudah untuk memelihara ketertiban kelas. Jika ada siswa yang berani mengemukakan pendapat atau memberi argumentasi, dianggap siswa yang tidak menghormati guru dan tidak jarang siswa tersebut dibatasi ruang geraknya. Akibatnya siswa kurang berani mengeluarkan pendapat, sangat tergantung pada guru, kurang inisiatif dan tidak terlatih untuk berdiri sendiri dalam hal belajar.

Secara teoritis, pendekatan CBSA memiliki manfaat nyata dalam proses belajar mengajar. Namun setiap kurikulum tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan yang ada akan diperbaiki dan disempurnakan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984 menurut (Masliana; Radicks 2012) adalah sebagai berikut.

- Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya;
- Keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas dan keberanian mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas;
- Anak dapat belajar dari pengalaman langsung;
- Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial.

D. KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA ERA TAHUN 1990-AN

Perkembangan pendidikan di era di tahun 1990-an, yaitu pada periode Pelita V dan VI pada Kabinet Pembangunan Presiden Soeharto, menorehkan sejarah tersendiri. Presiden, saat menyampaikan pidato pertanggungjawaban pada 1 Maret 1993, tentang pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengatakan bahwa: "Pembangunan pendidikan nasional akan dilaksanakan secara lebih terpadu dan serasi sesuai dengan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis ketrampilan dan keahlian. Sehubungan dengan itu, berbagai jenis pendidikan kejuruan dan keahlian, termasuk politeknik, terus diperluas dan ditingkatkan mutunya. Dalam pada itu, keterpaduan antara pendidikan dan dunia usaha semakin diupayakan."

Pesan Presiden Soeharto ini kemudian oleh Menteri Pendidikan saat itu, Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro seorang teknokrat yang menimba ilmu di Jerman Barat, diimplementasikan ke dalam kebijakan pendidikan yang dinamakan program Link and Match yang mengaitkan berbagai macam program dan kurikulum di sekolah dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Menteri Pendidikan, Link and Match pada hakekatnya adalah peningkatan mutu agar kompetensi siswa sesuai

dengan tantangan zaman. Program ini merupakan keharusan mutlak agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dan mampu bersaing. Kebijakan ini oleh para pelaksana di lapangan kemudian diterjemahkan sebagai Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang populer disebut sebagai model belajar sambil magang kerja, yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistemis dan sinkron antara program pendidikan sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Pendidikan di Indonesia pada saat itu dianggap menghasilkan lulusan yang tidak siap masuk dunia kerja. Caranya adalah dengan memperkenalkan program Link and Match. Pada perjalanannya, program Link and Match yang menjadi topik bahasan di masyarakat luas, diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bagaimana caranya, dia masuk dalam kurikulum. Pemerintah pada saat itu juga tengah memikirkan untuk memperbaharui Kurikulum 1984 karena dianggap proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar yang kurang memperhatikan muatan pelajaran. Maka kemudian lahirlah Kurikulum 1994.

Tentang konsep *Link and Match*, sebelum ada pendidikan melalui sekolah seperti sekarang, sebenarnya pendidikan dijalankan secara spontan dan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak petani mempelajari pertanian dengan langsung bekerja di sawah. Anak-anak nelayan mempelajari kelautan dan perikanan langsung mengikuti orang dewasa menangkap ikan. Selagi mempelajari pekerjaan yang dilakukan, mereka sekaligus juga belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dilihat secara demikian, maka pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang kongkret, spontan, dan tidak direncanakan tetapi langsung berhubungan dengan keperluan hidup. Dengan kata lain, dalam situasi yang belum mengenal sistem sekolah, sifat pendidikan pada dasarnya selalu bersifat link and match.

Namun dalam prakteknya di lapangan kemudian menjadi diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada sekolah yang mengartikan konsep Link and Match kerjasama dunia pendidikan—dalam hal ini sekolah—dengan dunia usaha. Contohnya, ketika ada sebuah perusahaan memperkenalkan produk baru, sebut saja sistem teknologi informasi, yang dapat dipakai aplikasikan di sekolah, kemudian mereka mengundang manajemen seko-

lah ke acara perkenalan, itu bisa dikategorikan sebagai Link and Match. Pada akhirnya masyarakat tidak bisa membedakan antara konsep Link and Match dan upaya terselubung dunia usaha untuk melakukan promosi atau publikasi secara cuma-cuma dengan sasaran kaum terpelajar.

Ada juga sekolah SMA yang menerapkan konsep ini secara jernih. Sebuah SMA laboratorium di Jakarta, melihat konsep ini dengan pemahaman Kepala Sekolah, bahwa tujuan pendidikan di SMA adalah mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kaitannya dengan program *Link and Match*, pihak sekolah menyediakan fasilitas, persiapan serta informasi yang jelas dan lengkap bagi anak didik tentang perguruan tinggi yang akan mereka bidik yang sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan.

Dapat dikatakan bahwa program ini akhirnya memang diterjemahkan berbeda-beda oleh manajemen sekolah di tiap-tiap sekolah. Lagi-lagi, manajemen sekolah dan tenaga pengajar yang menjadi ujung tombak bagaimana dan ke mana siswa akan dibimbing

Kurikulum ini lahir memiliki tujuan, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (PP. No. 28 tahun 1990). Atau dalam bahasa lain, tujuan dari Kurikulum 1994 adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan yang terjadi, agar kelak, dalam dunia pendidikan tercetak siswa-siswa yang memiliki pemikiran logis, memiliki kecermatan, jujur, efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar.

Dalam hal pencapaian tujuan, Pemerintah membuat kompetisi di mana dengan kompetisi tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa siswi tanah air. Kompetisi merupakan persaingan secara sehat antara siswa satu dengan yang lainnya agar dapat dilihat siswa mana yang paling memahami materi dan siswa mana yang masih kurang memahami materi. Kompetisi yang diberlakukan antara lain, kompetisi sesama daerah, nasional, bahkan internasional. Sangat besar manfaat dari sebuah kompetisi salah satunya adalah dalam kompetisi ini seluruh siswa akan mengerahkan kemampuannya untuk mencapai kemenangan dan akhirnya mengetahui kemampuannya dan kemampuan orang lain.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 serta mengkombinasikan dengan kurikulum 1975 dan dilaksanakan sesuai

dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU tersebut, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pada Kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi sembilan tahun (SD dan SMP). Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan Kurikulum 1984 dengan tujuan pendekatan proses. Di samping meniadakan mata pelajaran PSPB juga diperkenalkannya sistem kurikulum SMU yang dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan umum benar-benar sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi.

Ciri-Ciri Kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek Pendekatan.

Kurikulum 1994 menggunakan pendekatan isi/materi sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada diri anak didik. Siswa dianggap sukses bila menguasai seluruh matapelajaran. Hal ini sesuai dengan teori Tabularasa-nya John Locke.

2. Aspek Otoritas Pengembangan

Dalam Kurikulum 1994, pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80%. Sementara pihak daerah diberi kesempatan dengan porsi 20% untuk mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

3. Aspek Isi/Materi

Pada kurikulum 1994 materi yang diberikan terkesan overload, sehingga yang terjadi pengulangan-pengulangan materi. Bukan saja hal ini menyebabkan pemborosan waktu, tenaga dan pikiran, namun juga kebosanan/kejenuhan pada diri anak mencapai titik kulminasinya.

4. Aspek Pusat Proses Belajar Mengajar

Keberhasilan PBM dalam Kurikulum 1994 lebih banyak ditentukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan, sebab sejak awal posisi guru

berada pada satu-satunya sumber belajar. Keadaan seperti ini menjadikan anak didik pasif, menerima apa adanya kenyataan yang terjadi di dalam kelas.

5. Aspek Orientasi

Orientasi Kurikulum 1994 lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi, dalam raport diwujudkan dengan bentuk angka-angka. Bagi raport anak didik yang tertulis angka-angka tinggi dari hasil ujian dinyatakan sebagai anak yang berprestasi.

6. Aspek Penilaian.

Penilaian dilakukan dalam ulangan harian, ulangan catur wulan, serta EBTA dan EBTANAS. Ulangan harian dan catur wulan dilakukan oleh guru dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nilai dalam rapor dan kenaikan kelas, sedangkan EBTA dilakukan oleh sekolah untuk mata pelajaran yang tidak di-EBTANAS-kan. EBTANAS dikoordinasikan secara nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelulusan siswa. Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian dan pilihan ganda. Bentuk soal uraian biasa digunakan dalam ulangan harian, maksudnya agar siswa memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. Adapun bentuk soal pilihan ganda terutama digunakan dalam EBTANAS. Maksudnya adalah demi obyektivitas dalam memberikan penilaian. Dalam EBTANAS juga masih ada soal uraian, tetapi uraian terbatas.

7. Aspek Relasi

Nuansa pembelajaran dalam Kurikulum 1994 bersifat informatif, sebab sejak semula guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Metode didaktika yang sering tampak dipergunakan adalah ceramah, maka yang terjadi situasi monologis, guru lebih aktif memberikan materi dan siswa menjadi pasif lebih banyak mendengar.

8. Aspek Tahun Pembelajaran

Dalam Kurikulum 1994 menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam catur wulan. Maka dalam satu tahun ada tiga masa utama belajar aktif. Dengan implikasi masa ujian juga menjadi tiga kali (Tes Tahap Belajar Catur Wulan I, II dan III). Ini tidak lepas dari orientasi awal pembelajaran yang bersifat teoritis, mencurahkan materi/bahan sebanyak

mungkin pada siswa.

9. Aspek Hari Efektif

Pada Kurikulum 1994 anak didik wajib masuk kelas selama 6 hari / minggu dan menghabiskan 42 jam pelajaran. Hanya tersisa satu hari bagi anak didik untuk bersosialisasi dengan lingkungannya.

E. PENERAPAN KURIKULUM 1994 DI JENJANG SMA

Berkaitan dengan kurikulum SMA di tahun 1994, pada PP. No. 29 Tahun 1990, dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan menengah adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian (pasal 2:1). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya, dan alam sekitarnya (pasal2:2). Untuk mencapai tujuan di atas, penyelenggara pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

Dapat dipahami bahwa kurikulum sekolah menengah pada 1994 sangat fleksibel. Pendidikan menengah umum, misalnya, mengutamakan persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi (pasal 3:1). Sedangkan pendidikan menengah kejuruan mementingkan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Selanjutnya pada pasal 3:3 dinyatakan pula bahwa pendidikan menengah keagamaan mengutamakan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus mengenai ajaran agama yang bersangkutan.

Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan, kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Isi kurikulum tersebut wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran mengenai Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (pasal 15.2). Mata pelajaran lainnya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Dunia, Bahasa Inggris, Olahraga dan Pendidikan Kesehatan, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Pendidikan Seni, Bahasa Asing, Seni Budaya, Sistem Pemerintahan, dan Antropologi. Sementara mata pelajaran PSPB dihilangkan dari kurikulum.

Di samping itu, kurikulum sekolah menengah dapat menjabarkan dan me-

nambahkan mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan serta ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional (pasal 15:5). Sekolah menengah dapat menambah kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (pasal 16:6).

Kemudian penilaian sekolah menengah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka dalam memperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya serta sekolah menengah sebagai satuan keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan (PP. No. 29 Tahun 1990, pasal 19).

Selanjutnya bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada anak didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing (pasal 27:1 dan 2). Sementara pengawasan terhadap sekolah menengah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah menengah yang bersangkutan dilakukan oleh Pemerintah (pasal 30:1) dan pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta administrasi sekolah menengah tersebut (pasal 30:2).

Di samping itu susunan program dibagi menjadi dua, yaitu Program Kurikuler dan Program Ekstakurikuler, yang penjelasannya adalah:

1. Program Kurikuler:

Memuat jenis-jenis mata pelajaran dan disajikan dalam susunan program pengajaran kurikulum.

2. Program Ekstra Kurikuler:

Kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler serta berupa kegiatan yang lebih memantapkan pembentukan kepribadian seperti pramuka, usaha kesehatan sekolah, olahraga, palang merah, dan kesenian.

Nama SMA pun berganti menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum) dengan sistem penjurusan program Bahasa, IPA dan IPS dilakukan di Kelas II akhir. Penjurusan dilaksanakan di Kelas III karena beberapa pertim-

bangun :

- Secara empirik perguruan tinggi memilih calon mahasiswa yang memiliki penguasaan materi mata pelajaran SMU sebagai *learning-tools* secara memadai yang dapat ditranfer untuk menempuh pendidikan di pendidikan tinggi;
- Yang termasuk *learning-tools* adalah mata-mata pelajaran Sains, Matematika, dan Bahasa serta mata pelajaran lain yang menanamkan cara berfikir saintifik;
- Guna memperkuat bekal untuk memasuki perguruan tinggi, maka bilamana siswa SMU hanya diberi kesempatan satu tahun untuk mengikuti mata-mata pelajaran sebagaimana butir (2), tidaklah mencukupi, sehingga sebagian besar kesempatan atau peluang memasuki perguruan tinggi akan direbut oleh para siswa dari jurusan IPA atau jurusan Matematika;
- Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan yang memadai bagi semua siswa SMU untuk memperoleh bekal sebagaimana butir (2) dalam kurun waktu dua tahun, yaitu di kelas I dan II SMU. Dengan demikian maka penjurusan SMU diadakan di kelas III. Jurusan dalam kurikulum 1994 disebut Progam.

Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan program atau jurusan di SMU, antara lain adalah:

- Kebutuhan perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa terutama periode seleksi mahasiswa sampai dengan tahun 1990-an;
- Seleksi masuk perguruan tinggi dalam masa tersebut butir 1 berfokus pada tiga kelompok penguasaan materi, yaitu; (a) penguasaan materi terkait dengan bahasa dan sastra; (b) penguasaan terkait dengan sains dan matematika dan (c) penguasaan materi terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Dengan catatan, setiap siswa SMU sudah memperoleh bekal sains dan matematika secara memadai di kelas I dan kelas II.

Tabel 4.1. Struktur Program Sekolah Menengah Umum Kelas I dan II

No	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran	
		Kelas 1	Kelas 2
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2
2	Pendidikan Agama	2	2
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	5	5
4	Sejarah Nasional dan Dunia	2	2

No	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran	
		Kelas 1	Kelas 2
5	Bahasa Inggris	4	4
6	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	2	2
7	Matematika	6	8
	IPA		
8	Fisika	5	5
9	Biologi	4	4
10	Kimia	3	3
	ILMU-ILMU SOSIAL		
11	Ekonomi	3	3
12	Sosiologi	-	2
13	Geografi	2	-
14	PENDIDIKAN SENI	2	-
	TOTAL	42	42

Sebagaimana nampak dalam tabel di atas, untuk membekali peserta didik dengan *learning tools* yang dipersyaratkan untuk memasuki perguruan tinggi, mata pelajaran Bahasa Indonesia mendapat waktu belajar 5 jam pelajaran per-minggu di Kelas I dan 5 jam pelajaran di Kelas II. Mata pelajaran Bahasa Inggris juga mendapatkan masing-masing 4 jam pelajaran per-minggu di Kelas I dan Kelas II. Mata pelajaran Matematika diberikan 6 jam pelajaran per-minggu di Kelas I dan 8 jam pelajaran per minggu di Kelas II. Demikian pula, mata pelajaran dalam kelompok IPA, yaitu Fisika diberikan 5 jam pelajaran per-minggu selama di Kelas I dan II. Mata pelajaran Biologi diberikan 4 jam pelajaran per-minggu di Kelas I dan II. Mata pelajaran kimia diberikan 3 jam pelajaran per-minggu di Kelas I dan II. Satu jam pelajaran = 45 menit.

Tabel 4.2. Struktur Program Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas III (Program Bahasa)

NO	MATA PELAJARAN	KELAS III
		JUMLAH JAM PELAJARAN
	UMUM	
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	Pendidikan Agama	2
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4	Sejarah Nasional dan Dunia	2
5	Bahasa Inggris	5
6	Olahraga dan Kesehatan	2*)
	KHUSUS	
7	Bahasa dan Sastra Indonesia	8
8	Bahasa Inggris	6
9	Bahasa Asing Lain	9**)
10	Seni Budaya	5
	TOTAL	42

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

**) Sekolah menentukan jenis bahasa asing lain yang diajarkan di sekolah yang bersangkutan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Siswa memilih mata pelajaran bahasa asing lain yang ditawarkan sekolah. Program Bahasa mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bahasa dan budaya, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

Tabel 4.3. Struktur Program Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas III (Program IPA)

NO	MATA PELAJARAN	KELAS III
		JUMLAH JAM PELAJARAN
	UMUM	
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	Pendidikan Agama	2
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4	Sejarah Nasional dan Dunia	2
5	Bahasa Inggris	5
6	Olahraga dan Kesehatan	2*)
	KHUSUS	
7	Fisika	7
8	Biologi	7
9	Matematika	8

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Program Ilmu Pengathuan Alam (IPA) mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam baik dalam bidang akademik maupun pendidikan profesional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung maupun tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

Tabel 4.4. Struktur Program Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas III (Program Ilmu-Ilmu Sosial)

NO	MATA PELAJARAN	KELAS III
		JUMLAH JAM PELAJARAN
	UMUM	
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	Pendidikan Agama	3
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	2
4	Sejarah Nasional dan Dunia	5
5	Bahasa Inggris	2
6	Olahraga dan Kesehatan	2*)
	KHUSUS	
7	Ekonomi	10
8	Sosiologi	6
9	Sistem Pemerintahan	6
10	Antropologi	6

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Program ini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun profesional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

Dalam kurikulum SMU 1994 terdapat program pelajaran umum dan program pelajaran khusus. Pelajaran umum untuk Kelas I dan II serta pelajaran khusus untuk Kelas III. Kedudukan IPS dalam kurikulum ini memiliki dua pengertian yaitu sebagai bagian dari program khusus dan sebagai

bahan kajian pada program pelajaran umum. IPS sebagai program khusus diarahkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Ruang lingkup kajian IPS meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat setempat, uang, tabungan, pajak, ekonomi setempat, wilayah propinsi, wilayah kepulauan dan pengenalan kawasan dunia. Sedangkan ruang lingkup pengajaran sejarah meliputi: sejarah lokal, kerajaan di Indonesia, tokoh dan peristiwa, bangunan sejarah, Indonesia pada zaman penjajahan dan beberapa peristiwa penting masa kemerdekaan. Untuk mata pelajaran sejarah di Kelas I dan II SMA masing-masing memiliki intensitas pertemuan 2 jam perminggu. Sedangkan penjurusan di K III untuk semua program jurusan baik Bahasa, IPA, maupun IPS, Sejarah merupakan mata pelajaran kategori umum yang intensitas pertemuannya 2 jam per minggu.

F. METODE PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 1994 SMU

1. Fokus Pada Kegiatan Pembelajaran yang Menyenangkan

Ada berbagai metode pembelajaran yang diterapkan kepada siswa agar proses belajar-mengajar menjadi hal yang menyenangkan. Beberapa metode pembelajarannya antara lain:

- *Field Trip* ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, peternakan, perkebunan, lapangan bermain dan sebagainya (Roestiyah, 2001:85). (Winarno, 1980: 115-116) mengatakan bahwa metode karyawisata atau field trip adalah metode belajar dan mengajar di mana siswa dengan bimbingan guru diajak untuk mengunjungi tempat tertentu dengan maksud untuk belajar.
- Sosio drama adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Menonton film, film sebagai alat audio visual untuk pelajaran, penerangan, atau penyuluhan. Banyak hal-hal yang dapat dijelaskan melalui film, antara lain tentang proses yang terjadi dalam tubuh kita atau yang terjadi dalam suatu industri, kejadian-kejadian dalam alam, tata cara kehidupan di negara asing, berbagai industri dan pertambangan, menga-

jarkan suatu ketrampilan, sejarah kehidupan orang-orang besar dan sebagainya.

- Diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah, yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.
- Observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Observasi juga merupakan basis sains yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau instrument sebagai alat bantu penginderaan.
- Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini akan berjalan baik apabila materi dipersiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas penggunaannya.
- Resitasi (penugasan) suatu cara dari guru dalam proses belajar mengajar untuk mengaktifkan siswa dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah dan untuk dipertanggung jawabkan kepada guru.
- Wawancara di mana guru mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada seluruh murid di kelas. Ada dua macam langkah yang dapat diterapkan oleh guru dalam melaksanakan metode interview, yakni yang pertama langkah yang bersifat individual dan kedua langkah yang bersifat kelompok.
- Games adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif

2. Tantangan Kurikulum 1994

Dalam sebuah kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, tentu ada tantangan yang dihadapi. Begitu pula pada pelaksanaan Kurikulum 1984. Beberapa tantangannya adalah:

1. Jumlah mata pelajaran dan materi/substansi setiap mata pelajaran dianggap masih banyak. Pada kurikulum ini bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal.

2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Antara pendekatan proses perpaduan tujuan dan proses belum berhasil.

Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu:

- Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
- Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
- Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah.
- Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.

3. Kelebihan Kurikulum 1994

Disamping banyaknya kelemahan dalam pemberlakuan kurikulum 1994 saat itu, bukan berarti bahwa kurikulum 1994 tidak memiliki kelebihan. Ada beberapa kelebihan dalam pemberlakuan kurikulum tersebut, antara lain :

- Siswa lebih banyak mendapatkan informasi karena materi yang diberikan lebih banyak.

- Siswa memiliki keterampilan di bidang non akademis melalui muatan lokal.

G. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem pendidikan pada era Orde Baru sebenarnya mengadopsi ajaran dari Ki Hadjar Dewantara (Makmuri Sukarno, 2008: 113). Pendiri Taman Siswa ini merumuskan Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Umum, dan Pendidikan Khusus. Pemerintah Orde Baru mengikuti rumusan pendidikan hasil pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini dengan nama "Tiga Jalur Sistem Pendidikan Nasional" yang ditetapkan melalui Undang-Undang Tahun 1982.

Meskipun demikian, ada perbedaan jelas antara sistem pendidikan Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara dengan konsep "Tiga Jalur Sistem Pendidikan Nasional" versi pemerintah Orde Baru. Jika Ki Hadjar Dewantara menempatkan Pendidikan Kemasyarakatan sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional pada saat itu, Pemerintah Orde Baru mereduksi Pendidikan Kemasyarakatan hanya menjadi sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan nasional (Sarino Mangoenpranoto, 1984: 102).

Pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan dua jalur lainnya dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu Pendidikan Umum dan Pendidikan Khusus. Jalur Pendidikan Umum merupakan jalur pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar (dari SD hingga SMP atau yang sederajat), jenjang pendidikan menengah (dari SMP hingga SMA atau yang sederajat), dan jenjang pendidikan tinggi (universitas). Sedangkan Pendidikan Khusus adalah jalur pendidikan yang dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan kerja. Jalur ini dikenal juga dengan nama pendidikan kejuruan dan dilaksanakan pada tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, hingga tingkat tinggi dengan berbagai kemungkinan variasi dan orientasi. Pendidikan kejuruan diarahkan antara lain kepada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumahtanggaan, pelayanan jasa, dan lain-lain.

Selain itu bentuk kebijakan pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan makro, seperti pembangunan dan ekonomi. Karenanya jumlah dan jenis pendidikan kejuruan, keahlian dan ketrampilan ditanamkan/diperkenalkan sejak SD sampai perguruan tinggi. Intinya, lulusan pendidikan zaman Orde Baru dituntut untuk bisa kerja (M. Rifai, 2011: 256). Sistem pendidi-

kan di era Orde Baru cenderung bersifat terpusat atau sentralisasi karena ukuran yang dipakai untuk menentukan relevansi pendidikan pada masa itu adalah suatu ukuran abstrak yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan seragam. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan EBTANAS, UMPTN, dan sejenisnya, yang digunakan untuk menyeleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Artinya, pendidikan pada era Orde Baru lebih mementingkan target daripada memperhatikan proses dan kualitas pengajaran serta hasil didikan dari sistem yang telah diterapkan.

Terlepas dari persoalan di atas, pendidikan nasional pada era Orde Baru lebih stabil sebagai dampak dari stabilitas politik yang terjadi saat itu. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi juga tidak pernah berganti nama selama masa pemerintahan Orde Baru. Sementara pada masa pemerintahan Orde Lama pimpinan Soekarno (1945-1966), terjadi perubahan nama sebanyak empat kali. Pertama: Kementerian Pengajaran. Kedua: Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ketiga: Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Keempat: dibentuk tiga badan yang mengurus pendidikan, yaitu Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Departemen Olahraga.

Jumlah Menteri Pendidikan di zaman Orde baru tidak sebanyak Menteri Pendidikan era Orde Lama, sampai 14 orang. Menteri Pendidikan era Orde Baru ada 10 orang yang nama-namanya sebagai berikut:

- Sarino Mangunpranoto (Kabinet Ampera I), 25 Juli 1966-17 Oktober 1967
- Sanusi Hardjadinata (Kabinet Ampera II), 11 Oktober 1967-1968
- Mashuri, SH (Kabinet Pembangunan I), 6 Juni 1968-28 Maret 1973
- Prof. Dr. Sjarief Thajeb (Kabinet Pembangunan II), 28 Maret 1973- 29 Maret 1978
- Dr. Daoed Joesoef (Kabinet Pembangunan III), 29 Maret 1978- 1 Maret 1983
- Prof. Dr. Nugroho Notokusanto (Kabinet Pembangunan IV), 19 Maret 1983- 3 Juni 1985
- Prof. Dr. Fuad Hasan (Kabinet Pembangunan IV), 30 Juli 1985-21 Maret 1988

- Prof. Dr. Fuad Hasan (Kabinet Pembangunan V), 21 Maret 1988-17 Maret 1993
- Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro (Kabinet Pembangunan VI), 17 Maret 1993 – 16 Maret 1998
- Prof.Ir. Wiranto Arismunandar (Kabinet Pembangunan VII), 16 Maret 1998-21 Mei 1998



Bab V

SMA DI ERA REFORMASI

Hal terpenting dalam era reformasi adalah terjadinya proses otonomi daerah yang berdampak pada pengelolaan sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan kini berada di tangan daerah sesuai kewenangannya. Dampaknya cukup luas dalam implementasi di tingkat sekolah.

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah negara, kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial selalu disesuaikan dengan rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Termasuk, kebijakan di bidang pendidikan. Setelah rezim order baru berakhir pada tahun 1998, maka dimulailah suatu zaman perubahan (reformasi) yang turut mengubah tatanan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada zaman reformasi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menetapkan kebijakan otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Di sini peran daerah dimunculkan dan tidak tergantung kepada pusat.

Kemudian pada pemerintahan Presiden Aburrahman Wahid, keluar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini kebijakan, termasuk di bidang pendidikan tidak lagi berada di tangan pusat tetapi berada di daerah sebagai eksekutor kebijakan di tingkat lokal. Di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 1999-2004), juga diungkapkan bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistik sangat sentralistis sehingga menutup dinamika demokratisasi pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis, biasanya menyebabkan dan melahirkan kebijakan yang seragam sehingga dia tidak mewadahi perbedaan atau heterogenitas kepentingan setiap daerah, sekolah dan peserta didik yang pada akhirnya menghasilkan partisipasi masyarakat yang rendah.

Tak hanya itu saja. Pemerintah kala itu melihat pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan serta (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian serta keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI) dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Karenanya Pemerintah berupaya mengatasi sejumlah permasalahan di atas dengan memformulasikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1999-2004), yaitu sebagai beri-

kut:

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.
- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Khusus mengenai program pembinaan pendidikan menengah, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, menargetkan sasaran sampai dengan akhir tahun 2004, meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA. Caranya, melakukan kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan menengah, melalui:

- Membangun sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, potensi daerah, pemetaan sekolah, kondisi geografis, serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta.
- Menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan
- Memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional.
- Memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, seperti dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.

Sementara kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah:

- Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang tertentu yang ditinjau dan dievaluasi secara periodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karier guru
- Menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender sesuai dengan kapasitas peserta didik, serta menekankan perlunya peningkatan keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, kesehatan jasmani, kepribadian yang berakhlak mulia, beretos kerja, memahami hak dan kewajiban, serta meningkatkan penguasaan ilmu-ilmu dasar (Matematika, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ilmu Sosial, dan Bahasa Inggris)

- Meningkatkan standar mutu nasional secara bertahap agar lulusan pendidikan menengah mampu bersaing dengan lulusan pendidikan menengah di negara-negara lain.
- Menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga kerja.
- Mengembangkan lomba karya ilmiah dan sejenisnya yang disesuaikan dengan standar yang dipakai di dunia pendidikan internasional.
- Melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan dalam mengembangkan perencanaan, pengembangan materi pelajaran, implementasi kegiatan, dan penilaian program pengajaran.
- Mengembangkan program-program keterampilan/kejuruan pada SMU dan MA yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU dan MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja.
- Meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga, perpustakaan, dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sehingga peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah, pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Sementara kegiatan pokok dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan menengah adalah:

- Melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan antara lain dengan pembentukan dan peningkatan peranan Komite Sekolah

meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah.

- Mengembangkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah.
- Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
- Mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
- Memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
- Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan, yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan.
- Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

B. PRAKTEK PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Dalam prakteknya di sekolah, pendidikan di era reformasi lebih menekankan pada penggunaan strategi-strategi belajar yang lebih bervariasi dan komunikatif. Strategi yang lebih sering digunakan adalah dalam bentuk Problem Based Learning, Problem solving, experiential learning dan expository learning. Pengertian masing-masing pendekatannya adalah sebagai berikut:

- Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mem-

berikan kondisi belajar aktif kepada siswa Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.

- Problem solving yakni model pemecahan masalah atau strategi belajar di mana siswa dihadapkan pada masalah tertentu kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu siswa mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga dan selanjutnya menemukan solusi. Jadi dalam strategi ini siswa dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam pembelajaran kemudian berupaya mencari solusi untuk masalah tersebut, sehingga terjadi proses pembelajaran kritis dan kreatif.
- Pembelajaran experiential learning (pembelajaran pengalaman). Pembelajaran berdasarkan pengalaman akan membawa siswa langsung menghadapi masalah dan memecahkan masalah tersebut.
- Expository learning yakni Model Pembelajaran Ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penjelasan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun. Atau, menurut Istarani (2012:174), strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal.
- Selanjutnya, praktek pendidikan yang ada pada era reformasi adalah dibentuknya Komite Sekolah dan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan amanat rakyat seperti telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004).

C. PENGELOLAAN SEKOLAH

Sebagai akibat dari UU Pemerintahan Daerah dan UU Sistem Pendidikan Nasional, pembinaan sekolah diserahkan ke daerah. Pengelolaan seluruh pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk pendidikan khusus dan layanan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Kebijakan penerapan pendidikan berbasis standar makin menguat di era

ini dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini kemudian diikuti dengan aturan teknis berupa standar-standar lain yang dikeluarkan dalam bentuk Permendiknas di Tahun 2006 berupa Standar Isi (No 22/2006), Kompetensi Lulusan (No. 23/2006), Pendidik dan tenaga kependidikan (No. 16/2007), Pengelolaan (No. 19/2007), Penilaian (No. 20/2007), Proses (No. 41/2007), dan Sarana Prasarana (No. 24/2007). Hanya standar pembiayaan yang tidak dalam bentuk Permendiknas, melainkan dalam bentuk PP No. 48 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pendidikan.

Standar-standar ini menjadi dasar dalam penerapan dalam kebijakan kurikulum berbasis kompetensi yang implementasinya dilakukan dengan penyusunan kurikulum secara variasi sesuai dengan kekhasannya satuan pendidikan sendiri, sepanjang mengacu pada standar yang ditetapkan. Kurikulum khas inilah yang kemudian dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Spirit kurikulum ini adalah bagaimana satuan pendidikan dalam merancang kurikulum dengan mempertimbangkan konteksnya masing-masing, sepanjang mengacu pada kompetensi yang disyaratkan. Di era inilah basis kompetensi dalam kebijakan kurikulum makin menguat.

Selain itu, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan juga makin dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Makin jelas di sini, bagaimana pengelolaan pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah.

Salah satu hal yang diatur secara tegas di sini adalah mengenai Komite Sekolah. Posisi Komite Sekolah di Sekolah Negeri adalah salah satu organ sekolah selain kepala sekolah.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Komite sekolah hadir dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Yang tak kalah penting, Komite juga menjalankan fungsinya dalam memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri

dan profesional.

Adanya manajemen berbasis sekolah juga akan membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan lebih baik. Sekolah dapat menentukan kebijakan di sekolahnya, tidak lagi menunggu aturan dari pusat, namun tetap dalam kontrol dari pemerintah. Hal ini yang dimaknai sebagai konteks sekolah.

D. KEBIJAKAN KURIKULUM

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Latar Belakang

Dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia juga membawa perubahan pada kurikulum dalam bentuk penyempurnaan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan diarahkan agar siswa menjadi lebih manusiawi, lebih dewasa dan memiliki keahlian serta pengetahuan yang lebih. Melalui serangkaian pemikiran dan diskusi dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, lahirlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Lahirnya KBK seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan, diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah, di antaranya lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta lahirnya Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan di Masa Depan. Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut pemerintah memprogramkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pendidikan.

Karakteristik

KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki karakteristik utama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2002) telah menetapkan karakteristik dengan lebih rinci yaitu:

- a. Menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara

individual maupun klasikal. Ini mengandung pengertian bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan kepada ketercapaian kompetensi.

- b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Ini artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang selanjutnya dijadikan acuan apakah kompetensi yang diharapkan sudah tercapai atau belum. Proses pencapaian hasil belajar itu tentu saja sangat tergantung pada kemampuan siswa. Sebab diyakini, siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda. KBK memberikan peluang yang sama kepada seluruh siswa untuk dapat mencapai hasil belajar.
- c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Artinya, sesuai dengan keberagaman siswa, maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran harus bersifat multimetode.
- d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi.
- e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Artinya, keberhasilan pembelajaran KBK tidak hanya diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai isi atau materi pelajaran, akan tetapi juga bagaimana cara mereka menguasai pelajaran tersebut.

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki tujuan memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan pada umumnya. Serta Memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah yang berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya. Inovasi dan improvisasi didorong tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh guru yang berorientasi pada pengembangan potensi siswa.

Menurut DR Suharto, pendidik yang pernah menjadi kepala sekolah

di SMA Negeri di Jakarta, pembelajaran dalam KBK, sebenarnya memiliki tujuan yang ideal di mana siswa dituntut yang lebih aktif dan proses belajar tidak terbatas di kelas melainkan dapat dilakukan di mana saja. Murid tidak hanya mampu menghafal pelajaran saja tapi juga harus mengetahui prosesnya.

Begitu juga dengan tugas pendidik, termasuk guru di jenjang SMA, dituntut lebih kreatif serta trampil secara menyeluruh. Seorang guru ideal di SMA, harus mampu membuat silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), merancang dengan tepat tuntutan kompetensi yang harus dipenuhi oleh siswa. Serta mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif melalui penyampaian materi dengan baik.

Pada masa penerapan KBK (2004), nama SMU berganti menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas) kembali dengan sistem penjurusan dilakukan di kelas II, terdiri atas Ilmu Alam, Sosial dan Bahasa. Selain itu ada kebijakan baru menyangkut pola pembelajaran di kelas, yaitu konsep akselerasi. Melalui kebijakan ini sekolah diberikan kewenangan membuka kelas akselerasi (program percepatan) untuk menampung siswa yang memiliki kecerdasan akademik lebih, agar mereka mampu menyelesaikan kegiatan belajar mengajar lebih cepat dibandingkan siswa lainnya. Namun kebijakan ini tidak berlanjut karena ada beberapa pertimbangan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam perjalanannya tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama dua tahun saja karena pada awal 2006, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengeluarkan kurikulum baru bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Latar Belakang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penguatan dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Artinya, basis kurikulumnya tetap merupakan basis kompetensi hanya terdapat penguatan dan pengembangan dalam beberapa titik. Titik berat pengembangan ada pada upaya desentralisasi sistem pendidikan. Artinya pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Dengan demikian masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah) berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungannya tetapi tetap sesuai dengan rambu - rambu pemerintahan pusat. Sehingga konteks lokal di mana satuan pendidikan berada menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam proses pembelajaran. Bahkan, secara tersurat dimunculkan yang namanya muatan lokal (mulok) sekolah, yang bisa berbentuk mata pelajaran, konten, atau proses belajar yang disesuaikan dengan adat kondisi serta istiadat daerahnya.

Karakteristik

KTSP sebagai sebuah kurikulum memiliki karakteristik utama yaitu

- a. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat, mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.
- b. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan dalam merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
- c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan proses "bottom up" secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.
- d. Semua pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan.

Tujuan

Tujuan penerapan KTSP di jenjang pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan selanjutnya.

Mengacu pada undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, KTSP dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan IPTEK
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Komprehensif dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat (life long education)
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

3. Kurikulum 2013

Latar Belakang

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan mulai tahun 2013 dan merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum ini aspek soft skills dan hard skills lebih ditekankan kepada peserta didik bertujuan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan peserta didik (Fadhilah, 2014 :16-17)

Secara spesifik tujuan dan fungsi kurikulum 2013 mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa fungsi kurikulum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya Kurikulum 2013 (K-2013) merupakan pengembangan dari KBK di mana Kompetensi yang menjadi basis kebijakan kurikulum merupakan kompetensi yang merupakan praktis kontekstual. Dengan demikian, banyak yang beranggapan, K-13 merupakan pengertian baru dalam Kurikulum.

Di sisi lain, K-13 juga meruakan perluasan dari konsep kurikulum

sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati (antar pelaku pendidikan) kegiatan-kegiatan yang diperlukan (sebagai bagian dari proses pembelajaran) untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan (*continuous action-reflection*). Di sini juga peran guru sangat penting dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan, serta perlunya tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang kontekstual dengan sekitarnya untuk memastikan praksisnya relevan.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan soft skills dan hard skills melalui kemampuan sikap, ketrampilan dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
- b. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
- c. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar, karena pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.
- d. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang untuk menjaga kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
- e. Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik dan potensi daerah.

Prinsip Kurikulum 2013

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Per-

mendikbud) Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, prinsip-prinsip kurikulum 2013 harus mengandung muatan:

- a. Peningkatan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.
- b. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan.
- c. Peningkatan Potensi, Kecerdasan dan Minat.
- d. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan.
- e. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional.
- f. Tuntutan Daerah Kerja.
- g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum K-2013 secara umum dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Wajib (Wajib A dan B)
- b. Peminatan, dan
- c. Lintas Minat.

Dalam perkembangannya kebijakan implementasi K-2013 menimbulkan pro-kontra dengan berbagai alasan. Sehingga Kurikulum yang digagas di era Menteri Muhammad Nuh ini mengalami berbagai penyesuaian di era menteri Anis Baswedan. Bahkan pada era ini, peraturan tentang standar pun tak luput dari perubahan sehingga berdampak perubahan pada langkah teknis di bawahnya. Sekolah memerlukan penyesuaian kembali dengan perubahan kebijakan ini. Kini implementasi Kurikulum 2013 terus diperluas, dan tahun 2018 diproyeksikan seluruh sekolah sudah menerapkan kebijakan kurikulum tersebut.

Perkembangan Kurikulum di Indonesia



Gambar 5.1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

E. MENDIKBUD DI ERA REFORMASI HINGGA KINI

Perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk Kebijakan di bidang kurikulum tak lepas dari sosok Menteri Pendidikan yang menjabat ketika itu. Berikut Menteri Pendidikan di era Reformasi (1998-2014), hingga kini.

1. Yuwono Soedarsono (Kabinet Reformasi Pembangunan), 23 Mei 1998-20 Oktober 1999
2. Yahya Muhaimim (Kabinet Persatuan Nasional), 26 Oktober 1999- 23 Juli 2001;
3. Abdul Malik Fadjar (Kabinet Gotong Royong), 10 Agustus 2001-20 Oktober 2004
4. Bambang Sudibyo (Kabinet Indonesia Bersatu), 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009
5. Mohammad Nuh (Kabinet Indonesia Bersatu II), 22 Oktober 2009-20

Oktober 2014;

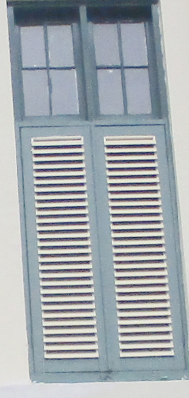
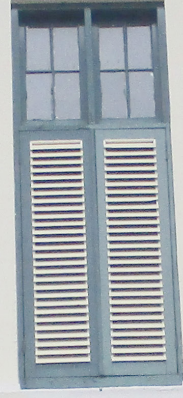
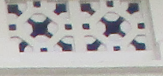
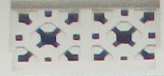
6. Anies Baswedan (Kabinet Kerja), 27 Oktober 2014 - 27 Juli 2016
7. Muhadjir Effendi (Kabinet Kerja), 27 Juli 2016 - sekarang

F. DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Secara nasional, pengelolaan SMA di dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh bagian yang memiliki nama berubah-ubah sejalan dengan perubahan landasan hukum yang mendasarinya. Sebelum lahirnya UU No 20 Tahun 2003, Pembinaan SMA dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum), di mana pengelolaan dan pembinaan SMA masih menyatu dengan SMP.

Sejalan dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, pengelolaan dan pembinaan SMA di tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA (Dit. PSMA). Direktorat Pembinaan SMA berkantor di Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta, berbeda dengan sebagian besar kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Senayan. Sejak bernama Direktorat Pembinaan SMA, telah beberapa orang menjadi Direktur Pembinaan SMA, yakni:

- Zamroni (2001 (sejak masih bernama Dikmenum)-2005)
- Sungkowo Mujiawanu (2005-2010)
- Totok Suprajitno (2011-2012)
- Harris Iskandar (2012-2015)
- Purwadi Sutanto, (2015 - sekarang) □



Bab VI

SEKOLAH-SEKOLAH BERSEJARAH

Di antara sekolah-sekolah tua kini telah menjelma menjadi sekolah SMA terkemuka di berbagai daerah. Berikut kondisi mereka secara singkat saat ini.

Sekolah-sekolah tua, yang merupakan kelanjutan dari sekolah-sekolah yang lahir sejak zaman kolonial, kini telah bermetamorfosa menjadi sekolah-sekolah yang di-favoritkan oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak SMA yang usianya lebih dari setengah abad. Sekolah-sekolah itu, terutama berada di kota-kota besar.

Pada awalnya sekolah itu bermula di Jawa. Kemudian menyebar ke seantero negeri. Akan sangat bermakna bagi kita apabila dapat menelusuri kembali sekolah-sekolah itu dan kondisinya kini. Terdapat fenomena yang menarik di mana sekolah-sekolah itu banyak yang berasal dari proses penerangan sekolah-sekolah yang dibangun masyarakat. Tidak sedikit pula



Foto tua SMA Negeri Mataram

sekolah-sekolah swasta yang tempo hari berjaya, kini kondisinya makin sulit dihimpit oleh sekolah-sekolah baru.

Sekolah-sekolah tua pun ada yang justru berada tidak di kota besar, melainkan di kota kecil. Seperti di Bengkulu, yang tertua ternyata berada di Kota Rejang Lebong. Hal ini dapat dipahami mengingat Bengkulu adalah provinsi pemekaran dari Sumatera Selatan. Demikian pula sekolah tertua di wilayah nusa tenggara, justru berada di Singaraja, Bali. Sayangnya tidak semua sekolah tua itu terliput dalam buku kali ini. Hal ini dikarenakan buku ini disajikan bukan sebagai buku sejarah yang disusun dengan metodologi sejarah, melainkan disusun dari proses peliputan dengan metoda jurnalistik.

Di mana sana sekolah-sekolah itu, bagaimana kondisinya sekarang?

Untuk memotret kondisi sekolah-sekolah tua itu, maka dalam buku ini disajikan beberapa profil SMA tua di berbagai daerah. Tentu tidak semua sekolah tua, bisa ditampilkan dalam buku ini karena berbagai keterbatasan. Akan tetapi paling tidak dapat memberi gambaran bagaimana perjalanan sekolah SMA di seluruh Tanah Air. Ke depan, profil sekolah ini akan terus dilengkapi dan diperbaiki guna melihat perjalanan SMA dari masa ke masa.

Berikut ini profil yang disajikan adalah sekolah-sekolah yang berusia



Siswa dan guru berpose di depan asrama pelajar SMA di Samarinda

lebih 50 tahun sejak sekolah resmi berdiri. Ada juga yang belum genap setenagh abad, tapi memiliki keunikan pendiriannya. Yang menjadi rujukan waktu pendirian adalah resmi berdiri sejak zaman kemerdekaan. Namun, beberapa profil sekolah disajikan sejak aktivitas sekolah dimulai sebelumnya. Hal ini terutama untuk melihat perkembangan SMA dari masa ke masa, sejak zaman kolonial hingga kini. □

BERAWAL DARI SEKOLAH DI ZAMAN KOLONIAL

SMAN 3 yang kini berada di Yogyakarta, adalah sekolah tua yang hadir mengikuti perkembangan zaman. Banyak julukan pada sekolah ini. Juga alumnusnya yang tercatat sebagai para pemimpin bangsa.

SMA Negeri 3 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas tertua di Yogyakarta. Sekolah ini awalnya adalah AMS (*Algemeene Middelbare School*) afdeling B pertama yang dibuka pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada 5 Juli 1919. Saat itu, sekolah ini hanya diisi oleh mereka dari golongan elite pribumi.

AMS afd. B berganti nama menjadi SMT (Sekolah Menengah Tinggi) bagian A dan bagian B pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942. Saat awal AMS afdeling B dibuka, orang Indonesia pertama yang mendapat kepercayaan untuk menjadi direktur (kepala sekolah) adalah RJ. Katamsi, lulusan *Academie voor Beeldende Kunsten* (Akademi Seni Rupa) di Den Haag dan mendapat ijazah *Middelbaar Onderwijs* dalam menggambar (MO Tekenan), yang kira-kira sama dengan ijazah B-II Seni Rupa di Indonesia. Jabatan sebagai direktur AMS/ B tersebut diteruskan sampai Zaman Jepang yang sekolahnya berganti nama menjadi Sekolah Menengah Tinggi (SMT).

Pada 19 September 1942, didukung oleh Kepala Sekolah saat itu, berdiri organisasi pelajar sekolah ini yang diberi nama Padmanaba. Padma dalam bahasa Sanskerta berarti teratai merah atau dalam Bahasa Latin adalah *Nelumbium speciosum*, yang melambangkan keberanian, kesucian, dan kemajuan. Pada masa itu, sekolah ini juga biasa dikenal dengan nama SMT Kotabaru. Hingga sekarang, setiap tanggal 19 September selalu diperingati sebagai Hari Lahir Padmanaba dengan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh para peserta didik aktif, alumni, guru dan karyawan serta segenap keluarga besar Padmanaba yang dikenal sebagai Pekan



Bangunan lama SMAN 3 Yogyakarta yang masih dipertahankan.

Peringatan Hari Padmanaba (PPHP).

Tahun 1948, lokasi proses belajar mengajar berada di dua tempat, yaitu SMA A di Jalan Pakem 2 dan SMA B di Jalan Taman Krida 7. Pada tanggal 21 Desember 1948, sekolah ini diduduki Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada 6 Juni 1949, SMA B berhasil dibuka kembali dengan pendidikan yang lebih berkualitas. Sekolah ini juga mengalami beberapa kali perubahan nama, dimulai pada tahun 1956, SMA ini berubah nama menjadi SMA IIIB dan berubah lagi menjadi SMA Negeri III pada tahun 1964. Dengan diberlakukannya Kurikulum 1994, sekolah ini bernama SMU (Sekolah Menengah Umum) Negeri III Yogyakarta, tetapi sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mulai tahun 2004, diubah lagi menjadi SMA Negeri III Yogyakarta. Walaupun demikian, masyarakat luas sampai sekarang masih mengenalnya sebagai "SMA Padmanaba" atau "SMA 3 Bhe".

Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri III Yogyakarta berlangsung baik, karena didukung dengan sarana serta prasarana yang lengkap. Di atas lahan seluas 21.540 m² dan bangunan seluas 7.105 m², terdapat berbagai sarana fisik, mulai dari lapangan olahraga seluas 10.835 m², sarana ibadah, halaman dan taman seluas 3.700 m² serta sarana penunjang kegiatan belajar lainnya seperti LCD Projector dalam setiap ruang belajar, peralatan laboratorium, fasilitas Internet dan hotspot area.



Para pendidik di depan bangunan bersejarah.

Beriring dengan berjalannya waktu, sekolah dengan akreditasi A, terus menorehkan prestasi, baik di nasional, maupun internasional. Sekolah ini dikenal pula banyak meluluskan alumninya yang kemudian menempati posisi strategis di tanah air. Di antaranya adalah: Radius Prawiro (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1988-1993, Menteri Keuangan 1988-1993, Menteri Perdagangan 1983-1988, Menteri Perdagangan 1973-1983, dan Gubernur Bank Indonesia 1966-1968), Soesilo Soedarman (Duta Besar Republik Indonesia untuk

Amerika Serikat 1986-1988, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 1988-1993, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan 1993-1998 serta Soemantri Brodjonegoro (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1967-1973, Menteri Pendidikan Nasional 1973, dan Rektor Universitas Indonesia 1964-1973), Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olah Raga 2013-2014), dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya.

SMA Negeri 3 Yogyakarta ditunjuk sebagai SMA Rujukan pada tahun 2016. Semenjak ditunjuk sebagai SMA Rujukan sekolah ini semakin meningkatkan prestasinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar terus ditingkatkan. Sebagai sekolah rujukan tentu sekolah ini banyak memiliki program unggulan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, diantaranya mengadakan stadium general dari alumni yang sudah berhasil, berbagai kegiatan penguatan karakter, kegiatan literasi dan tentu saja peningkatan dari aspek religius. Sebagai sekolah rujukan sekaligus sekolah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, sekolah ini tetap mempertahankan budaya-budaya jawa dalam berbagai kegiatan kesiswaan. □

MEMBENTUK KARAKTER KEWIRAUSAHAAN SISWA

Gedung HBS Surabaya yang dibangun pada tahun 1923 adalah cikal bakal SMA Negeri 1 Surabaya saat ini. Di usia tua, sekolah terus mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan belajar mengajar berbasis IT dan penekanan kepada pendidikan karakter kewirausahaan sebagai persiapan siswa menghadapi persaingan.

SMA Negeri 1 Surabaya yang populer disebut Smasabaya merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di pusat kota Surabaya. Lokasinya yang beralamat di Jl Wijaya Kusuma 48, berada dalam satu kompleks dengan SMA Negeri 2 Surabaya, SMA Negeri 9 Surabaya dan SMA Negeri 5 Surabaya. Karenanya di lokasi ini dikenal dengan nama SMA Kompleks.

Sejarah SMA Negeri 1 Surabaya berawal pada bulan April 1949, di mana ada beberapa tokoh pendidikan di Surabaya berusaha mendirikan seko-



Gerbang masuk SMAN 1 Surabaya

lah sendiri yang muridnya adalah para tentara pelajar yang telah meninggalkan sekolah karena harus membela negara. Mereka sepakat mendirikan sekolah lanjutan melalui "Yayasan Dr. Sutomo" yang diketuai oleh Ds. Iskandar. Karena Ds. Iskandar mempunyai hubungan luas dengan instansi pemerintah pendudukan Belanda, maka mereka berhasil mendapat izin mendirikan sekolah yaitu SMA Dr. Sutomo, yang sebelumnya disebut Sekolah Tengah dan Tinggi. Kemudian berubah nama menjadi Sekolah Menengah Tinggi dan akhirnya menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).

SMA Dr. Sutomo pertama-tama menempati gedung di Jl. Bubutan, kemudian pindah ke gedung STM Jalan Patua dan akhirnya menempati gedung di Jalan Wijaya Kusuma 48 Surabaya. Gedung tersebut adalah bangunan tua peninggalan kolonial Belanda. Dahulu bangunan ini digunakan sebagai gedung Hogereburgerschool *Soerabaia* (HBS), sekolah menengah bagi anak Belanda dan kaum ningrat pribumi yang dibangun pada tahun 1923. Arsiteknya adalah J. Gerber dari BOW. Gerber juga merupakan Arsitek gedung sate yang terkenal di Bandung.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia bulan September 1949, maka para pendiri SMA Dr. Sutomo berusaha memperjuangkan supaya ada pengakuan dari pemerintah Indonesia. Atas perjuangan Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah, maka pada tanggal 1 April 1950 SMA Dr. Sutomo diakui menjadi sekolah negeri yaitu SMA Negeri 1 Surabaya dengan Kepala Sekolah pertama R. Soehardi Notodipuro. Staf pengajarnya pun, menurut Johannes Mardijono, Kepala Sekolah SMAN 1 Surabaya, banyak dibantu oleh asisten dosen dan mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Airlangga

Pada tahun pelajaran 1952/1953, SMA Negeri 1 Surabaya membuka Jurusan Sosial Budaya atau dikenal dengan bagian C. Karena permintaan terlalu banyak, maka murid bagian C ditempatkan di gedung Jalan Prof. Dr. Mustopo yang sekarang menjadi SMA Negeri 4 Surabaya. Pada tahun pelajaran 1954/1955 antara SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya saling tukar jurusan. SMA Negeri 1 menyerahkan bagian B ke SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 2 menyerahkan bagian A ke SMA Negeri 1. Sehingga SMA Negeri 1 menjadi jurusan Bahasa atau bagian A dan SMA Negeri 2 menjadi SMA bagian B. Yang menjabat kepala sekolah R. Slamet. SMA Negeri 1 yang hanya bagian A ini berakhir pada tahun pelajaran 1963/1964. Sejak tahun pelajaran 1964/1965 tidak lagi SMA Negeri 1 bagian A tetapi menjadi SMA Negeri 1 Surabaya. Pertengahan September 1965 diputuskan, bahwa SMA Negeri 1 Surabaya dibubarkan dan didiri-



Ruang belajar di kelas dengan meja tua

kan dua sekolah baru, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 10 Surabaya. Selang beberapa tahun kemudian SMA Negeri 1 Surabaya yang berdiri di atas lahan seluas 7.294,94 m², dimunculkan kembali sampai sekarang ini.

Membentuk Karakter Kewirausahaan

Menurut Johanes Mardijono, melalui visi sekolah yang unggul dalam prestasi berdasarkan kualitas iman, taqwa dan budi pekerti luhur serta berbudaya lingkungan di era globalisasi, manajemen sekolah berkomitem akan fokus pada peningkatan pembentukan karakter kewirausahaan pada siswa. "Sejalan dengan era globalisasi, kami perlu mempersiapkan siswa agar kelak memiliki masa depan cerah dan menurut saya, mengelola SMA masa depan yang tepat adalah membentuk manajemen sekolah berbasis kewirausahaan."

Pembentukan karakter kewirausahaan bagi siswa SMAN 1 Surabaya nyata-nyata sudah membuahkan hasil. Atas inisiatif dan kreatifitas siswa, mereka membuat usaha berbasis online melalui SMASA Network dengan menggunakan fasilitas media sosial yang ditujukan bagi siswa sekolah ini. Siapapun yang ingin mempromosikan produk atau berjualan, dapat memanfaatkan media ini.

SMAN 1 Surabaya saat ini memiliki 22 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 785 orang 52 tenaga pendidik. Sebagai sekolah tua, tentu sudah banyak prestasi yang diraih oleh para siswanya, baik di bidang sains, seni budaya dan olahraga. □

AWAL SEJARAH KOTA SEMARANG

Setelah sempat beralih fungsi menjadi pusat pendidikan militer tentara Jepang dan rumah sakit, HBS yang menjadi cikal bakal SMAN 1 Semarang pun kembali membuka kegiatan belajar. Keunggulan sekolah adalah pembelajaran online, menggunakan scoology, quifer, Edmodo, dan dikembangkan e-modul untuk peserta didik.

Keberadaan SMA Negeri 1 Semarang Jl Taman Menteri Supeno No. 1, tidak lepas dari sejarah kota Semarang. Bangunan ini didirikan pada tahun 1936 dan merupakan pengembangan dari *Hogereburgerschool* (HBS) yang telah didirikan sebelumnya di Jalan Pemuda (SMA Negeri 3 Semarang). Awal penggunaan diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer pada tahun 1939.

Kemudian pada masa pendudukan Jepang 1942-1945 digunakan sebagai pusat pendidikan militer tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda mengambil alih gedung ini dan fungsinya diubah menjadi rumah sakit. Tetapi pada tahun 1946 fungsi HBS dikembalikan. Baru pada tanggal 12 Desember 1949, setelah pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, sekolah ini menjadi SMA Negeri 1 Semarang. Sejalan dengan perkembangannya tahun 1960/1961 menjadi SMAN 1 Semarang bagian B, sehingga pada tahun 1978/1979 terbagi menjadi SMAN 1 dan SMAN 2 yang saat ini terletak di Sendang Guko.

Tahun 1942 gedung sekolah ini dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang dan digunakan sebagai pusat pendidikan militer. Hal ini berlangsung hingga Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Belanda mengambil alih gedung ini, fungsinya diubah menjadi rumah sakit. Tetapi kemudian pada tahun 1946, fungsi sebagai sekolah dikembalikan lagi. Baru pada tanggal 12 Desember 1949, setelah pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, sekolah ini resmi SMA Negeri 1 Semarang. Kini SMA Negeri 1 Semarang menjadi salah satu sekolah menengah atas favorit di Kota Semarang dan mendapat predikat



Gerbang SMAN 1 Semarang

Sekolah Adiwiyata atau Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Menurut Endang Suyatmi L, Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, seperti halnya sekolah lain, SMAN 1 Semarang memiliki tantangan dari jumlah peserta didik yang banyak serta latar belakang yang berbeda. "Tapi bagi kami hal ini merupakan potensi yang harus dikembangkan," katanya. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Inovasi implementasi kurikulum SMAN 1 Semarang memiliki pembelajaran online, menggunakan scoology, quifer, Edmodo, dan dikembangkan e-modul untuk peserta didik sehingga kualitas SMAN 1 Semarang selain sekolah tertua juga memiliki beberapa prestasi yang baik. Salah satunya adalah seni karawitan yang menjadi unggulan SMAN 1 Semarang.

Salah satu tolok ukur keberhasilan sekolah ini di bidang akademik adalah banyaknya siswa diterima di PTN dan diterima di berbagai sekolah kedinasan. Terkait dengan tenaga pendidik, Kepala Sekolah mengatakan bahwa guru-guru SMAN 1 Semarang sudah linear semua antara mata pelajaran yang diajarkan dengan ijazah yang dimiliki dan sudah beberapa orang sudah bergelar magister. "Kompetensi tenaga pendidik dilakukan dengan program In House Training, pengiriman diklat guru dan lain-lain."

Perbaikan penataan fisik sekolah terutama sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam mengajar merupakan hal yang sangat berpengaruh untuk peningkatan kualitas SMAN 1 Semarang. Kini, sekolah yang pernah membuka kelas



Kegiatan pembelajaran siswa di SMAN 1 Semarang

olimpiade dan kelas akselerasi pada tahun 2015, memiliki sejumlah 1.455 siswa yang terbagi dalam 40 rombongan belajar dengan pemilihan peminatan IPA dan IPS. Alumninya pun banyak yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan, seperti menteri, gubernur dll.

Kepala Sekolah Endang Suyatmi L masih memiliki harapan, ke depannya SMAN 1 Semarang memiliki lulusan yang mandiri, berkarakter, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan teknologi. Karenanya sekolah akan menekankan pendidikan karakter di samping menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap., serta adaptasi perkembangan teknologi merupakan. □

DEDIKASI UNTUK NEGERI

SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan merupakan bagian dari sejarah pendidikan nasional, karena lahirnya berasal dari buah pikir Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara.

SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Ibu Pawiyatan, yang terletak di Jalan Taman Siswa No. 25-d Yogyakarta. Sejarah sekolah ini cukup panjang, bermula dari dibukanya Taman Siswa, nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Saat pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa.

Sampai akhir tahun ajaran 1940/1941, Taman Siswa Ibu Pawiyatan belum memiliki perguruan untuk sekolah menengah umum. Pada saat itu yang ada baru sekolah keguruan atau Taman Guru untuk sekolah lanjutan tingkat atas. Sedangkan untuk siswa-siswa dari Taman Dewasa sudah hampir lulus dan para putera pamong pada waktu itu tidak menghendaki menjadi guru serta menuntut ilmu di Taman Guru. Pada umumnya mereka



Taman Madya (SMA) Ibu Pawiyatan



Bangunan sekolah Taman Madya (SMA) Ibu Pawiyatan

ingin sekali menempuh pendidikan di sekolah menengah umum.

Keinginan kuat ini membuat para pamong pun mengusahakan berdirinya sekolah menengah di lingkungan Ibu Pawiyatan Taman Siswa. Kemudian pada bulan Mei 1941, Ki Hajar Dewantara, membentuk panitia yang terdiri atas Ki Hajar Dewantara sebagai ketua, Ki Hamidjojo sebagai penulis untuk menggodok berdirinya sekolah menengah umum di lingkungan Ibu Pawiyatan Taman Siswa yang dinamakan Taman Madya. Panitia kemudian mengundang simpatisan Taman Siswa, para cendekiawan serta para orang kaya yang nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan baik pemikiran maupun material untuk terwujudnya sekolah menengah umum di lingkungan Ibu Pawiyatan Taman Siswa.

Namun rencana di atas tidak berjalan mulus. Ada saja rintangan yang menghadang. Sehingga baru pada Agustus 1941 Taman Siswa Ibu Pawiyatan resmi membuka kelas Taman Madya dengan jurusan Pasti dan Alam. Pada tahap awal, sekolah ini baru bisa mendapatkan 10 murid dan itu pun berkurang menjadi tinggal 5 murid saja yang berminat mengambil jurusan Pasti dan Alam karena 5 lainnya berminat mengambil jurusan Sejarah. Dengan dibukanya kelas Taman Madya, berarti baru pertama kali di Yogyakarta ada sekolah menengah umum swasta yang didirikan dan dikelola oleh bangsa Indonesia. Untuk biaya operasional pelaksanaan pendidikan, setiap siswa dipungut biaya Rp20,- yang digunakan untuk pembelian buku-buku pegangan pamong. Kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum AMS, dengan tambahan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sementara kegiatan belajar menggunakan tempat yang menempel di pen-

dopo Taman Siswa.

Pada saat pendudukan Jepang, kegiatan di semua perguruan Ibu Pawiyatan dihentikan sementara selama 10 hari untuk menyesuaikan pemindahan kekuasaan atau kedaulatan dari pihak Belanda ke pihak Jepang. Ketika perguruan dibuka kembali, Ibu Pawiyatan justru kebanjiran murid, sampai membuka 69 kelas untuk seluruh bagian di perguruan. Khusus siswa-siswa Taman Madya, kebanyakan merupakan pindahan dari HBS dan AMS yang saat itu kegiatan belajarnya dihentikan karena adanya pemindahan kekuasaan. Selain jurusan Pasti dan Alam, Taman Madya mulai membuka jurusan Bahasa karena pamong-pamongnya sudah mencukupi untuk jurusan tersebut.

Pada Maret 1944 Kelas Taman Madya dan Taman Guru kembali ditutup oleh pihak Jepang karena alasan politik, lalu menghilangkan Taman Dewasa dan mengubahnya menjadi Taman Tani dengan tujuan mendidik bangsa Indonesia untuk menjadi petani saja. Baru pada masa kemerdekaan dan Jepang sudah meninggalkan Indonesia, kegiatan pembelajaran di Taman Madya Ibu Pawiyatan mulai berjalan lancar. Pada 1947 Taman Madya Ibu Pawiyatan berhasil meluluskan siswanya.

Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi bapak pendidikan nasional, menjalankan pendidikan di Taman Siswa dengan Sistem Among dan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan kemudian menjadi semboyan pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan sebutan "Tut Wuri Handayani". Atau lengkapnya, *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (yang di depan memberi teladan/contoh), *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah membangun prakarsa/semangat) serta *Tut Wuri Handayani* (dari belakang mendukung)

Kini, di tahun pelajaran 2017-2018, SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan hanya memiliki lima rombel dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 70 siswa. " Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah siswa saat ini, salah satunya adalah siswa-siswa yang berasal dari luar daerah Yogyakarta semakin berkurang" tutur kepala sekolah H. Amin Priyatna. Meskipun demikian dalam proses pembelajaran di sekolah, guru-guru tetap konsisten untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter siswa sesuai dengan apa yang diwariskan oleh pendirinya yaitu Ki Hajar Dewantara.

Sampai dengan tahun pelajaran 2017-2018, sekolah ini masih menggunakan kurikulum KTSP tahun 2006. Keunggulan dari sekolah ini adalah tetap mempertahankan pelestarian budaya-budaya lokal yang kemudian menjadi salah satu muatan dari kurikulum yang dipakai. □

BERUPAYA MENJADI NOMOR SATU KEMBALI

SMA Negeri I Jakarta, sekolah menengah atas nasional tertua yang tercatat dalam sejarah. Sekolah ini sempat berjaya dan banyak meluluskan orang-orang penting di negeri ini. Manajemen sekolah berupaya membawa SMA Negeri I menjadi nomor 1 kembali.

SMA Negeri I Jakarta di Jl. Budi Utomo No. 7 Jakarta Pusat, menempati gedung berarsitektur tua yang diperkirakan sudah didirikan sejak tahun 1889. Konon gedung tersebut pada waktu itu merupakan gedung logistik dari sebuah rumah sakit tapi dipakai juga sebagai ruang perawatan untuk menampung kelebihan pasien di rumah sakit tersebut. Hal ini tampak dari disain bangunan yang berbentuk bangsal-bangsal dengan jendela dan pintu panjang.

Bekas bangunan rumah sakit tersebut kemudian dipakai oleh PHS (Prins Hendrick School). Sejarah SMAN I sendiri tidak berawal dari gedung cagar budaya tersebut, tetapi berasal dari satu sekolah menengah tinggi (SMT)—sekolah yang dibentuk Pemerintah pertama kali pada 13 Maret 1946 yang proses belajar-mengajarnya berlangsung di gedung SMA Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah Jepang menyerah, SMT ini dibubarkan dan dibuka kembali sebagai Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMO). Kegiatan belajar-mengajar SMO ini menumpang di gedung SMA PSKD di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Setelah berganti nama, SMO ini dikenal sebagai SMA Kiblik (dari kata Republik).

Akibat adanya Agresi Belanda pada tahun 1947 sekolah ini dibubarkan, akan tetapi kegiatan belajar mengajar di lanjutkan di rumah-rumah para guru, antara lain di rumah Adam Bachtiar (Direktur) di Jl. Gondangdia Lama No. 22, rumah Wagendorp di Jl. Sawo Nomor 12 dan di beberapa rumah orangtua murid, antara lain di rumah Ny. Dr Susilo di Jalan Proklamasi Nomor 69. Keadaan ini terus berlangsung sampai penyerahan



Bangunan tua SMAN 1 Jakarta

kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari pihak Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1947.

Berganti-ganti nama

Tahun 1950, SMA Kiblik mulai menempati gedung di Jalan Budi Utomo Nomor 7 ini sampai sekarang. Sepanjang sejarahnya, tercatat beberapa kali perubahan nama dari SMA Kiblik sebelum berubah menjadi SMAN I Jakarta. SMA Kiblik diganti menjadi SMA I-A dan SMA I-B, kemudian berubah nama menjadi SMA I- ABC pada tahun 1962. Nama berubah lagi menjadi SMA Negeri I pada tahun 1964. Bangunan cagar budaya seluas 4.657 meter persegi ini berada di atas lahan seluas 7.060 meter persegi. Salah satu ruang di sekolah yang masih dipertahankan orisinalitasnya adalah ruangan bekas laboratorium kimia yang berbentuk seperti aula kecil dengan bangku setengah lingkaran dan berundak. Ada enam undakan yang masing-masing dilengkapi bangku memanjang. Bangku itu terbuat dari kayu jati yang dipelitur. Kini, ruangan itu digunakan sebagai ruang audiovisual. Ruangan ini oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Jakarta, Mas Ayu Yuliana, saat ini digunakan untuk menerima tamu-tamu VIP. "Tentu tamu-tamu kami akan bangga dan terhormat berada di ruangan



Murid sekolah yang kini SMAN 1 Jakarta di masa silam

yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an,” kata Kepala Sekolah.

SMA Negeri I Jakarta juga merupakan sekolah dengan segudang sejarah, sejumlah prestasi baik akademik maupun non-akademik dan sekolah yang telah banyak menghasilkan pemimpin negeri ini, di antaranya adalah Siswono Yudo Husodo, Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Prof. Dr. JB Sumarlin Mantan Menteri Keuangan dan Dr. Tarmizi Taher, Mantan Menteri Agama. Sekolah ini pada awal tahun 2002 juga mendapat kepercayaan untuk menjadi sekolah pelaksana terbatas kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Bahkan sejak tahun pelajaran 2013/2014 menjadi sekolah sasaran implementasi Kurikulum 2013.

Mengembangkan minat dan bakat

Menurut Kepala Sekolah, Mas Ayu Yuliana, implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri I Jakarta, difokuskan kepada menggali minat dan bakat siswa sesuai dengan bidang dan passion terutama di bidang seni, olahraga dan kewirausahaan. “Kami selalu menekankan kepada siswa bahwa menoreh prestasi bukan hanya di bidang akademik dan sains saja. Karena ada siswa yang secara standar kelulusan untuk suatu mata pelajaran tertentu kurang, tapi di bidang lain menonjol,” tutur Mas Ayu Yuliana. Sebagai contoh, ada siswa yang bapaknya penjaga danau sunter, di mata pelajaran tertentu lemah, tapi dia menjuarai olahraga ski air karena hidupnya



Suasana pembelajaran saat ini

banyak di danau. Sampai dikirim ke Panama, AS. Sisi-sisi positif siswa seperti ini yang dikembangkan pihak sekolah. "Kami ingin SMA Negeri I kembali menjadi nomer satu, paling tidak di bidang tertentu di tingkat provinsi." Hasilnya, sederet prestasi membanggakan ada di sekolah ini.



Manajemen sekolah, di bawah kepemimpinan Mas Ayu Yuliana, sangat mendorong perkembangan minat dan bakat siswa. Untuk menunjang minat dan bakat siswa, sekolah pun menyediakan 22 jenis ekstra kurikuler dan pihak sekolah memfasilitasi secara penuh. Bahkan seringkali melibatkan para alumni. Ada siswa yang senang bidang computer dan ada juga siswa yang memiliki jiwa seni melalui membantik atau mendisain. "Kami mendorong dan memberikan semangat kepada mereka. Kami hanya ingin nantinya hidup mereka berkualitas dan memiliki masa depan cerah secerah dunia yang mereka geluti," tambahnya.

Satu hal positif lainnya dari SMA Negeri I Jakarta adalah ikatan alumni yang begitu kuat. Melalui donasi dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Boedi Utomo (IKA BOEDOET), SMA I Jakarta menambah sejumlah fasilitas untuk menunjang aktifitas pembelajaran siswa, di antaranya meresmikan perpustakaan sekolah, ruang konsultasi, merehabilitasi gedung berlantai satu atau gedung purbakala, fasilitas olahraga climbing wall, sampai fasilitas LCD proyektor serta komputer. Melalui semboyan: *come, care and construct*, sekolah terus menjalin komunikasi yang baik dengan alumni yang kebanyakan sudah sukses di bidangnya untuk mau kembali ke sekolah dan membantu meningkatkan mutu pendidikan adik-adik kelasnya. □

SMAN 1 BANDA ACEH

GERBANG MENUJU SEKOLAH LANJUTAN

Resmi berdiri dua tahun sejak Indonesia merdeka, SMAN 1 Banda Aceh telah melahirkan sejumlah pemimpin dan tokoh penting Aceh.

SMAN 1 Banda Aceh memiliki bangunan khas bergaya Romawi klasik peninggalan Belanda yang berdiri sejak 1878. Awalnya sebagai gedung Mulo School sekaligus tempat berkumpulnya kaum teosofi Belanda di masa lalu, yang tergambar di Tugu prasasti bertuliskan 3 Bahasa (Indonesia, Inggris dan Aceh).

Ada beberapa kali perubahan nama sejak SMAN 1 Banda Aceh menjadi seperti saat ini. Beberapa sumber menyebutkan nama awalnya sebagai SMA B, SMA Negeri Kotaraja, SMA Jeumpa Puteh lalu SMAN 1 Banda Aceh. Sekolah ini sudah mengalami 15 kali pergantian Kepala Sekolah sejak mulai berdirinya. R.NG. Suratno Ratnodiharjo (1947-1948),



Bangunan SMAN 1 Banda Aceh di masa lalu (kiri) dan saat ini (kanan)

Kamaruddin Nasution (1948-1964), Athaillah (1964-1968), Ibrahim Kaoy (1972-1971), Ali Bakri Ibrahim (1972-1978), M. Yunus Benseh (1978-1981), Sudarmansyah (1981-1987), Drs. Mohd. Zein Syarif (1987-1991), Mohd. Ali (1991-1998), Marwan Aziz, MM (1998-1999), Zahri ZA (1999-2000), H. Sanusi Harun (2001-2005), Hj. Risnawati (2005-2006), Syarifuddin Ibrahim (2006-2013), dan Khairurrazi (2013-sekarang).

Ali Bakri Ibrahim merupakan salah satu Kepala Sekolah yang hingga hari ini masih sangat aktif dalam mengikuti perkembangan sekolah. Pemikirannya masih bagus, tidak pikun dan senang dengan dunia pendidikan hingga mengelola PAUD sampai hari ini usai dirinya pensiun. Ali menyebutkan betapa di masa lalu sekolah hingga SMA merupakan kebanggaan tersendiri. Bahkan dengan bekal ijazah SMA pun, seseorang sudah bisa menjadi pengajar. "SMAN 1 Banda Aceh ini merupakan sekolah lanjutan tertua dan pertama di Aceh, sehingga sudah berusia 71 tahun di bulan September tahun ini. Kami sudah mengalami beberapa periode pergantian kepala sekolah. Masa sekolah belum mengenakan seragam putih abu-abu juga saya alami. Dulu sebelum menjadi seragam putih abu-abu, murid mengenakan baju putih-putih," ujar Ali Bakri Ibrahim mengenang.

Sebagai sekolah tertua, prestasi SMAN 1 Banda Aceh juga tidak diragukan lagi. Alumninya juga sudah banyak yang menjadi pemimpin dan tokoh penting bangsa ini, salah satunya Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Hingga hari ini, 90% lebih lulusannya melanjutkan ke sekolah lebih tinggi baik di dalam dan luar negeri. Predikat sekolah model dan sekolah rujukan juga melekat padanya.





Para siswa SMAN 1 Banda Aceh di masa silam

Sekolah yang terletak di sebelah Barat Lapangan Blang Padang ini juga merupakan bangunan ikonik yang sering menjadi latar belakang foto para turis karena arsitektur bangunannya yang kuno. Sampai sekarang, bahkan sejak tsunami menghantam Aceh tahun 2004 silam, pengunjung masih bisa melihat bagaimana empat belas pilar silindris layaknya kuil Patheon masih berdiri kokoh. Atapnya yang berbentuk segitiga dan lingkaran yang berada di tengah segitiga tersebut juga masih terukir jelas. Di bagian belakang gedung ada lubang bawah tanah yang kini sudah ditutup. "Konon lubang itu merupakan jalan bawah tanah yang menuju ke suatu tempat, entah ke kantor Gubernur atau ke mana, namun sampai hari ini masih belum dibuka dan diteliti kembali oleh para arkeolog," ujar Khairurrazi, Kepala Sekolah SMAN 1 Banda Aceh.

Di era digital saat ini kekhasan bangunan masih dipertahankan meski sedang direncanakan untuk melakukan renovasi dengan sistem perancangan modern. Namun masih menunggu kelanjutan persetujuan renovasi yang sesuai dengan aturan yang ada mengingat bangunannya masuk dalam kategori heritage. Meski demikian kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan anak-anak didik terus ditanamkan sikap disiplin, iman takwa serta berprestasi.

Sebagai sekolah tua, SMAN 1 Banda Aceh terus berbenah dan maju dalam kompetisi. Sehingga, sekolah pun berhasil mendapatkan penghargaan dari berbagai bidang, di antaranya Madani Award 2016 sebagai sekolah berkarakter Islami, mewakili Indonesia pada Konferensi High School Student Summit on "world Stunami Awareness Day" pada Hari Tsunami Dunia di Jepang 21-29 November 2016. Sementara di bidang olahraga meraih juara 1 catur putri, juara 1 tenis meja tunggal putri dan juara 1 atletik lompat jauh 100 meter pada ajang O2SN 2016 tingkat Kota Banda Aceh. Paskibraka Nasional tahun 2016 (Cut Aura Magfirah). Meraih 2 medali perak, 3 emas, 1 special award pada ajang i-ENVEX (University Malaysia Perlis) pada kegiatan I+Aceh (International Asr Creativity and Engineering Exhibition). □

YANG TUA DI SULAWESI UTARA

SMAN Tomohon sudah ada sejak tahun 1946. Sebelumnya adalah salah satu sekolah MULO yang ada di luar pulau Jawa. Pernah menjadi sekolah lanjutan tinggi (AMS), kemudian menjadi SPG, kini menjadi SMAN 1 Tomohon (SMANTO).

Di tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat nama Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai dikenalkan dari yang semula disebut Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMOA). Sebelumnya di tahun 1942 sebelum kemerdekaan diproklamasikan, dikenal dengan sebutan Sekolah Menengah Tinggi (SMT), menjadi SMOA pada tahun 1946. Di tahun 1950-an pun SMA dibagi menjadi 3 kategori, yakni SMA A (Bahasa), SMA B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) dan SMA C (Ilmu Sosial).

Namun sebelum itu, masa lalu ada *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* berarti "Pendidikan Dasar yang Lebih Luas". MULO menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 1930-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten di Jawa. Hanya beberapa kabupaten di luar Jawa yang mempunyai MULO, Sulawesi Utara salah satunya, tepatnya di Tomohon ini.

"Secara detil, kami memang termasuk baru dalam soal sejarah. Yang kami tahu, dulu sekolah masih ada di satu gedung di bekas SPG, baru di 1 Januari tahun 1970 pindah di gedung baru yang sampai sekarang kami tempati. Namun, para senior terdahulu menginformasikan tentang sekolah kami ini sekolah yang tertua, yang usianya sudah 71 tahun pada 3 September lalu," ujar Dra. Meytha J. Tambengi, MM.

Sebagai SMA tertua, menurut Meytha selaku Kepala Sekolah di SMAN 1 Tomohon, sudah banyak alumninya yang menjadi tokoh masyarakat, baik di Kabupaten, Kota, Provinsi sampai nasional. Namun demikian, pengalaman sebagai sekolah yang senior di Sulawesi Utara ini tetap tidak bisa



Ruang Perpustakaan SMAN 1 Tomohon

menganggap remeh perubahan yang terjadi di masa kini, manakala dunia sudah “dikuasai” oleh teknologi.

“Dengan berkembangnya IPTEK, jika tidak diimbangi dengan pendidikan agama atau spiritual yang memadai, bisa mengakibatkan merosotnya etika dan moral. Sehingga ibadah sebelum belajar dimulai selalu kami lakukan, baik yang Kristen, Katholik maupun Islam,” ujar Meytha.

Saat ini, SMANTO masih mengunggulkan potensi sekolah sebagai sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. “Sedangkan sekolah sehat, kami selalu mencanangkan gerakan hidup sehat, lingkungan bersih, lingkungan hijau, bebas narkoba dan asap rokok,” tegas Meytha.

Senior dan Berprestasi

Sekolah yang menjadi tujuan utama peminatan di tingkat Kabupaten adalah SMAN 1 Tomohon, selain karena reputasinya sebagai sekolah yang senior dan berpengalaman, sekolah ini juga merupakan sekolah yang berprestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional seperti ajang OSN,



Suasana belajar peserta didik SMAN 1 Tomohon saat ini

O2SN dan FL2SN. Namun mengingat keterbatasan ruang kegiatan belajar, sekolah tetap membatasi kuota peserta didik yang ingin menempuh pendidikan SMA di sekolah ini. Pendaftaran secara online juga sudah mulai dilakukan, pengaturan kuota wilayah, peminat dari daerah terpencil, juga lain daerah diatur sesuai dengan petunjuk yang sudah diberlakukan.

“Kadangkala kami merasa kasihan dengan yang tidak bisa kami terima belajar di sekolah ini, tapi kalau terlalu banyak siswanya juga tidak efektif dalam pembelajarannya, maka tetap harus dibatasi supaya anak-anak belajarnya maksimal,” ujar Meytha.

Selain keterbatasan ruang kelas, infrastruktur bangunan sekolah juga memerlukan sentuhan perawatan dan renovasi di beberapa bagian, mengingat usianya juga kondisinya. Sekolah menyadari bahwa masih banyak sekolah yang memerlukan pemeliharaan dan penanganan yang jauh lebih parah kondisinya daripada SMANTO, namun demikian pihak sekolah tetap berharap jika bangunan yang memang sudah tidak layak digunakan dalam jangka panjang bisa segera diperbarui agar belajar lebih nyaman dan tidak was-was jika ada kerusakan yang membahayakan.

“Semoga SMAN 1 Tomohon mendapatkan perhatian untuk pengembangan kualitas fisik dan nonfisiknya. Selain itu tetap bisa menjadi sekolah yang melaksanakan program SMA Rujukan di tahun-tahun mendatang,” pungkas Kepala Sekolah yang memimpin sekolah dengan mengimbas ke 5 sekolah di sekitar Kabupaten Tomohon ini. □

SEKOLAHNYA PARA TOKOH BANGSA

Di gedung eks-HBS Bandung kini menjadi SMAN 5 dan SMAN 3 Bandung yang hanya dibatasi oleh jalur koridor tengah yang memanjang dari arah utara ke selatan.

Seiring dengan gagasan politik etis pada akhir abad 19 dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat Belanda yang bermukim di Hindia Belanda, maka pada tahun 1915 dibangunlah gedung Hogere Burgerschool te Bandoeng (HBS) di Billitonstraat (Jl. Belitung) dengan rancangan arsitek Charles Prosper Wolff Schoemaker. HBS menerima murid untuk pertama kalinya tahun 1916 dan dibuka bagi masyarakat Belanda serta bagi kaum bangsawan pribumi. Pendidikannya berorientasi pada sistem pendidikan Eropa kontinen dengan lama masa studi lima tahun. Dari sisi kepemilikan, sekolah ini termasuk kategori Gouvernements



Bangunan tua SMAN 5 Bandung



Ruang kelas menggunakan bangunan tua bersejarah

HBS atau Openbare HBS dalam pengertian bahwa HBS tersebut diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah dan berstatus sekolah negeri. Direktur (kepala sekolah) HBS Bandung yang pertama adalah Dr. Willem Marius Docters van Leeuwen. Di sinilah Sultan Hamengkubuwono IX pernah bersekolah.

Saat zaman Jepang (1942 - 1945) gedung sekola berfungsi sebagai markas tangsi/asrama tentara Jepang (Kempetai) dan pada zaman Peralihan (1947 - 1950) pagi hari berfungsi sebagai Sekolah VHO (Voortgezet Hoger Onderwijs) - sekolah setaraf SMA berbahasa Belanda bagi siswa berbangsa Belanda dan sore hari sebagai VHO dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia bagi siswa Indonesia. Sejak pengakuan kedaulatan Indonesia Desember 1949, jumlah siswa berbangsa Belanda berangsur surut dengan sendirinya, sementara siswa berbangsa Indonesia semakin meningkat jumlahnya.

Pada tahun 1950 dibentuklah SMA Belitung (Jalan Belitung) dan setahun kemudian dipecah menjadi tiga, yaitu SMA A (sekarang SMAN 1) dan SMA B (sekarang SMAN 2, 3, dan 4) serta SMA C yang saat ini menjadi SMAN 5. Ketika jabatan kepala sekolah dipegang oleh Tan Kiem Hay dimulailah kewajiban mengenakan seragam sekolah dan upacara bendera setiap hari Senin, didasarkan atas keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa inilah tidak jarang siswa putri SMA 5 diundang menari di Istana Merdeka manakala Presiden Sukarno menerima tamu negara. Baru tahun 1966 SMA Negeri 3 pindah dari Jl. Sumatra ke Jl. Belitung,



Bangunan SMAN 5 Bandung di masa lalu

bersama dengan SMA Negeri 5 dalam satu gedung sampai sekarang.

Gedung sekolah di Jl. Belitung No.8, Merdeka, berdiri di atas tanah seluas 14.240 m² dengan luas bangunan 8.220 m². Bangunan bergaya Eropa dengan jendela dan pintu yang panjang ini masih sangat terawat dengan baik dan tidak berubah bentuk. Hanya ada penambahan ruang di belakang gedung utama seiring dengan perkembangan jumlah siswa. Saat ini pemakaian gedung dibagi dua, di mana SMAN Negeri 3 Bandung di sebelah barat dan SMUN 5 Bandung di sebelah timur. Batas SMAN 3 dan SMAN 5 hanya dibatasi oleh jalur koridor tengah yang memanjang dari arah utara ke selatan. Batas koridor ini dapat juga berfungsi sebagai pemersatu antara SMAN 3 dan SMAN 5 sehingga para warga kedua sekolah ini dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Menurut H. Suparman, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandung, sekolahnya selalu melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pada tahun pelajaran 2004/2005 SMAN 5 diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai salah satu sekolah yang masuk dalam proyek mini piloting melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi siswa kelas 1 (satu) dan di kurikulum 2004 kelas menjadi X untuk kelas 1, XI untuk kelas 2 dan XII untuk kelas 3. "Saat ini kami menerapkan Kurikulum 2013 dengan pemintan jurusan IPA dan IPS," katanya. Dari tuntutan kurikulum yang ada, secara berangsur-angsur SMA 5 Bandung melengkapi dirinya dengan berbagai sarana seperti laboratorium kimia, fisika, dan biologi serta Lab. Bahasa dan Lab. Komputer. Mengingat bahwa siswa juga perlu dibina mentalnya serta memenuhi kewajiban agama maka dibangunlah mushola yang diberi nama Nurul Khomsah dan diresmikan pada bulan Desember 1984. □

MEMBIDANI OUTPUT BERKUALITAS

Usia selalu menjadi gambaran tentang rentang perjalanan dan pengalaman. Banyaknya jumlah bilangan angka penanda usia, dipercaya menunjukkan kematangan. Itu pula gambaran tentang SMAN 1 Kupang yang berdiri sejak tahun 1950.

Awal tahun kemerdekaan, sekolah menengah atas memang belum bernama SMA, masih dalam masa peralihan dari Algemeene Middlebare School (AMS) yang kemudian hari di era 1950-an menjadi SMA dengan tiga tipe; A, B dan C. Perjalanan itu juga dialami oleh SMAN 1 Kupang, yang sudah 67 tahun berpengalaman mendidik generasi bangsa khususnya masyarakat Kupang dan sekitarnya menjadi sosok-sosok berkualitas dan berbudi luhur.

SMAN 1 Kupang fisik berdiri secara resmi pada tanggal 15 November 1950 dengan nama SMA Negeri C Kupang (1950-1953). Lalu tahun 1953 sampai dengan 1954 dengan nama SMA Negeri A dan C Kupang. Tahun 1954 sampai dengan tahun 1967 dengan nama SMA Negeri A, B dan C Kupang. Tahun 1967 dengan nama SMA Negeri 173 Kupang sesuai Surat Keputusan MENDIKBUD RI Nomor:0236/1973 tanggal 11 November 1973. Tahun 1980 sampai dengan tahun 1984 dengan nama SMA Negeri 1 Kupang. Tahun 1984 sampai dengan 1997 dengan nama SMA Negeri 1 Kupang. Tahun 1997 hingga 2003 dengan nama SMU Negeri 1 Kupang, berdasarkan Surat Keputusan MENDIKBUD Nomor: 035/0/1997 tanggal 7 Maret 1997. Tahun 2004 hingga saat ini kembali dengan nama SMA Negeri 1 Kupang.

Di masa lalu, sebelum tahun 1960-an mungkin merasakan bisa sekolah sampai SMA itu sebuah kemewahan, demikian Drs. Bapa Muda-Kepala Sekolah SMAN 1 Kupang membuka kisah perjalanan SMA di Kupang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sekolah apalagi sampai SMA,



Berdiri pada tahun 1950, inilah SMAN 1 Kupang, NTT

selain itu hanya ada satu SMA di Kupang ya SMAN 1 Kupang inilah. Dan dulu pun awalnya adalah SPG atau pendidikan guru.

“Sebenarnya kalau menurut saya, SPG tidak perlu dihapus, biar saja tetap ada, jadi orang yang ingin menjadi guru sudah dididik sejak awal sesuai peminatan siswa, tapi sekarang pendidikan guru hanya dilakukan setelah masuk perguruan tinggi. Tapi ya barangkali memang harus demikian sejarah pendidikan di negara kita ini,” ujarnya.

Lepas dari kondisi tersebut, sebagai negara yang siap maju, menurut Bapa Muda ini, semua tujuan kebijakan pemerintah tentunya kepada arah perbaikan, sebab kemajuan dunia juga sudah demikian pesat. Sehingga pendidikan juga menjadi hal utama untuk dijadikan tempat membangun pribadi-pribadi berkualitas dan berbudi luhur.

“Di masa saya sekolah SMA dulu, pengajaran yang dilakukan guru cenderung keras, masih dengan tangan maupun keras secara verbal. Tapi di ujung rotan itulah kami menjaid pribadi yang kuat dan disiplin, bahkan tidak berani mengadu. Tapi di masa kini, pendidikan sudah tidak berlaku lagi cara feodal semacam itu, zaman sudah sangat transparan dan berbasis internet, kesalahan sedikit bisa menjadi bumerang bagi dunia pendidikan tak hanya guru saja yang terdampak,” urainya.

Jadi, menurut Bapa Muda, dunia pendidikan juga harus waspada dengan

dampak internet. Meski satu sisi memang menguntungkan atau bermanfaat namun di sisi dampak negatif juga ada, saat semau serba terbuka, hal-hal yang tidak perlu juga ikut menyebar.

Sekolah Terbesar dengan Siswa Terbanyak

SMAN 1 Kupang saat ini merupakan sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di seluruh Kupang bahkan Nusa Tenggara Timur. Ada 2110 siswa tercatat pada tahun 2017 sedang menempuh studi di SMAN 1 Kupang, dan tentu saja ini jumlah sangat besar. Meski lahan sekolah juga luas yakni 11.608 meter persegi atau 11 hektar lebih, dengan jumlah ruang kelas 48, dan ruang lainnya 11 untuk peruntukan fungsi lainnya, kini sekolah hanya menyisakan ruang terbuka yang cukup luas di depan bangunan utama dan tidak begitu luas berada di tengah antara bangunan lainnya.

“Ini hal yang luar biasa, kami mengelola lebih dari dua ribu siswa. Bukan hal yang mudah, tapi kami semua tetap semangat menjalankan tugas dan amanah mencerdaskan anak bangsa ini sebaik-baiknya. Kadangkala ke-walahan juga saat penerimaan siswa baru, membludak baik yang online maupun yang langsung, karena sistem secara online kadang tidak bisa dilakukan sepenuhnya,” ungkapnya.

Tak hanya peminatan yang luar biasa, soal prestasi SMAN 1 Kupang juga andalan. Sekolah senior ini melakukan program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin sekolah di SMAN 1 Kupang, selain itu prestasi olahraganya juga bagus seperti beladiri Kempo yang langganan juara.

Kini daya saing antar sekolah kian ketat, sehingga SMAN 1 Kupang pun tetap berusaha keras menjaga kualitasnya, tak hanya sekadar senior dalam hal pengalaman pendidikan, namun juga harus menghasilkan alumni terdidik, berkualitas, profesional dan berbudi luhur. “Intinya, jangan hanya akademik bagus, non akademik juga bagus, tapi perilakunya pun mulia,” pungkas Bapa Muda. □

MEMUPUK TOLERANSI MELALUI KERAGAMAN

Berdiri pada tahun 1950, SMAN 1 Makassar awalnya adalah sekolah menengah di era kolonial. Cukup banyak mewarnai negeri ini.

SMA Negeri 1 Makassar adalah salah satu sekolah tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1950. Sebelum berubah menjadi SMA Negeri 1 Makassar pada awalnya merupakan Sekolah Pendidikan Zaman Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan nama AMS Makassar dan pada tahun 1950 berubah menjadi SMA ABC Makassar di bawah pimpinan Bapak Yatmo (1950-1952) dan pada tahun 1957 beralih menjadi SMA Negeri 1 Makassar Bagian AB yang bersamaan berdirinya SMA Negeri 2 Makassar Bagian C.

Pada tanggal 21 Mei 1979 SMA Negeri 1 Makassar mengalami musibah kebakaran besar sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar. Oleh sebab itu Pihak Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pimpinan sekolah untuk menempatkan siswa di beberapa tempat, sehingga tempat berlangsungnya proses belajar mengajar terpecah di beberapa sekolah antara SD Negeri Mardekaya dan SMEP / SMEA Negeri 1 Makassar.

Pembangunan gedung sekolah SMA Negeri 1 Makassar yang terbilang megah pada waktu itu yang terletak di jantung Kota Makassar akhirnya rampung pada tahun 1982 yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Daoed Joesoef pada tanggal 14 April 1982.

MA Negeri 1 Makassar terletak di jalan Gunung Bawakaraeng No. 53 Makassar-Sulawesi Selatan. Sekolah yang terletak di pusat kota ini adalah sekolah yang nyaman untuk belajar. Sesuai dengan visinya yaitu unggul dalam imtaq, iptek dan berjiwa entrepreneur serta peduli terhadap ling-



Suasana SMAN 1 Makassar di masa silam

kungan berdasarkan pada kearifan local. Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 ini selalu menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didiknya. Jumlah siswa pada tahun 2017 mencapai 1.258 siswa yang terbagi menjadi 36 rombongan belajar. Dibimbing oleh 73 guru yang profesional mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah dengan berbagai prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

SMA Negeri 1 Makasar memiliki peserta didik yang heterogen sehingga hal tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi siswa untuk memiliki rasa toleransi dan saling menghormati satu sama lainnya. Dengan keberagamannya, sekolah ini menanamkan toleransi melalui berbagai kegiatan kesiswaan, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan kesiswaan lainnya yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Dengan banyaknya kegiatan kesiswaan ini diharapkan mampu melatih jiwa kepemimpinan dan memupuk nilai-nilai karakter yang diharapkan oleh sekolah. Lulusan SMA Negeri 1 Makasar banyak tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di dalam maupun luar negeri. Tahun 2017 dua pelajar dari SMA Negeri 1 Makassar menorehkan prestasi pada Kejuaraan

Karate Do Gojukai Internasional 7th Gojukai Global Championship 2017 di Kanada. Menurut wakil kepala sekolah bidang kurikulum ibu Arum Dwi Tjondrowati menuturkan bahwa harapannya terhadap pendidikan kedepan perlu adanya dari sekolah dapat meningkatkan kompetensi guru / staf tata usaha, meningkatkan / melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, berbagai upaya telah dilakukan seperti penataan ruang kelas, optimalisasi perpustakaan dan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan MGMP dan pelatihan-pelatihan lainnya. □

MEMBANGUN KEMANDIRIAN BERDASARKAN IMTAQ

Meski mengalami masa-masa sulit di awal pendiriannya, kini SMAN 1 Palembang mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang pada mulanya bernama Sekolah Menengah Atas B yang didirikan pada tanggal 10 Mei 1950 dengan tenaga pengajar pada saat itu sebanyak 6 orang. Sedangkan siswa-siswanya berasal dari SMA Bengkulu yang sudah dibubarkan. Adapun gedung SMA Negeri 1 Palembang pada mulanya di gedung SMO, kemudian pindah menumpang untuk beberapa bulan di gedung SGA yang terletak di Jalan Indrapura, selanjutnya pada Oktober 1951 pindah lagi ke sekolah rakyat di lorong Pagaram sampai tahun 1955.

Pada tahun-tahun permulaan berdirinya SMA B Negeri Palembang, sekolah ini menghadapi banyak kesulitan. Sejumlah masalah yang dihadapi, antara lain masalah gedung yang selalu berpindah-pindah, sehingga secara psikologis kurang menguntungkan, murid-murid SMA merasa kurang mendapat penghargaan dari pemerintah/masyarakat sehingga mereka merasa rendah diri. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar disebabkan standar hidup sangat tinggi di daerah ini dan tidak adanya perumahan bagi para guru, sehingga para guru yang berasal dari luar Sumatera Selatan enggan pindah mengajar di Palembang. Sebagai akibatnya maka putera-puteri daerah ini pada waktu itu lebih senang bersekolah di pulau Jawa, karena biaya hidup di Jawa jauh lebih ringan dari biaya hidup di Palembang.

Namun kini, SMA Negeri 1 Palembang merupakan SMA yang banyak dituju oleh masyarakat. Terletak di Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, SMA Negeri 1 Palembang telah mendapatkan pengakuan sebagai sekolah unggulan dan merupakan SMA Negeri tertua di kota Palembang.



Bangunan SMAN 1 Palembang saat ini

Pada saat ini, menurut Dra. Yanna Sanova, M.Pd selaku Kepala Sekolah, SMA Negeri 1 Palembang memiliki jumlah 1.411 peserta didik dan 42 rombongan belajar, serta 95 orang guru, dan kurikulum yang diterapkan pada saat ini adalah kurikulum 2013. Dengan mengusung visi “Mewujudkan sekolah yang berprestasi dalam bidang akademik, Iptek, Olahraga, Seni dan Budaya yang mandiri berdasarkan IMTAQ”. Mewujudkan hal itu tentunya tidak mudah. Berbagai upaya terus dilakukan guna menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten sesuai tujuan pendidikan.

Pada tahun ini SMA Negeri 1 Palembang akan menjadi satu-satunya SMA model tingkat nasional yang ada di Sumatera Selatan. Bahkan untuk mendukung status tersebut kini SMAN 1 Palembang tengah melengkapi semua syarat dan fasilitas sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan status sebagai sekolah tertua di Sumatera selatan dan sekolah model tingkat nasional, SMA 1 Palembang akan menjadi model acuan semua sistem dan kerangka pendidikan tingkat SMA bagi seluruh sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Bahkan berbagai sekolah yang berasal dari provinsi lain pun akan bersusah payah study banding ke SMA 1 Palembang untuk menimba ilmu dalam hal pengelolaan sekolah yang berkualitas.

Adapun prestasi sekolah selama ini antara lain Sekolah adiwiyata nasional 2016, Sekolah sehat tingkat nasional 2017, Paskibraka nasional 2017 putra dan putri, Juara 2 Devisi militer tingkat nasional Drumband.

Mengelola SMA di Masa Kini

Menjadi sekolah tertua tentunya memiliki tantangan tersendiri saat ini, salah satunya sekolah harus mampu menyiapkan siswa-siswi yang unggul di bidang akademik dan non akademik, sekolah ini juga sering melakukan studi banding unjungan ke luar negeri, semntara untuk meraih prestasi di ajang olimpiade sekolah mengadakan pembinaan olimpiade bekerjasama dengan ITB, UI, Brawijaya, dan Universitas Surabaya. Dan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi siswa dalam berbahasa asing, sekolah ini juga mengadakan kerja sama dengan pihak luar.

Persebaran lulusan sekolah ini cukup menggembirakan sekitar 50% lulusan masuk ke perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan, bahkan diantara mereka ada yang meneruskan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi hingga ke luar negeri

Mengelola sebuah sekolah apa lagi sekolah tertua tentunya bukanlah hal yang mudah ada tantangan dan hambatan yang dihadapi selama prosesnya. Tak terkecuali bagi SMAN 1 Palembang dalam menghasilkan para generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selain itu, ditambah dengan semakin ketatnya persaingan antara satu sekolah dan sekolah lainnya memicu semangat SMAN 1 Palembang Pekanbaru untuk lebih memberikan pelayanan dan pendidikan terbaik bagi para peserta didiknya. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi guru sekoalah mengadakan workshop pada awal tahun ajaran baru, mengadakan pelatihan guru Pembina olimpiade, mengikutsertakan siswa dan guru dalam seminar dan workshop baik di dalam maupun diluar Provinsi juga mengaktifkan MGMP. dan untuk pengawasan sekolah ini melakukan Evaluasi diri (EDS) dan audit internal. □

SMA NEGERI 1 MEDAN

DISIPLIN PENUH PRESTASI

Berdiri pada tahun 1950, SMAN 1 Medan, bersama SMA lain di berbagai kota besar, termasuk salah satu dengan predikat SMA Teladan.

SMAN 1 Medan menjadi SMA tertua di Provinsi Sumatera Utara. Dirintis pada 18 Agustus - 1 September 1950, awalnya berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 1 Medan. Sebelum menempati lokasi Jalan Teuku Cik Dik Tiro No. 1 Medan, SMAN 1 (Smansa) pernah berubah menjadi SMA darurat yang berlokasi di Jalan Seram Biru pada masa agresi Belanda. SMA Negeri 1 Medan juga pernah disebut sebagai SMA Teladan pada 1954. Saat itu, Kepala Urusan Pendidikan SMA Depdibud menugaskan beberapa SMA Negeri terpilih untuk mengadakan kurikulum baru.

Sekolah-sekolah ini kemudian disebut sebagai SMA Teladan di masing-



Bangunan SMA N 1 Medan



Kegiatan pembelajaran peserta didik SMAN 1 Medan

masing kota tersebut. Didasari oleh SK Mendikbud nomor 12807/a/c pada tanggal 18 Desember 1957, beberapa SMA Teladan berdiri di Jakarta, Medan, Surabaya, Bukit Tinggi, dan Yogyakarta. SMA Teladan sendiri terdiri menjadi tiga bagian. Bagian A bermaterikan Sastra Budaya, bagian B mengajarkan Ilmu Pasti, dan bagian C bermaterikan Sosial Ekonomi. SMA teladan sendiri terdiri menjadi tiga bagian, bagian A bermaterikan Sastra Budaya, bagian B mengajarkan Ilmu Pasti, dan bagian C bermaterikan Sosial Ekonomi.

Lalu, proyek SMA Teladan diterapkan di seluruh Indonesia. Sehingga karena kurikulum baru sudah digunakan di seluruh SMA, maka SMA Teladan Medan berubah lagi menjadi SMA Negeri 1 Medan. Di era reformasi, sekolah ini sempat berubah menjadi SMU Negeri 1 Medan seiring perubahan nama Sekolah Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Umum di seluruh Indonesia. Kini, sekolah ini kembali disebut sebagai SMA Negeri 1 Medan (Smansa Medan). Meski beberapa kali berganti nama, Smansa Medan tetap konsisten menerapkan disiplin yang tegas dalam menjalankan pengajaran dan pendidikan. Tradisi ini dijalankan sejak Rondang M. Simanjuntak menjabat sebagai Direktur Sekolah sejak tahun 1950 hingga 1960 dan terus terjaga hingga kini. Saat bel mulai sekolah berbunyi, siswa yang terlambat datang dan berdiri di depan gerbang kaca sekolah tidak bakal diijinkan masuk.

Sejak berdiri, Smansa Medan juga menerapkan pembauran inklusif. Murid dan guru, serta kepala sekolah, berasal dari berbagai etnis: Aceh, Batak, Bugis, Jawa, India, Melayu, Nias, Sunda, Tionghoa, dan lain-lain. Cermin dari kota Medan yang juga heterogen serta menjunjung tinggi keberagaman. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama. Siswa atau guru dari etnis yang sama tetap menggunakan Bahasa Indonesia dalam pergaulan. Selain keberagaman etnis, sekolah ini juga terkenal dengan keberagaman agama: mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Smansa Medan dikenal karena memberikan kebebasan menghidupkan toleransi kegiatan siswa dengan agama berbeda: mulai dari aktivitas perkumpulan siswa Islam hingga paduan suara siswa Nasrani, masing-masing memiliki prestasi.

Prestasi Akademik dan Kreativitas

Dengan usia yang matang, SMAN 1 Medan dikenal banyak melahirkan tokoh nasional maupun regional. Mulai dari ketua lembaga tinggi negara, menteri, senator DPD, anggota DPR, gubernur, pangdam, rektor, pemimpin partai politik. Banyak alumni Smansa Medan sukses sebagai pengusaha, politisi, pendidik, ilmuwan, sutradara film, fotografer, aktor, penyanyi, hingga musisi. Alumni-alumni SMAN 1 tersebut antara lain Anwar Nasution (alumnus Harvard University, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI 2004-2009, angkatan SMAN 1 Medan tahun 1961) dan Jusman Syafii Djamal (alumnus ITB, Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2007-2009, angkatan SMAN 1 Medan tahun 1972) serta Edy Rahmayadi, Pangkostrad TNI AD saat ini.

Dengan moto CERDAS yang berarti "*Creative, Educative, Rasional, Discipline, Asa dan Spirit*" SMAN 1 Medan juga memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan prestasi akademik yang unggul. Pada 2014 misalnya, nilai UN tertinggi se-Sumatera (peringkat 9 se-Indonesia) untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diraih oleh siswi Smansa Medan, Fitra Febrina. Sekolah ini banyak memenangi berbagai olimpiade atau kejuaraan di bidang sains dan bahasa serta olahraga. Dengan seleksi penerimaan siswa Smansa Medan bersifat eksklusif berdasarkan tolok ukur nilai akademik. "Kami memiliki kelas khusus olimpiade yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa," kata Sabar, MSi, wakil kepala sekolah Smansa Medan saat diwawancarai.

Didorong animo para pendaftar yang pada umumnya memiliki nilai aka-

demik tinggi, Smansa Medan memperoleh siswa dengan persaingan nilai yang ketat dan kompetitif. Dengan komposisi siswa pilihan terbaik, Smansa Medan memiliki tradisi menghasilkan lulusan yang diterima di berbagai kampus terbaik di Indonesia (UI, ITB, ITS, UGM, IPB, UNPAD, USU, UNDIP, dll) dan berbagai perguruan tinggi terbaik luar negeri (Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, dan lain-lain). Selain itu, lulusan Smansa Medan juga banyak berhasil melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan militer (Akmil, AAU, AAL, Akpol).

Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Medan ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Sejak tahun 2013, sekolah ini memakai Kurikulum 2013 untuk kelas X dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk kelas XI dan XII. Sejak tahun 2000-an, Smansa Medan dikenal keberhasilannya dalam penyelarasan disiplin pendidikan yang ketat serta kelonggaran memacu kreativitas di bidang kesenian.

Smansa Medan juga dikenal memiliki jejak unik dalam melahirkan siswa-siswi kreatif yang berbakat di bidang kesenian, seperti musik, drama, tari dan sebagainya. Hal ini didukung pula oleh beragamnya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, antara lain OSIS, Badan Kemakmuran Mesjid Ibnu Sina SMAN 1 (BAKMISS), PA Bukit Sion (PABS), KSSK St. Aloysius Gonzaga, Paduan Suara Sola Gratia, Paskhaskibra, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Social Study Club (S2C) ICT-One Community, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Ekstrakurikuler Jurnalistik dan Sastra (EJS), English Club, Olahraga Prestasi (OP), Karate Dojo Smansa, Sanggar Seni Smansa (SSS), Cinematography of Smansa (CITOS), Teater Rawit Smansa, Radio Sekolah (RASE), dan Marching Band Bahana Suara Smansa (MBBSS).

Kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di SMAN 1 Medan telah membuktikan kualitasnya melalui berbagai kompetisi baik di tingkat regional maupun nasional, dan jarang kembali dengan tangan kosong. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya koleksi piala yang terpampang di lobby sekolah ini. Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 1 Medan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. Suasana belajar juga didukung dengan program "On Green" yang membuat sekolah ini menjadi lebih asri dan nyaman. □

SMAN 1 BANDAR LAMPUNG

BERMULA DARI PENDIDIKAN RAKYAT

Cikal bakal SMAN 1 Bandar Lampung adalah Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) yang ada di Kota Tanjung Karang. YPR telah hadir melayani masyarakat pada tahun 1950 yang kemudian berubah hingga kini menjadi SMAN 1 Bandar Lampung.

Pada tahun 1950, di Kota Tanjung Karang, telah berdiri suatu Lembaga Pendidikan Swasta yang bernama Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) yang diketuai oleh Mr. Gele Haroen yang waktu itu menjabat Residen Lampung. Yayasan Pendidikan Rakyat merupakan pengelola Pendidikan Tingkat Atas di wilayah tersebut. Sebagai konsekuensi dari Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi daerah Tingkat I Lampung, maka dua kota bersebelahan, Tanjung Karang dan Teluk Betung ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Lampung dengan nama Bandar Lam-



Bangunan SMAN 1 Bandar Lampung saat ini (atas) dan sketsa rancangan tampilan bagian depan setelah revitalisasi melalui bantuan pemerintah (kanan).

pung. Sekolah tingkat atas YPR itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya SMA ABC yang kemudian berubah menjadi SMA Tanjung Karang dan kini dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

Alhasil SMAN 1 Bandar Lampung merupakan yang tertua di Provinsi Lampung. Sekolah ini terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Pahoman Bandar Lampung. Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung pada tahun 2004, menetapkan SMAN 1 Bandar Lampung memiliki nomor sekolah dengan NSS : 301126005001.

Sudah banyak tokoh lulusan SMAN 1 Bandar Lampung yang berkiprah di form nasional atau di Lampung. Di antaranya tokoh nasional seperti Bagir Manan yang pernah menjabat ketua Mahkamah Agung, menteri kesehatan Nila Moeloek, dan banyak lagi tokoh Lampung seperti Herman HN.

Sekolah berikutnya yang didirikan di Lampung, setelah SMAN 1 Bandar Lampung adalah SMAN 2 Bandar Lampung yang didirikan pada tahun 1965 oleh guru-guru SMAN 1 Bandar Lampung (ketika itu masih bernama SMA Tanjung Karang) dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) sebagai pengembangan SMA Negeri 1 Tanjung Karang yang pada waktu itu merupakan satu-satunya SMA Negeri di kawasan Tanjung Karang Teluk Betung. SMA N 2 Bandar Lampung sebelumnya adalah SMA dengan nomor 308. Sayangnya perlu penelusuran kembali, SMAN 1 Bandar Lam-





Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah

pung sendiri dulunya SMA dengan urutan ke berapa secara nasional.

Dengan Visi, "Menjadi Sekolah yang Bertaqwa, Terampil, dan Bermutu menuju Prestasi", SMAN 1 Bandar Lampung terus membenahi diri. Salah satunya adalah penataan bangunan sekolah yang sudah tua. Bagian depan bangunan tengah dirombak total. "Kami mendapat bantuan Revitalisasi atau renovasi dari Direktorat, sehingga tahun ini kami harapkan bagian depan sekolah sudah lebih baik," ujar Triyatmo, kepala SMAN 1 Bandar Lampung.

Berdiri di atas lahan seluas 5.525 m², pembangunan sekolah memang harus ditata lebih rapi dan vertikal. Sehingga penataan lingkungan akan lebih baik. "Hal itulah yang terus kami upayakan agar lingkungan sekolah lebih nyaman," ujar Triyatmo. Saat ini, jumlah siswa SMA N Bandar Lampung sebanyak 826 siswa dengan jumlah rombel 23 yang diasuh oleh 53 orang guru. □

BERJUANG UNTUK PEMERTAAN PENDIDIKAN

Berdiri pada tahun 1953, SMAN 1 Samarinda merupakan SMA pertama di Kalimantan Timur. Semua elemen masyarakat berpadu mewujudkan sekolah guna meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Timur.

Salah satu prasyarat berdirinya provinsi adalah keberadaan SMA. Sebelum tahun 1953 lulusan SMP di Kalimantan Timur tidak bisa melanjutkan studinya karena tidak ada SMA di wilayah tersebut. Memang, bagi yang mampu biasanya mereka akan bersekolah di Jawa, sementara yang tidak mampu berhenti hingga tingkat SMP saja. Para tokoh Kalimantan Timur berpikir keras bagaimana mewujudkan SMA agar sumber daya manusia yang sudah lulus SMP bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tim perumus akhirnya terbentuk untuk mewujudkan SMA di Samarinda termasuk menentukan daerah mana yang cocok, pengelola, pengajar,



Bangunan SMA N 1 Samarinda saat ini



Murid dan guru berpose di depan asrama, tahun 1955

dan sebagainya. Tim perumus ini terdiri dari Achmad Yusuf sebagai Ketua dari unsur partai politik (Masyumi), Enci Burhan sebagai Sekretaris dari unsur pemerintahan, Enci Abdurahim sebagai Bendahara dari unsur pemerintahan, Aji Bambang Abdul Malik sebagai anggota dari Kepala Dinas PDK, dan Azis Samad sebagai anggota dari unsur partai politik (PNI). Salah satu unsur pendidik adalah Mardikun, Direktur SMP.

Setelah melalui perjuangan panjang melewati berbagai rintangan dan tantangan, maka pada tanggal 14 September 1953, resmiah berdiri sebuah SMA partikelir dengan menggunakan gedung bekas asrama pelajar yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri Samarinda. Pada awal berdirinya, SMA ini hanya memiliki kelas I bagian A yang dipimpin direktur bantuan dari SMP yaitu Mardikun yang merangkap sebagai Direktur SMP, dengan waktu belajar terpaksa dilaksanakan sore hari.

Setelah 3 tahun berjalan, SMA partikelir yang berada dibawah Yayasan Dharma Bhakti ini, statusnya berubah menjadi SMA Negeri sesuai surat bernomor: 30/JSP/55 tanggal 11 Juni 1955 yang diresmikan oleh Residen Koordinator Kalimantan Timur Datu Maju Urang, Dalam usianya yang relatif muda, SMA Samarinda ini pada lulusan yang pertama mencapai 90%, sehingga Pemerintah Daerah dengan bangga memberikan penghargaan berupa beasiswa ikatan dinas yang pada waktunya harus kembali ke Kalimantan Timur untuk mengabdikan diri demi kemajuan daerah.

Pada tahun 1960 SMA Samarinda membuka kelas filial di Tarakan. Kelas di Tarakan ini lepas dari SMA Samarinda berdasarkan Surat Keputusan



Suasana pembelajaran di SMAN 1 Samarinda saat ini

Menteri P & K tanggal 30 Juli 1964 nomor: 79/SK/III dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1964 menjadi SMA Negara yang berdiri sendiri baik secara organisatoris, administratif maupun di bidang teknik kependidikan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum tanggal 30 Juli 1965 nomor: 18/Dirpu/1965, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965, SMA Negara di Tarakan ini resmi menjadi SMA Negeri Tarakan.

SMA Samarinda yang kini disebut sebagai SMAN 1 Samarinda pernah dipimpin kepala sekolah asing yaitu Van der Wil menggantikan Mardi-kun atau menjadi kepala sekolah kedua dari SMAN 1 Samarinda. Saat ini SMAN 1 Samarinda telah berpindah dari Jalan Melati/Jalan Bhayangkara karena digusur menjadi taman kota Samarendah dan menempati gedung baru seluas 5 hektar di Jl. Drs. H. Anang Hasyim. Kini Kepala Sekolah dipecaayakan kepada Budiono. Menurut Kepala Sekolah Budiono, SMAN 1 Samarinda masih menerapkan kurikulum KTSP. "melalui visi: "Berwasan Global, Mandiri, Demokratis dan Sejahtera, kami berharap dengan menempuh pendidikan di sini, siswa dapat semakin cerdas baik fisik, intelektual, emosi, mental, moral, sosial dan cerdas religi."

Dengan jumlah siswa 1.038 yang terbagi dalam 30 rombongan belajar dan 51 guru, SMAN 1 Samarinda masih berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi yang dapat membanggakan sekolah. Prestasi yang sudah diraih di antaranya di bidang pendidikan bahasa, melalui lomba debat dalam Bahasa Inggris dan prestasi di bidang seni, dengan menjuarai lomba membaca puisi. □

SEKOLAH YANG BERKARAKTER CERDAS DAN KUAT

Usia SMAN 1 Ambon lebih dari enam dasawarsa. Kini bangunan berlantai tiga dan nampak diwarnai dengan aplikasi teknologi masa kini dalam pengelolaannya.

Memasuki halaman sekolah tampak lapangan basket dilengkapi dengan tribun penonton di salah satu bagian belakang ring basket, terlihat siswa yang duduk-duduk di tribun penonton serta beberapa kelompok peserta didik hilir mudik dengan membawa tas berpindah ruangan dari ruang satu keruang yang lainnya, hal itu dikarenakan keterbatasan ruang belajar maka SMA Negeri 1 Ambon menerapkan pembelajaran Moving Class seperti halnya di perguruan tinggi.

SMA Negeri 1 Ambon merupakan salah satu SMA tertua di Provinsi Maluku. Hadirnya SMA Negeri 1 Ambon di Provinsi Maluku merupakan wujud usaha dan perjuangan anak daerah Maluku. Pada tahun 1953 berdiri sebuah SMA yang merupakan peralihan dari AMS (Algemene Middelbare



Papan nama sekolah SMAN 1 Ambon

School) peninggalan kolonia Belanda yang berlokasi di Jalan Pattimura. Sekolah ini dipimpin oleh M.A. Risakotta. Pada tahun 1955 sekolah ini dipimpin oleh C. Pieter dan membuka program/jurusan B (Ilmu Bumi dan IPA). Tahun 1957 Sekolah ini membuka dan melaksanakan 3 program/jurusan yaitu Jurusan A (Bahasa dan Budaya), Jurusan B (Ilmu Bumi dan IPA), Jurusan C (IPS).

Dalam perjalanannya dan perkembangannya pada tahun 1958 SMA ini terbagi menjadi 2 yaitu SMA Negeri 1 Ambon melayani jurusan A dan B yang di pimpin oleh C. Pieter, serta SMA Negeri 2 Ambon melayani jurusan C yang dipimpin oleh J.P. Pattikawa. Perkembangan pendidikan nasional terus maju dan berimbas sampai pada daerah Maluku dan program A dan B saja tapi juga program C. Pada tahun 1965 Bpk. C. Pieter diangkat menjadi kepala inspeksi SMA daerah Maluku, sehingga pimpinan SMA Negeri 1 Ambon diserahkan kepada Ibu. F. Latumaerissa yang adalah seorang Guru Ilmu Pasti pada sekolah tersebut. Di masa kepemimpinannya terjadi pergantian sistim Pendidikan dan Kurikulum berubah. Dalam sistim pendidikan itu di bedakan adanya jurusan IPA, Jurusan IPS dan Jurusan Bahasa. Pada tahun 1986 melalui prakarsa di pihak alumni dan sekolah terbentuk apa yang disebut IKASMANSA (ikatan alumni SMA Negeri 1 Ambon atau ikatan alumni SMASA). Peranan dan partisipasi alumni (IKASMANSA) dibawah pimpinan Ibu Senda Titaley atau Pupella sangat besar dalam membangun dan meningkatkan mutu SMA 1 begitu pula persatuan alumni SMA Negeri 1 Ambon di Jakarta.

Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 SMA Negeri 1 Ambon menjadi Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM) atau sekolah Rintisan Standar Nasional (RSN), dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Untuk memenuhi standar tersebut maka SMA Negeri 1 Ambon berbenah diri dari berbagai aspek mulai dari sarana prasarana sampai dengan SDM nya. Untuk sarana prasarana SMA Negeri 1 Ambon telah memiliki laboratorium komputer, laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi), Laboratorium Bahasa, Perpustakaan, Ruang Seni dan Olahraga. Sedangkan untuk SDM semua guru dan TU telah menguasai ICT serta tercatat lebih dari 15 orang guru telah menyelesaikan Pendidikan S2. Pada tahun 2012 SMA Negeri 1 Ambon ditetapkan sebagai Sekolah Rintisan Kurikulum 2013 hingga sekarang.

Saat ini SMA Negeri 1 Ambon kini memiliki 902 peserta didik dengan 24 rombongan belajar, dan jumlah pendidik 61 orang. Jurusan yang dilayani adalah IPA, IPS dan Bahasa. Mengusung visi, "Sebagai sekolah yang



Bangunan SMAN 1 Ambon saat ini

berkarakter kuat dan cerdas,” SMA Negeri 1 Ambon terus berupaya meningkatkan mutu Pendidikan melalui berbagai macam program unggulan.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Ambon “kami melakukan upaya-upaya diberbagai aspek mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didiknya dengan terlibat dalam berbagai event seperti melibatkan guru mengikuti IHT, Workshop, pemberian dana stimulus bagi guru yang melanjutkan Pendidikan S-2”, Ujar C. Mustamu Kepala SMA Negeri 1 Ambon.

Salah satu program unggulan dari SMA Negeri 1 Ambon dalam bentuk kerjasama dengan Jerman pada program PASH Olimpiade Sains. Melalui program tersebut ada beberapa lulusan yang melanjutkan studi ke perguruan ternama baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai salah satu sekolah tertua di Provinsi Maluku, SMA Negeri 1 Ambon mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain perijinan dan akses informasi yang didapatkan, ada beberapa bentuk dukungan dari pemerintah berupa pemberian dana bantuan BOSNAS dan BOSDA untuk penyelenggaraan pendidikan serta bantuan sarana prasarana sekolah. Selain itu terdapat perbaikan system Pendidikan, perubahan kurikulum yang di buat untuk menjawab tantangan abad 21. Kedepan dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan inovasi, dan kerja keras dari semua unsur untuk meningkatkan mutu Pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, dan mampu bersaing secara global. □

CIKAL BAKAL SMA NEGERI DI KARISIDENAN BANTEN

Berawal dari keprihatinan orang tua yang harus mengirim anaknya ke kota lain untuk bersekolah, sejumlah tokoh menginisiasi pendirian SMA Negeri 1 Serang pada tahun 1954. Sekolah tua ini pun menjadi kebanggaan kota Serang karena banyak mengukir prestasi.

SMA Negeri 1 Kota Serang memiliki sejarah yang cukup panjang dan berbekas. Diusianya yang semakin tua, sekolah ini menjadi saksi sejarah kehidupan sekaligus kebanggaan warga. Karena kehadirannya menjadi cikal bakal adanya SMA negeri di wilayah karisidenan Banten yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang yang sekarang telah menjadi Provinsi Banten. Pada saat itu, di tahun 1954 ada sejumlah tokoh daerah yang dimotori oleh H. Sadeli Hasan (Ketua DPRD Tingkat II Serang), K.H. Ali Misri bersama kawan-kawan seperti Sukarwan, Kepala Jawatan Perdagangan Serang, Kusendi Jaya, pegawai Residen, Mangoen, Kepala Seksi Ekonomi PEMDA Serang serta Sutikno, Kepala PU Kabupaten Serang yang bermufakat untuk mendirikan SMA negeri.

Persoalan mendasar adalah tidak tertampungnya lulusan SMP yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal banyak di antara mereka bisa jadi merupakan siswa berprestasi. Sementara bagi orang tua dengan latar belakang ekonomi kuat, hal ini tidak menjadi masalah karena mereka dapat menyekolahkan anaknya di kota lain, seperti Jakarta.

Berangkat dari semangat mencerdaskan anak bangsa, sejumlah tokoh tersebut berhasil mewujudkan gagasannya dengan membuka SMA Negeri 1 Serang. Karena pada saat itu belum memiliki gedung, maka untuk sementara para siswa menempati bangunan MAKOREN 064 Maulana Yusuf Serang dan untuk pertama kalinya diangkat M. Ratim sebagai Kepala Sekolah sampai akhir tahun 1956. Bertepatan dengan penggantian Kepala Sekolah dari M. Ratim kepada



Kepala Sekolah beserta pendidik SMAN 1 Kota Serang

Tb. Zakaria pada tahun 1957, gedung SMA pun berpindah ke tempat gedung peninggalan Cina di Jl. Merdeka No. 31 (sekarang berubah menjadi Jl. Jend. A Yani No. 39) Serang. Sementara staf pengajarnya, menurut penjelasan Agus Dahyar, guru senior yang juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, adalah para pejabat di lingkungan legislatif dan eksekutif. "Karena saat itu masih jarang lulusan sarjana atau sarjana muda di bidang pendidikan," katanya. Sejalan dengan perkembangannya, kemudian pemerintah mulai merekrut dan menempatkan guru-guru negeri di SMAN 1 Kota Serang.

Selaras dengan perkembangan SMAN 1 Kota Serang, jabatan kepala sekolah silih berganti. Kini jabatan kepala sekolah diisi oleh H. Asep Djoko Sampurno. Setiap kepala sekolah tentu memiliki gaya manajemen tersendiri. Namun siapapun pejabatnya, semua memiliki tujuan yang sama, membawa SMAN 1 Kota Serang menjadi sekolah yang berkualitas dan berkarakter. Terbukti dalam setiap kurun waktu, sekolah ini mencatat sejarah yang terus dikenang. Pada dasawarsa 70-an, misalnya, sekolah ini dikenal dengan prestasi drumbandnya.

Tidak heran, jika piala dan piagam-piagam penghargaan dari berbagai instansi berdatangan. Kemudian saat Hidayat Husein menjabat sebagai kepala sekolah ke-6, dicanangkan misi, yakni : tahun ajaran 1985/1986 adalah tahun peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Serang dalam rangka pencapaian NEM yang lebih baik. Langkah ini nyatanya membuah hasil. Terbukti ditahun berikutnya, yakni tahun 1987 SMAN 1 Kota Serang telah merebut 44 kursi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) dan mendudukkan Sekolah ini sebagai peringkat ke-6 SMA negeri terbaik se-Jawa Barat. Tahun berikutnya sekolah ini terus kebanjiran peminat sementara ruang kelas terbatas. Kemudian pada era Zeinuddin Zey memimpin sekolah ini (1997-2002), dilakukan penataan fisik bangunan dengan penambahan gedung tingkat di bagian belakang sekolah.

Peningkatan Mutu dan Peningkatan Akhlak Mulia

Menurut H. Asep Djoko Sampurno, Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Serang, ada sisi positif yang dapat diambil yakni siapapun pimpinannya, semua unsur sekolah berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu sekolah bersejarah ini. Kemudian sekolah ini pun mendapat kepercayaan untuk menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada tahun 2008. Setelah program ini dihentikan dan diganti dengan peraturan daerah, manajemen sekolah pun mengikutinya. Seleksi siswa diperketat, dengan melalui tes dan menyertakan nilai raport di SMP selama 5 semester terakhir. "Kami ingin sekolah ini dapat terus mempertahankan mutu pendidikan. Untuk mencapai ke arah sana, saya memberi kebebasan penuh kepada guru-guru untuk mengembangkan model-model pembelajaran," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Serang.

Untuk peningkatan mutu guru, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Agus Dahyar, mengatakan bahwa sekolah memberi kesempatan kepada

guru mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka membuat inovasi lain dalam implementasi kurikulum yang berbasis karakter. Selain itu ada juga kegiatan pendalaman materi, workshop dan teacher teaching, yaitu kegiatan saling berbagi ilmu serta pengalaman di antara sesama guru. Sementara dari sisi siswa, sekolah menerapkan disiplin ketat yang berkaitan dengan pembiasaan sikap baik soal kehadiran tepat waktu maupun dalam kegiatan pembinaan karakter. Setiap pagi siswa kami haruskan membaca Alqur'an sebelum memulai pelajaran di sambung dengan literasi selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada siswa membaca materi mata pelajaran.

Melalui visi: Menjadi SMA Yang Mampu Berprestasi Dalam Persaingan Global, Sekolah SMAN 1 Kota Serang yang memiliki 40 rombel dengan jumlah siswa 1.798 dan 90 tenaga guru, manajemen sekolah terus berbenah dan ingin menjaga amanah para orang tua yang mempercayakan pendidikan putra putrinya di sekolah ini agar mereka dapat berprestasi dan kelak dapat diterima di perguruan tinggi sesuai harapan. Nyatanya, sederet lambang prestasi pun menghiasi lemari sekolah. Mulai dari prestasi di ajang olimpiade sains nasional tingkat provinsi, lomba debat Ba-



Bangunan SMAN 1 Kota Serang

MEMBANGUN GENERASI HEBAT DI JAMBI

Di pusat kota, tepatnya di Jln Jenderal Urip Sumoharjo No. 15 Telanapura, Kota Jambi, kita bisa menemukan sekolah tertua di kota ini. Inilah SMAN 1 Kota Jambi.

Sekolah ini semula didirikan oleh Yayasan Sembilan Lurah, dengan nama SMA Sembilan Lurah tahun 1955. Salah satu pendiri yayasan adalah Sudarsono, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jambi. Hanya setahun, sekolah itu berstatus sebagai sekolah swasta. Tahun 1956, SMA Sembilan Lurah diserahkan kepada pemerintah daerah. Akhirnya menjadi SMA Negeri 1 Kota Jambi. Kepala sekolah pertama Amir Rajab, sebelum digantikan Asri Mulyo di tahun 1957. Di awal tahun berdirinya, sekolah hanya memiliki lima ruang belajar. "Dua kelas di pinggir jalan, tiga kelas di belakang," kenang Yushar Mahmud, mantan Kepala Sekolah SMA 1 Kota Jambi Tahun 1988-1995.



Bangunan SMA Negeri 1 Kota Jambi



Salah satu sudut bangunan SMAN 1 Jambi

Yushar yang masa kecilnya tinggal dekat dengan sekolah tersebut, masih ingat kondisi gedung sekolah. "Buruk nian gedungnya," kenang Yushar. Bangunan sangat sederhana. Tidak semua tembok, hanya setengah yang disemen, bagian atas dengan papan. Lantainya pun hanya tanah. Belum diubin, apalagi keramik. Meski bangunan bukan modern, namun sekolah ini langsung menjadi favorit di Jambi. Anak-anak pejabat dan tokoh di kota itu hampir semua sekolah di situ. Pada tahun 1956, selain SMAN 1 ada juga sekolah SMA Xaverius.

Di masa awal ini, tidak banyak yang bisa dikenang. Sekarang sudah tidak ada sisa-sisa peninggalan gedung era pertama, karena sudah diruntuhkan. Diganti dengan gedung yang baru. Bahkan, asal usul tanah pun sekarang sumir. Tidak ada bukti kepemilikan tanah yang kuat. Di belakang sekolah, di awal tahun 70-an ada beberapa bangunan yang dipakai untuk asrama guru.

Bagian sekolah sampai sekarang seperti terbagi dua. Bagian depan dan belakang. Nah, bagian belakang ini dulu ada rumah milik seorang petani, asal Jawa yang mukim di sana. Yushar tidak ingat kapan pertama kali sekolah mengalami perombakan. Yang dia ingat, saat dia menjadi kepala sekolah, jumlah kelasnya sudah lebih banyak. Dan, di era Yushar ada penambahan cukup banyak.

Halaman dan rumah milik orang Jawa, Djodi Kromo dan asrama guru akhirnya dirubuhkan dan dibangun gedung baru. Kala itu, Yushar mendapatkan bantuan untuk membangun sekolah sebesar Rp 10 juta tahun 1988. Uang itu, di tahun tersebut masih cukup bernilai. "Saya serahkan uang itu ke Korem," kata Yushar. Kantor Korem memang bersebarangan dengan SMA 1 Kota Jambi. "Akhirnya yang membangun sekolah Korem," kata Yushar. Gedung yang dibangun di bagian belakang, setelah lapangan dan posisi agak di bawah. Dari mana dana untuk membangun? Dana untuk membangun gedung dari Dinas Pendidikan Propinsi. Hanya saja, pelaksanaannya pihak lain.

Di era Yushar ini, SMA 1 sudah mampu menampung 800 siswa. Jadi, jumlah ruang belajar tidak jauh berbeda dengan sekarang, yakni 1.100 siswa di tampung di 29 ruang belajar. Yushar ingat betul di masa dia memimpin, SMA 1 menjadi sekolah favorit masyarakat Jambi menyekolahkan anak. "Saya pilih anak-anak yang terbaik, guru-guru yang terbaik," katanya. Bahkan, dia hanya mau menerima guru dari lulusan perguruan tinggi ternama, yang jelas kualitasnya. "Dengan cara begitu, anak-anak jadi hebat. Siswa teladan pasti dari SMA 1," ujarnya mengenang.

Untuk mengejar prestasi, Yushar dulu mewajibkan guru memberikan pelajaran tambahan kepada semua siswa. Hasilnya, semua siswa terbaik ada di SMA 1. Anak-anak tidak diwajibkan bayar tertentu, hanya seihlasnya. "Kami kasih ke Bapak, Beliau gak mau terima. Katanya, 'kalian yang kerja ya buat kalian,'" kata Suwanto mengingat. Jadi, kesejahteraan guru pun lumayan ada tambahan, tanpa harus campur tangan kepala sekolah.

Yushar yang hanya lulus SGA dan Sekiolah Guru A, nyatanya bisa mengembangkan SMA 1 menjadi sekolah yang disegani. Dan, Yushar mengaku, di era dia memimpin banyak yang diterina di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Salah satu siswa teladan Nasional yang dikenangnya, adalah Maria Iklima. Selain dia, ada tiga siswa lagi yang pernah mendapat juara serupa. "Kuncinya, siswa pilihan, guru pilihan," katanya.

SMA 1 sekarang ini memiliki 55 tenaga pengajar, dan 1.100 siswa. Sekolah ini sudah modern, Laboratorium Biologi, Kimia, Komputer sudah ada. Visi sekolah ini ingin menjadi sekolah unggul yang berbasis sains dan teknologi, menghasilkan lulusan yang berprestasi, berkarakter dan berwawasan. Prestasi SMA 1 juga bagus. Misalnya, mereka baru saja menjuarai Lomba Cerdas Cermat tingkat Propinsi. Menang lomba parlemen tingkat propinsi, dan bahkan juara OSN bidang biologi tingkat nasional.

Di bidang Fisika, mereka juga meloloskan wakil di OSN tahun 2016 lalu.

Kepala sekolah SMA 1 Jambi Avariana MPd, tantangan yang dihadapi sekarang ini, dengan system sekolah gratis membuat kemajuan sekolah sulit berkembang. "Untuk Satpras (sarana dan prasarana) agak kurang bisa berkembang karena sekolah gratis," ujarnya.

Tantangan lainnya, adalah terjadinya penurunan kualitas lulusan SMA 1. Itu terlihat dari data yang ada, nilai rata-rata lulusan SMA 1 dalam dua tahun terakhir. Penyebabnya? Evariana mengaku tidak tahu, selain "Memang terjadi penurunan nilai di seluruh Jambi," katanya. Selain itu, tidak adanya uang yang bisa dipungut oleh Komite Sekolah, ikut punya andil menurunkan kualitas lulusan SMA. "Ya bagaimanapun, sekolah menjadi sangat terbatas dalam mengelola program," katanya.

Kurikulum juga sudah mengikuti Permen yang mengharuskan memakai kurikulum 2012. "Hambatannya, kami masih kekurangan guru saja," kata Evariana. Agar kurikulum di sekolahnya berjalan dengan baik, Evariana menugaskan guru-guru untuk mengikuti MGP, IHT, bahkan ia pun melakukan supervise dan evaluasi penerapan kurikulum. Bahkan, sekolah pun menyelenggarakan rapat kerja secara khusus membahas penerapan kurikulum dan langkah meningkatkan kualitas sekolah.

Evariana masih bangga dengan sekolahnya. Itu karena lulusan sekolah ini banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, terutama di Jambi, dan juga ada. Dalam waktu, SMA 1 belum akan melakukan pembangunan ruang kelas baru. Tetapi sedang konsentrasi memperbaiki ruang belajar yang ada agar bisa digunakan secara penuh. "Kami ingin menjadi *full day school*, menunggu renovasi selesai," ujarnya.

SMA 1 Kota Jambi juga masih terus mendapatkan tambahan kompetensi guru setiap mata pelajaran. Pihak Dinas Pendidikan Propinsi Jambi sering mengadakan pelatihan atau seminar terkait dengan kemampuan para guru. Ke depan, SMA 1 akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas para lulusannya. Salah satu caranya, dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para guru dengan intensif. Hal ini agar penurunan kualitas lulusan tidak terus terjadi.

Banyak yang berharap, agar SMA 1 Kota Jambi kembali tangguh, menjadi sekolah dengan lulusan terbaik dan menjadi favorit masyarakat Jambi. □

SMAN 1 PEKANBARU

TERTUA DI PROVINSI RIAU

SMAN 1 Pekanbaru adalah SMA tertua di Provinsi Riau. Bangunan yang dibangun tahun 1955 masih kokoh.

Lokasinya di pusat kota Pekanbaru. Dekat dengan Masjid Agung An Nur Riau. Di situlah letak SMAN 1 Pekanbaru. Tepatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 159 Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau. Sebagai SMA tertua di Pekanbaru, bangunan tua yang berada di sekolah ini tampak kokoh dan terawat dengan baik. Masih terlihat jelas ciri khas Belanda pada gedung ini. “Gedungnya juga masih dari zaman dulu, istilahnya bangunan Belanda,” ujar Wan Roswita Kepala Sekolah SMAN 1 Pekanbaru.

Bangunan yang sudah berdiri sejak 1 Januari 1955 tak tampak adanya kerusakan ataupun pengeroposan pada gedung bangunannya. “Ya betul, bahkan saking kokohnya gedung karena kualitas bangunan yang baik pada saat itu, anak-anak selalu kesulitan saat akan memaku tembok ge-



Bangunan SMAN 1 Pekanbaru



Papan nama SMAN 1 Pekanbaru

dung untuk menghias ruang kelas,” ungkap Baini Wakil Kepala sekolah bidang Kurikulum. Bangunan awal atau bangunan tua yang berada di sekolah ini hanya bangunan yang berbentuk letter U. Selebihnya merupakan bangunan baru yang dibangun seiring dengan perkembangan sekolah.

Awal mula berdirinya sekolah ini, menurut Wan Roswita, berdasarkan data sejarah, awalnya disebut sekolah rakyat, kemudian beralih menjadi sekolah B. “Tahun berapa ya persisnya mungkin sekitar tahun 70an mulai disebut dengan SMA. Nah setelah itu awalnya gedung sekolah ini ya yang leter U ini saja. Ini bangunan tuanya,” ungkapnya. Bangunan tua yang berada di sekolah ini masih asli dan merupakan sumbangan dari perusahaan minyak yang waktu itu bernama perusahaan Caltex Pasific Oil Co. (sekarang Chevron). “Nah kita Riau terkenal dengan minyak kan ya. Perusahaan Caltex banyak menyumbangkan dokumen-dokumen foto yang akhirnya kami pajang di luar,” tambahnya. Kemudian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sekolah ini pun menambah beberapa ruangan yang dibantu dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

SMAN 1 Pekanbaru yang menjadi tumpuan masyarakat pada saat itu didirikan untuk menjadikan putra putri Riau mampu memimpin daerahnya sendiri. “Hal ini tentu bukan berarti kami tidak suka keberagaman, namun pasti setiap daerah ingin daerahnya dipimpin oleh putra putri daerah ter-



Suasana belajar di SMAN 1 Pekanbaru

baik. Ini tentunya harus ditopang dengan pendidikan yang baik pula,” ungkapnya.

Saat ini jumlah peserta didik SMAN 1 Pekanbaru sebanyak 978 siswa. Terdapat sebanyak 31 rombel dengan jumlah guru dan TU sebanyak 73 orang. Untuk ketersediaan fasilitas di sekolah ini cukup lengkap. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini yakni kurikulum 2013.

Dari segi raihan prestasi, SMAN 1 Pekanbaru telah membukukan segudang prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. “Bahkan ketika mereka masuk di perguruan tinggi, mereka masih bisa berprestasi di olimpiade-olimpiade dengan membawa nama harum universitasnya itu. Itu untuk bidang akademik,” terang Wan Roswita penuh bangga. Selain akademik, prestasi juga di bidang non akademik. Tidak hanya itu, SMAN 1 Pekanbaru selalu mewakili bidang musikalisis tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 28 Oktober oleh kementerian kebudayaan bekerjasama dengan Balai Bahasa.

SMAN 1 Pekanbaru memiliki visi menjadikan setiap peserta didik dapat menjalankan ibadah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu juga menjadikan warga sekolah yang agamis, berprestasi, memiliki disiplin yang tinggi, mampu bersaing di taraf internasional, menguasai IT, dan setiap peserta didik dapat mengenal budaya lokal, serta cinta terhadap lingkungan. □

SMA NEGERI 1 REJANG LEBONG

DARI CURUP KE REJANG LEBONG

Bangunan SMA Negeri 1 Rejang Lebong di satu sisi nampak megah dan modern. Namun di sisi lain, tampak sudah tua namun masih kokoh. Sekolah ini memang termasuk yang tertua di Bengkulu.

Saat memasuki pelataran sekolah tampak sangat luas, pohon-pohon rindang tumbuh di kiri dan kanan halaman. Di depan ruang kelas dan halaman sekolah terdapat cukup banyak tempat-tempat duduk untuk sekedar bersantai maupun berdiskusi secara kelompok. Begitulah suasana di SMA Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Sekolah ini didirikan pada tahun 1956, dan merupakan SMA tertua di Provinsi Bengkulu. Pada awal berdirinya, SMA Negeri 1 Rejang Lebong merupakan sekolah swasta yang didirikan pada tahun 1952 dengan nama



Para pendidik di SMA N 1 Rejang Lebong

SMA Curup yang pada saat itu masih berada di wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu mayoritas peserta didiknya merupakan masyarakat Sumatera Selatan, meliputi daerah Pagar Alam, Lahat, Lubuk Linggau dan lain-lain.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No. B.3608/D.2.a/K.56 tanggal 14 Djuni 1956, diputuskan berdirinya SMU Tingkat Atas Curup sebagai sekolah negeri. Pada tahun 1981 SMA Negeri Curup berubah menjadi SMA Negeri 1 Curup, dan pada tahun 2016 SMA Negeri Curup berubah kembali menjadi SMA Negeri 1 Rejang Lebong,” ujar Mawardi Kepala SMA Negeri 1 Rejang Lebong.

Terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Curup, perkembangan SMA Negeri 1 Rejang Lebong saat ini telah mengalami peningkatan baik dari sisi peserta didik maupun dari sisi sarana prasarannya. SMA Negeri 1 Rejang Lebong saat ini mempunyai 1.026 peserta didik dengan 30 rombongan belajar, jumlah guru seluruhnya 63 orang terdiri dari 45 orang guru PNS dan 18 orang guru non PNS, saat ini Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digunakan baik pada saat kurikulum ini mulai digulirkan pemerintah sampai dengan saat ini. Mendapatkan nilai akreditasi “A” SMA Negeri 1 Rejang Lebong menjadi tujuan utama peserta didik di Kabupaten Rejang Lebong untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah. Mayoritas peserta didik di SMA Negeri 1 Rejang Lebong merupakan masyarakat sekitar Kabupaten Rejang Lebong.

“Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Rejang Lebong telah mengalami peningkatan, indikator dari peningkatan mutu tersebut salah satunya peningkatan siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sekitar 75%, dari 75% siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebagian besar mereka diterima di Perguruan Tinggi Negeri” ungkap Wakasek Kurikulum.

“Selain itu SMA Negeri 1 Rejang Lebong secara konsisten melakukan pembiasaan pendidikan karakter, pembiasaan tersebut selalu dievaluasi setiap minggunya pada saat upacara bendera dan pada saat rapat bulanan pendidik dan tenaga kependidikan, melalui penerapan pendidikan karakter yang dijalankan secara konsisten kami berharap siswa lulusan sekolah ini mempunyai kepribadian yang baik, berprestasi dan berguna dimasyarakat,” ujar Mawardi Kepala SMA Negeri 1 Rejang Lebong.

Sedangkan dalam peningkatan sarana prasarana, kami telah menyele-



Bangunan di sisi lain SMAN 1 Rejang Lebong

saikan berbagai program pemenuhan standar sarana prasarana seperti pengadaan komputer UNBK serta program revitalisasi gedung sekolah yang sudah tua sehingga dapat berfungsi dengan baik serta berpenampilan modern. Gedung tersebut digunakan sebagai ruang belajar untuk lantai atas dan sebagai ruang PTK dan Kepala sekolah untuk lantai bawah.

Sebagai sekolah tertua di Provinsi Bengkulu, SMA Negeri 1 Rejang Lebong mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain perijinan dan akses informasi yang didapatkan, ada beberapa bentuk dukungan dari pemerintah pusat berupa pemberian dana bantuan BOS untuk penyelenggaraan pendidikan serta bantuan sarana prasarana berupa Revitalisasi Gedung pada tahun 2016.

Selain itu terdapat perbaikan sistem Pendidikan, perubahan kurikulum yang di buat untuk menjawab tantangan abad 21. Ke depan dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan inovasi, dan kerja keras dari semua unsur untuk meningkatkan mutu Pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, dan mampu bersaing secara global. □

WAJAH BARU: 60 TAHUN BERKARYA UNTUK NEGERI

Menginjak usia ke-60 tahun, SMA Negeri 1 Mataram, masih tetap konsisten dalam mempersiapkan generasi bangsa yang bermutu melalui pendidikan. Predikat salah satu sekolah tertua di NTB menambah amunisi baru untuk tetap menjadi pelopor dan teladan.

Satu demi satu wajah sumringah memasuki gerbang sekolah. Mereka melangkah mantap menyongsong masa depannya. Sebuah sekolah di Jalan Pendidikan No. 21, Dasan Agung Baru, Selaparang Kota Mataram, menjadi tujuan anak-anak berseragam putih abu itu. Itulah SMANegeri 1 Mataram, sekolah tua di Kota Mataram.

SMA Negeri 1 Mataram berdiri pada tahun 1957. Pada awalnya mereka menempati tiga lokasi tempat belajar. Yakni di gedung SR No. 7 Mataram, gedung SMPN 1 Mataram dan gedung SMPN 2 Mataram. Baru-lah Pada tahun 1965 setelah peristiwa Gerakan 30 September, sekolah



Gedung SMAN 1 Mataram saat ini



Pendidik dan peserta didik SMAN 1 Mataram di masa lalu

ini mendapat lokasi di sebuah gedung di Cakranegara. Sejak saat itulah sekolah memiliki tempat tetap. Namun sangat disayangkan lokasi tersebut sangat berdekatan dengan lokasi perniagaan sehingga mengganggu proses pembelajaran. Atas usaha Pemda tk I NTB, tahun 1972 SMAN 1 Mataram resmi mendapatkan lokasi di Jalan Pendidikan no. 21 Mataram hingga sekarang.

Dengan visi " Menghasilkan lulusan yang berprestasi, berwawasan global didasari iman, ilmu, dan amal", SMA Negeri 1 Mataram selalu berupaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta berbudi pekerti luhur,

menerapkan sikap toleransi dalam keanekaragaman suku, ras, bangsa, agama dan golongan social, menyiapkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya juang tinggi, kreatif, inovatif berlandaskan iman dan taqwa, menumbuhkan semangat siswa untuk bersaing secara sehat dan intensif untuk mencapai prestasi nasional dan internasional, menghasilkan siswa berprestasi dan memiliki wawasan global yang unggul, meningkatkan disiplin, peka terhadap lingkungan serta dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk memasuki perguruan tinggi dan dunia kerja, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SMA Negeri 1 Mataram kini memiliki 1.155 peserta didik dengan 32 rombongan belajar, dan jumlah pendidik sebanyak 69 orang. Sementara Jurusan yang dilayani adalah IPA dan IPS. Sebagai salah satu sekolah tertua di NTB, SMA Negeri 1 Mataram memiliki tantangan dalam perjalanannya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu. Tantangan yang sangat dirasa pada saat ini adalah dengan adanya perubahan kurikulum, karena sebagian besar pendidiknya adalah produk lama. Tetapi hal ini tidak serta merta dijadikan sebagai hambatan untuk maju. ,

Guna mengantisipasi tantangan tersebut SMA Negeri 1 Mataram selalu berupaya meningkatkan kompetensi guru dengan mengadakan berbagai macam workshop dan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu guru juga dituntut untuk menguasai IT, Karena memang itu adalah tuntutan zaman.



Kegiatan pembelajaran SMAN 1 Mataram saat ini

Sementara dalam rangka mengoptimalkan ketercapaian kompetensi peserta didik, SMA Negeri 1 Mataram senantiasa mengadakan kegiatan yang sepenuhnya adalah hasil kreativitas peserta didik, dengan demikian peserta didik juga akan semakin sayang dengan sekolahnya, semakin tidak banyak masalah, semakin santun semakin memahami dengan sekolah ini.

Dengan menyandang sekolah tertua, SMA Negeri 1 Mataram, tentunya harus memiliki segudang prestasi baik prestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Di tingkat provinsi, SMA Negeri 1 Mataram, menjadi juara Olimpiade Sains. Dan tak jarang pula, SMANSA mengirimkan wakil-wakilnya di OSN (Olimpiade Sains Nasional). Dalam ajang debat bahasa Inggris, setiap tahunnya siswa SMA Negeri 1 Mataram berhasil melewati seleksi untuk mewakili Nusa Tenggara Barat dalam ajang *National Schools Debating Championship* (NSDC/ISDC).

Di tingkat Internasional, seorang siswa SMA Negeri 1 Mataram mengukir prestasi sebagai anggota dari delegasi Indonesia dalam ajang World Schools Debating Championship (WSDC) pada tahun 2008 (Washington, USA) dan 2009 (Athena, Yunani) atas nama Adlini Ilma Ghaisany Sjah. Pada OSN 2013 dua orang siswa mewakili NTB, yaitu bidang Ekonomi yang diwakili oleh Ammar Bimantara Muhammad dan bidang Biologi yang diwakili oleh I Putu Adityo Artayasa. Adityo Artayasa berhasil meraih medali perak pada kompetisi ini.

Dengan zaman yang semakin maju dan tantangan semakin global SMA Negeri 1 Mataram memiliki program yang inovatif dalam menghadapi semua itu program yang merupakan ciri khas atau tambahan Kurikulum SMAN 1 Mataram yakni; Pengembangan Diri, Keterampilan atau bahasa asing selain bahasa Inggris, dan muatan lokal telah terprogram dan siap dilaksanakan. Selain itu tenaga pengajar untuk ketiga program tersebut telah tersedia. Program keterampilan, SMA Negeri 1 Mataram memilih keterampilan Jasa/akuntansi, tata boga, dan ketrampilan elektronika. Sedangkan muatan lokal yakni Bahasa Jepang, Bahasa Inggris pariwisata dan Web design flash. Pemilihan program tersebut di atas didasari pemanfaatan sumber daya manusia/guru dan fasilitas yang tersedia di SMA Negeri 1 Mataram. □

PERJALANAN 60 TAHUN BERDAYA SAING

Usia enam puluh tahun berkiprah dalam sejarah pendidikan menengah atas di Indonesia tentu bukan masa yang pendek. SMAN 1 Langowan tak lepas dari sejarah SMA di Tanah Air.

Pada awalnya, SMAN 1 Langowan adalah sekolah filial atau kelas jauh dari SMAN 1 Tomohon. Pada tahun 1958, SMAN 1 Langowan berdiri sendiri, dan mendapatkan SK penegerian dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia (PPKRI) di tahun 1958. Kala itu dunia pendidikan masih diwarnai dengan cara-cara yang berbau feodal, dimana guru sangat memegang kendali dan dominan serta sangat ditakuti.

Siswa yang bersekolah di SMAN 1 Langowan juga merupakan siswa panggilan pemerintah pasca pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi pada tahun 1957. Menurut Drs. Herie Pajow Kepala Sekolah SMAN 1 Langowan, dari kisah para sesepuhnya, di masa awal sekolah mulai berdiri sendiri para siswanya berusia sekitar 20-an tahun, oleh sebab mereka awalnya adalah tentara rakyat pada masa Permesta.

“Jadi, dulu itu siswanya berambut panjang seperti anak perempuan. Usianya sudah dewasa sekitar 20 tahun ke atas dan diajak kembali ke sekolah oleh pemerintah. Bangunan kelasnya juga masih dari bilik bambu dan tidak bertahan lama. Baru di tahun 70-80an sekolah mendapat bangunan dua lantai,” kisah Herie.

Perjalanan SMAN 1 Langowan mewarnai kisah pendidikan bangsa ini juga terlihat dari bangunan bagian depan sekolah yang sudah cukup tua, model pintu kayu dan pintu besinya berukuran besar yang sudah tidak didapatkan di masa sekarang. Herie juga menjelaskan bahwa struktur bangunan sudah perlu direvitalisasi, beberapa kaca sudah pecah, dan pintunya berat jika dibuka. Walaupun diakuinya, bahan material bangu-

nan kuno justru sangat kuat dan berumur panjang dibandingkan material zaman sekarang jika dibangun secara massal. “Namun, meski kuat dan berumur panjang, tetap sudah mulai membahayakan jika tidak dilakukan revitalisasi,” ujar Herie.

Revitalisasi diperlukan mengingat bangunan memang sudah tua, dan jika hanya direnovasi tambal sulam justru semakin tidak terlihat letak kerusakannya. Dan hal ini justru lebih berbahaya jika dilakukan terus-menerus.

Di Ujung Cemeti Ada Emas

Herie merasakan betul sekolah bertumbuh dengan pendidikan yang sangat keras didikannya di SMAN 1 Langowan oleh sebab dirinya juga alumni sekolah ini. Di masa lalu, guru sangat ditakuti, bahkan para orangtua murid mempercayakan penuh pendidikan kedisiplinan anak-anaknya pada guru. Sehingga, menurut Herie, jika ada guru melaporkan ke orangtua tentang kenakalan anaknya, maka orangtua akan membela guru dan ikut menasihati anaknya. “Atau kalau kami pulang ke rumah mengadu ke orangtua bahwa tadi di sekolah dipukul guru, maka orangtua malah akan ikut memarahi kami, oleh sebab orangtua tahu kami memang pasti ada salah,” ungkap Herie.

Herie mengibaratkan didikan guru di masa lalu yang konon disebut feodal, adalah pendidikan yang laksana “Di ujung cemeti ada emas”. Dalam didikan yang demikian keras bahkan terkadang dengan pukulan, mampu melahirkan sosok-sosok pemuda yang tegas, tegar, kuat dan menjadi pemimpin yang disiplin dan disegani.

Namun kini, pendidikan semacam itu sudah tidak lagi berlaku bahkan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dianggap bullying. Jika keras sedikit sama artinya siap berurusan dengan kepolisian dan pengadilan.

“Anak-anak akan mudah melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada orangtua lalu berlanjut ke pidana. Inilah yang membedakan didikan masa lalu dengan sekarang, dan hasilnya anak-anak sekarang cenderung manja dan tidak sekuat produk masa lalu,” ujar Kepala Sekolah dengan siswa lebih dari 1000 anak didik ini.

Era digital, menurut Herie juga turut berperan membuat remaja sedikit dimanjakan dengan teknologi dan kurang ulet. Namun di sisi lain, mendorong peningkatan prestasi akademik lulusan, menciptakan iklim pembela-

jaran yang kreatif, efektif dan inovatif. Sehingga, dua sisi mata uang yang ditimbulkan karena perkembangan IPTEK tersebut, mendorong sekolah untuk tetap membangun karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, religius, kreatif, ramah, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan bertanggung jawab.

“Jadi, biar bagaimanapun yang sudah tua sudah harus berlalu dengan perkembangan yang ada. Jika eranya sudah digital, semua harus pandai ikut dalam arus tersebut dengan tanggung jawab penuh. Sekolah akan melibatkan seluruh stakeholders-nya, mengaktifkan ikatan alumninya agar sejarah tetap menjadi bagian dari kami semua menghargai para pendiri dan pejuang yang memajukan sekolah hingga hari ini,” urai Herie penuh ajakan.

SMAN 1 Langowan dengan segala keterbatasan ruang, sarana dan prasarana tetap terus bersemangat mendenyutkan pendidikan di Kabupaten Minahasa. Meski sekolah berada di dalam suasana desa, ketenangannya telah melahirkan alumni yang hebat, ada yang menjadi pejabat daerah hingga nasional dan internasional, berkiprah di TNI-POLRI, dan pengusaha. Semoga kiprahnya terus berlanjut hingga sekian tahun ke depan. □

MENGGALI POTENSI GURU DAN SISWA

Atas swadaya masyarakat yang peduli dengan kelangsungan pendidikan anak bangsa, berdirilah SMA Bandar Veteran yang merupakan cikal bakal SMAN 1 Palangka Raya. Selama usianya, sudah banyak sejarah yang ditinggalkan sekolah ini, baik dari segi prestasi maupun literasi. Kini gedung sekolah menanti direnovasi

Berada di pusat Kota Palangka Raya merupakan posisi yang cukup strategis bagi SMAN 1 Palangka Raya. Lokasinya pun bersebelahan dengan SMAN 2 Palangka Raya. Akses masuk ke sekolah ini hanya dapat dilalui dari Jl. AIS. Nasution 2 yang kondisi lalu lintasnya cukup lenggang. Bangunan asli dari sekolah ini berada di bagian depan sekolah memanjang vertikal. Sedangkan bangunan lainnya yang berada di dalam merupakan gedung baru. Meski berada di pusat kota, sekolah ini cukup asri dengan ditumbuhi beberapa pohon rindang yang berada di dalam lingkungan sekolah, menambah kenyamanan bagi para siswa siswinya. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas pojok baca di beberapa sudut sekolah yang dapat dimanfaatkan para siswa untuk sekedar berkumpul dan membaca di waktu istirahat tiba.

Berdiri sejak tahun 1959, SMAN 1 Palangka Raya merupakan sekolah menengah atas tertua di kota ini. Saat pertama kali didirikan atas swadaya masyarakat, sekolah ini bernama SMA Bandar Veteran yang berlokasi di Jalan Darmo Sugondo. Pada tanggal 1 Agustus 1959 disahkan menjadi SMA Negeri 1 Palangka Raya berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) Republik Indonesia nomor 25/SK/B/III/1959. Tahun 1960 SMA Negeri 1 Palangka Raya berpindah lokasi dari Jalan Darmo Sugondo ke Jalan Ahmad Yani di tempat yang dulunya disebut SD Batu Palangka Raya (sekarang SDN 1 Langkai), selanjutnya pada tahun 1961 berpindah ke Jalan AIS. Nasution No. 2 Palangka Raya hingga saat ini. Kepemimpinan di sekolah ini telah berganti sebanyak 13



Bangunan SMAN 1 Palangka Raya

kali sejak awal berdirinya. Pada tahun pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Palangka Raya menggunakan 2 kurikulum yakni kurikulum 2013 untuk kelas X dan KTSP 2006 untuk kelas XI dan XII, dengan tiga program atau peminatan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa.

Saat ini jumlah siswa yang bersekolah di SMAN 1 Palangka Raya berjumlah 1496, dengan jumlah guru sebanyak 86 orang dan terdapat 38 rombongan belajar. Ketersediaan fasilitas di sekolah ini cukup terpenuhi hanya saja terdapat beberapa sarana yang kurang mendukung di beberapa laboratorium. "Umumnya gedung lab ada, tapi kurang alatnya," terang Badah Sari selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Palangka Raya. Sekolah yang telah meraih gelar adiwiyata ini pun memiliki cukup banyak prestasi yang telah ditorehkan. "Banyak prestasi yang sudah tembus di tingkat nasional, di antaranya lomba monolog tingkat nasional di Ambon," ujar Badah Sari.

Badah Sari menuturkan, selama masa kepemimpinannya selalu mendorong para guru untuk berinovasi dan pengembangan dalam pembelajaran melalui pelatihan dan workshop. Begitu pula dengan siswa, diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Alhasil, berkat motivasi yang diberikan dengan dibantu oleh para para guru, selama 3 bulan terakhir ini terdapat sekitar 60 jenis



Gapura masuk ke SMAN 1 Palangka Raya

kejuaraan yang dimenangkan oleh siswa siswi SMAN 1 Palangka Raya. Sebagai bentuk apresiasi dan memacu semangat para peserta didiknya, sekolah selalu memberikan reward kepada para siswa yang berprestasi. Dari sisi kualitas pendidikan, dari masa ke masa, menurut Badah Sari mengalami peningkatan. Terbukti dengan diraihnya Juara Umum Lomba Karya Tulis se-Kalimantan.

Sejauh ini peran pemerintah dalam memajukan pendidikan di tingkat SMA sudah baik namun masih perlu ditingkatkan lagi karena kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada. "Apalagi kalteng selalu dikaitkan dengan mutu yang rendah. Jadi harus semangat karena semangat itu modal utama," ujarnya. Harapannya untuk para siswa siswi SMA tahun ini dapat lulus dengan nilai yang baik dan mampu bersiang dengan para lulusan SMA yang berada di Pulau Jawa. Sehingga peluang untuk masuk perguruan tinggi ternama semakin besar. "Jadi saya selalu motivasi mereka bahwa belajar itu hanya satu kali kesempatan, bila kamu membuang kesempatan ini, masa depan kamu akan hilang jadi harus diusahakan, harus berjuang," ujarnya. □

BERKIPRAH 52 TAHUN MENCERDASKAN TARAKAN

Berawal dari kebutuhan masyarakat di Tarakan akan adanya sekolah menengah, sejumlah tokoh masyarakat SMA Multatuli pada tahun 1959 sebagai cikal bakal SMAN 1 Tarakan.

Sejumlah tokoh masyarakat Tarakan pada tahun 1950-an berupaya mendirikan sebuah sekolah menengah yang sangat dibutuhkan di Tarakan kala itu. Di antara tokoh tersebut adalah Riku Mahu (Kepala Bea Cukai Tarakan saat itu) dan Tan Ching Sua (pengusaha). Atas jasa mereka lahirlah SMA Multatuli pada tahun 1959 sebagai cikal bakal SMAN 1 Tarakan.

Di awal berdirinya, SMA Multatuli mempunyai 48 murid, dengan berbagai usia dan latar belakang, ada yang siswa lulusan SMP dan banyak pula yang sudah bekerja. Karena belum punya gedung, pembelajaran dilaksanakan menumpang di SMP satu-satunya saat itu (saat ini SMPN 1 Tara-



SMA N Tarakan saat ini



Siswa SMAN Tarakan di masa lalu sedang berolahraga

kan). Guru yang mengajar adalah para pegawai yang bekerja di berbagai instansi saat itu, termasuk Yacob I Salu, Yuslimin, dan Nurdin AH.

Untuk dapat mengikutkan siswanya pada Ujian Negara, SMA Multatuli ditetapkan menjadi sekolah filial dari SMAN 1 Samarinda pada tahun 1960. Pertama kali melaksanakan ujian pada tahun 1962, dan tidak ada satupun siswa SMA Multatuli yang lulus. Setahun kemudian, barulah untuk pertama kali SMA Multatuli berhasil meluluskan siswanya. Dari 23 orang yang mengikuti ujian, hanya 4 orang yang lulus yaitu: Mochtar Seman, Sofyan, Sofyan Tan dan Supinah.

Pada tahun 1964, perjuangan para Guru berhasil dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79/SK/B/III Tanggal 30 Juli 1964, yang menyatakan SMA Multatuli resmi sebagai SMA Negara yang berdiri sendiri, lepas sebagai SMA filial dari SMAN 1 Samarinda. Yacob I Salu ditetapkan sebagai kepala Sekolah SMA Negara. Setahun kemudian, berdasarkan SK Direktorat Pendidikan Umum nomor 18/Dirpu/1965 tertanggal Jakarta, 30 Juli 1965, ditetapkan bahwa terhitung 1 Agustus 1965 resmi sebagai SMA Negeri Tarakan.

SMA Negeri yang awalnya menumpang belajar di SMP selanjutnya dapat menggunakan gedung sekolah Cina, Chiau Tsung, sehingga para siswa dapat masuk sekolah pagi hari di gedung tersebut. Gedung Sekolah berasal dari Gedung Sekolah Cina Komunis milik Yayasan CHIAO TSUNG yang diambil alih oleh Negara berdasarkan peraturan pemerintah. "Pada

perkembangannya, kemudian penggunaan gedung sekolah ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kaltim, penggunaannya secara resmi diserahkan kepada SMA Negeri Tarakan,” ujar Arinda Susanti, Kepala SMAN 1 Tarakan. Secara utuh, Tim Inventarisasi adalah M. Tahir Sjukur (Komando Angkatan Laut/Ketua); dengan anggota M. Yusran (Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan); Murad Imbran (Angkatan Kepolisian Resort Tarakan); dan Imbran. S (Tokoh Masyarakat).

Peserta Didik yang Andal

Sejarah panjang perjalanan SMAN 1 Tarakan yang sarat perjuangan tokoh masyarakat Tarakan ini kini berkembang menjadi sekolah favorit. Menurut Kepala Sekolah Arinda Susanti, dengan sejarah panjangnya, tak heran jika dari dulu sekolah ini menjadi pilihan lulusan sekolah menengah pertama untuk menempuh pendidikan SMA. “Tentu bukan hanya sejarah besar, karena kami memiliki visi ‘Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompetitif, dan berwawasan lingkungan,” ujar Arinda.

Visi tersebut didukung dengan misi sekolah yang terarah dengan visi. Selain fokus pada visi dan misi, sekolah juga menerapkan sistem manajemen mutu dan melaksanakan program sekolah berkelanjutan dengan menerapkan budaya peduli dan cinta lingkungan. “Sementara budaya mutu sekolah yang kami kembangkan adalah bersih, disiplin, santun, dan peduli,” kata Arinda.

Saat ini SMAN 1 Tarakan memiliki 57 Tenaga Pendidik (Guru) dan 20 Tenaga Kependidikan serta layanan khusus (tenaga kebersihan dan tenaga keamanan). Sementara pada tahun pelajaran 2016/2017 ini siswa di SMAN 1 Tarakan berjumlah sekitar 960 siswa, yang terbagi dalam 28 Rombel. Siswa di SMAN 1 Tarakan berasal dari beragam latar belakang, baik suku, Agama, maupun kondisi sosial ekonomi orang tua.

Untuk pengembangan potensi dan bakat siswa, SMAN 1 Tarakan menyediakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di luar jam sekolah, yaitu pada sore hari. Dengan segudang kegiatan akademis dan nonakademis tersebut, Siswa SMAN 1 Tarakan pun telah menorehkan cukup banyak prestasi, baik di tingkat lokal Kota Tarakan, tingkat Provinsi Kaltara; tingkat nasional dan internasional. □

SMAN 1 LUWUK

MELAHIRKAN GENERASI YANG TANGGUH

Berawal dari kelas jauh SMAN Palu, SMAN 1 Luwuk berdiri pada tahun 1960. Sebelumnya sempat bernama SMA Gaja Baru, lalu SMAN 222.

Pada awalnya SMA Negeri 1 Luwuk merupakan sekolah kelas jauh dari SMA Negeri Palu yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1960. Proses belajar mengajar pada awalnya dilaksanakan di gedung Pemerintah yang sekarang ini di kenal dengan Graha PKK Kabupaten Banggai (Gedung Nasional), Dalam perkembangan selanjutnya SMA kelas jauh Palu di Luwuk ini di beri nama SMA Gaja Baru. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 24/S.K/B/III tanggal 12 Oktober 1962 SMA Gaja Baru ditetapkan menjadi SMAN 222 Luwuk, yang selanjutnya diubah menjadi SMA Negeri 1 Luwuk.

Tujuan awal pendirian sekolah ini adalah untuk menampung tamatan SMP yang Lulus tahun pelajaran 1961-1962 dan untuk mengajukan pendidikan



Papan nama sekolah SMAN 1 Luwuk

di bawah ini serta untuk mendekatkan peserta didik di wilayah kab. Banggai. Pada awal berdirinya sekolah ini difasilitasi oleh pemda banggai termasuk mendatangkan tenaga pendidik dari daerah lain (Toraja, Manado dan Gorontalo) termasuk menyediakan rumah tinggal dari para guru-guru tersebut. Guru-guru yang menjadi pendidik pertama berasal dari berbagai di wilayah diantaranya Makassar, Toraja, dan Gorontalo dan sebagian guru-guru SMP yang diperbantukan di SMA.

Pada masa-masa awal pendirian, para guru tidaklah berdasarkan kualifikasi sarjana akan tetapi kemudian dengan di fasilitasnya oleh pemda para guru tersebut di sekolahkan baik ke Manado dan ke Gorontalo. Dalam implementasi kurikulum inovasi yang di lakukan adalah menyertakan kegiatan muatan lokal misalnya kerajinan tangan pertamanan serta kurikulum berbasis teknologi.

Sekolah yang memiliki visi "Menghasilkan Keluaran yang berprestasi, berkepribadian Tangguh, Mampu menghadapi tantangan" ini terletak di Jl . Dewi Sartika No. 02 A Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.015 siswa yang terbagi menjadi 28 rombongan belajar. Pada tahun pelajaran 2017-2018 SMA Negeri 1 Luwuk Kabupaten banggai menggunakan kurikulum KTSP tahun 2006 dan kurikulum 2013.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2007/2008 status SMA Negeri 1 Luwuk mengalami peningkatan dari sekolah regular bisa menjadi rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) atau sekolah rintisan standar Nasional (RSSN). Dengan status itu, maka SMA Negeri 1 Luwuk terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dengan berbagai upaya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru menuju pembelajaran yang efektif dan efisien.

"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, itulah motto dan prinsip sekolah kami" ujar kepala sekolah Ibu Hj. Faika Alsan. Dengan motto tersebut maka seluruh warga sekolah diharapkan termotivasi untuk terus menjadi insan yang lebih baik. Prinsip inilah yang kemudian mewarnai setiap gerak langkah dalam penyusunan program sekolah. Dengan luas bangunan 4362 m² yang berdiri diatas tanah seluas 9153 m² memiliki fasilitas yang cukup lengkap. SMA Negeri 1 Luwuk dari tahun ke tahun terus meningkatkan prestasinya baik di bidang akademik maupun non akademik.

Sekolah ini adalah sekolah yang tegas dalam mengajarkan kedisiplinan.



Lingkungan sekolah SMAN 1 Luwuk

Sama seperti sekolah lainnya, kegiatan kesiswaan bertujuan untuk memberikan ruang gerak kepada siswa dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh siswa diharapkan menjadi pembelajaran dan pembiasaan dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan siswa.

SMA Negeri 1 Luwuk sudah berhasil meluluskan orang-orang yang memegang jabatan penting. Beberapa di antaranya adalah Letjen Lodwyk Paulus (Dan KodiklatAD Bandung), AKBP Rais Adam, S.H. (Kabid Hukum Polda Sulteng). Tahun lulus 1976, Prof. Jener Ointu (Dosen Fakultas Sastra Unsrat Manado), Ir. Nani Mokodongan (Staf Ahli Kementerian Pertanian Jakarta), Kol. Penerbang Weni Bukamo (Bupati Banggai Laut), Ir. H. Faisal Mang (Kadis Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah), Drs. Suryono Salingkat (Kadiklat Perindustrian Provinsi Sumatra Barat), Ir. Agus Lagonda (Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, Manado), Ir. Dance Solany, M.M. (Kadis Tanaman Pangan Bangkep), Jesika Ginardy (Finalis Puteri Indonesia, mewakili Sulawesi Tengah tahun 2007). □

MEMBENTUK KARAKTER DENGAN KEGIATAN ILMIAH

Usianya lebih dari setengah abad, SMAN 1 Kendari kini menjadi sekolah terkemuka di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pernah memiliki nama SMAN 224.

Di antara SMA yang usianya lebih dari setengah abad, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Kendari. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 1962, dan berstatus Negeri pada tanggal 23 September 1963 berdasarkan SK Menteri P dan K No. 24/SK/B.III./1963 Sejak didirikan sekolah ini telah memiliki beberapa nama, yaitu: SMA Negeri 224 Kendari, SMA Negeri Teladan Kendari, SMA Negeri 1 Kendari, RSBI SMAN 1 Kendari.

SMA Negeri 1 Kendari pada saat ini memiliki 1.305 peserta didik, dengan 34 rombongan belajar dan jumlah pendidik sejumlah 78 orang. Untuk ketersediaan sarana dan rasarana di sekolah ini cukup lengkap, kurikulum yang diterapkan di sekolah ini yakni kurikulum 2013.

Visi yang mereka angkat adalah “Unggul dalam Prestasi, Teladan, Berdisiplin, Anggun Beretika dan berwawasan Lingkungan yang dilandasi Iman dan Taqwa”. Untuk menjabarkan visi tersebut, dituangkan dalam misi dan berbagai program. Di antaranya dengan melakukan berbagai macam upaya inovasi pendidikan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler, dan hal ini membuahkan hasil cukup menggembirakan, memberikan kontribusi yang cukup besar. Salah satunya melalui club sains yaitu unit Organisasi di bawah OSIS yang terbentuk pada tahun 2003 dan berada di bawah naungan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) kerap meraih prestasi.

Bukan hanya dibuktikan dengan kemampuan di sekolah, tetapi dari berbagai ajang lomba, siswa binaan yang telah dipimpin oleh 10 kepala sekolah ini selalu bisa unggul berkat club sains ini. “Banyak sekali prestasi yang diraih anak-anak kami. Dalam semua bidang sudah pernah meraih

prestasi," ujar pembina club sains SMAN 1 Kendari, Drs Nafarudin.

Saat ini club sains menjadi wadah dan memiliki andil besar dalam membangun kualitas peserta didik memiliki minat dan bakat. Club sains SMAN 1 Kendari terdiri atas beberapa bidang mata pelajaran yaitu matematika, kimia, fisika, biologi, astronomi, kebumihan, komputer, ekonomi dan geografi. Dengan adanya wadah ini para siswa telah terorganisir dengan baik. Selain menjadi wadah bagi siswa, ini juga menjadi tempat mempersiapkan siswa pada berbagai ajang lomba akademik khususnya di ajang olimpiade. Sesuai dengan visi sekolah

Drs. H. Agusman Hanasi, M.Si, selaku Kepala SMA Negeri 1 Kendari memaparkan bahwa awal mula berdirinya sekolah ini adalah atas kekhawatiran tokoh-tokoh yang peduli dengan pendidikan salah satunya adalah Drs. Tuna Saranawi pada mulanya tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mengakomodir siswa-siswi yang berada di wilayah Kendari dan sekitarnya, sekolah ini awalnya bernama SMA Nasional berstatus swasta dan pada tahun 1963 sekolah ini berubah menjadi SMAN 234, dan seperti sekolah tua lain pada umumnya masalah yang kerap kali di jumpai pada awal perkembangan sekolah ini adalah dengan keterbatasan sarana dan prasarana, namun hal itu tidak serta merta dijadikan hambatan oleh mereka, bahkan hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk meningkatkan taraf pendidikan di wilayah Kendari.

Kemudian sesuai dengan surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 697/C4/2007 tanggal 18 Juli 2007, SMA Negeri 1 Kendari ditetapkan sebagai salah satu dari 200 SMA Rintisan Bertaraf Internasional se Indonesia dan pertama di Sulawesi Tenggara. Sejak berdirinya sampai sekarang SMA Negeri 1 Kendari telah dipimpin oleh 9 (sembilan) Kepala Sekolah.

Dalam mewujudkan Sekolah yang bermutu SMA Negeri 1 Kendari memiliki program-program unggulan Adapun program unggulan yang dilaksanakan, yaitu : yang pertama tersedianya bahan ajar, sarana dan Prasarana yang menunjang proses belajar mengajar berbasis ICT di kelas. Proses belajar mengajar yang baik tidak terlepas dari tiga hal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, tiga hal inilah yang mendasari manajemen SMA Negeri 1 kendari yang selalu menekankan kepada guru-guru untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran yang realistis.

Kedua, Meningkatkan kemampuan guru pada proses pembelajaran ber-

basis ICT dan pengantar berbahasa Inggris. SMA Negeri 1 Kendari secara berkelanjutan selalu mengadakan upaya peningkatan mutu dan kompetensi guru seperti in house training (ITC), dan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Mengingat sekolah ini adalah sekolah tertua di Kendari maka sebagian besar tenaga pendidiknya pun cukup berpengalaman, sehingga tidak jarang mereka menjadi narasumber dan instruktur di pelatihan-pelatihan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Ketiga. Menciptakan situasi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Pembelajaran yang menyenangkan adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik. Hal ini juga mendapat perhatian serius dari sekolah ini, dengan perencanaan pembelajaran yang baik, maka sangat dimungkinkan proses pembelajaran pun akan berjalan menyenangkan, dengan proses belajar menyenangkan maka akan menghasilkan prestasi yang baik juga. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, untuk siswa jurusan IPA, 10 besar peringkat nilai UN tertinggi diraih oleh siswa SMAN 1 Kendari. Sementara itu untuk siswa jurusan IPS, SMAN 1 Kendari kembali mendominasi. Dari posisi 10 besar, sekolah ini menempatkan 6 siswanya sebagai peraih nilai UN terbaik.

Keempat, Menciptakan generasi yang berkarakter bangsa yakni olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Senada dengan visi yang dimiliki oleh sekolah ini, mereka mengharapkan lulusan dari SMA Negeri 1 Kendari menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. □

MELAYANI PENDIDIKAN PAPUA SELATAN

Pada tahun 1963 Keuskupan Agung Merauke mendirikan SMA untuk melayani pendidikan di wilayah Papua Selatan. Banyak tantangan yang tidak ringan.

Untuk membangun peradaban manusia di wilayah Papua Selatan yakni Merauke, Asmat, Boven, Digul, dan Mappi, pada tanggal 1 Agustus 1963, Keuskupan Agung Merauke mendirikan sebuah sekolah menengah atas yang diberi nama SMA YPPK Santo Yohanes XXIII di Merauke. Sekolah ini pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke. Kemudian pada tahun 1974 pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) yang berpusat di Jayapura.



SMA YPPK Santo Yohanes XXIII



Peserta didik SMA YPPK Santo Yohanes XXIII

Pada masa pendiriannya, sasaran peserta didik adalah untuk melayani pendidikan bagi tamatan SMP yang ada di Merauke, Boven, Digul, dan Mappi. Siswa diterima dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan masyarakat. Sampai saat ini Sekolah tetap mempertahankan keberagaman, dan tetap memperhatikan peserta didik yang berasal dari ekonomi rendah dan siswa yang tidak mampu secara ekonomi.

Pada masa awal itu, guru umumnya berasal dari Jawa, pada saat itu dikhianatkan dengan guru Trikora. Pembinaan guru pada masa-masa awal guru ditambahkan sikap mengabdikan, mengabdikan dan mengabdikan, mereka tidak menuntut bayaran. Dalam perkembangannya SMA YPPK Santo Yohanes XXIII cukup maju sebelum munculnya sekolah-sekolah negeri yang didirikan oleh Pemerintah.

Namun, saat ini, menurut Drs. Kiko Aloysius, dirasakan terjadi pergeseran karakter peserta didik dan guru, sarana dan prasarana yang sudah terkalahkan usia, dan tenaga pendidik kurang (banyak guru honorer). Padahal kondisi yang dihadapi terbilang lumayan berat. Banyak siswa dari sekolah pinggiran belum bisa calistung (baca, tulis, dan hitung) guru berusaha dengan berbagai metode sehingga bias calistung. Inovasi yang dilakukan adalah model pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi siswa. Secara pembelajaran, SMA YPPK Santo Yohanes XXIII sudah Menerapkan Kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI. Sejauh ini lulusan menyebar di seluruh perguruan tinggi baik PTN maupun PTS dan lulusan (alumni) sudah menyebar di seluruh Indonesia.



Lingkungan sekolah SMA YPPK Santo Yohanes XXIII

Sumber dana yang digunakan dalam pengelolaan sekolah terbesar berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saat ini jumlah rombel 15 dengan jumlah peserta didik 380 orang. Jumlah guru adalah 39 orang. Adapun sarana prasarana dianggap cukup meskipun kondisinya kebanyakan sudah dimakan usia. Dengan visi "Terwujudnya sumber daya manusia yang jujur, adil, cerdas, inovatif, kreatif, terampil, dan mandiri dilandasi kasih dan spiritualitas Santo Yohanes XXII", SMA YPPK Yohanes XXIII terus konsisten melayani pendidikan bagi warga Merauke dan sekitarnya.

Terdapat dua misi dalam menjabarkan visi sekolah yakni, pertama, "Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan Iman, dan pembekalan hidup rohani secara kontinu," dan kedua, "Mengintegrasikan pembelajaran dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter". Sekolah yang berlokasi di Jalan Kimaan No. 4 Kel. Maro ini telah meraih kriteria akreditasi "A". Dari berbagai aktivitas, sejumlah prestasi telah diraih oleh peserta didik sekolah ini. Antara lain menjuarai lomba KIR dan olahraga basket dengan menjadi juara basket (DBL). □

SMAN 1 SORONG

SMA PERTAMA DI IRIAN JAYA

Meski bangunan yang dipakai telah berganti wajah, SMAN 1 Sorong tetap menjadi bagian dari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. SMA tertua di Irian Jaya.

Menginjakkan kaki di sekolah ini seakan membawa kita jauh ke masa silam. Ceritanya berawal saat pemerintah Indonesia berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, sekitar 1963. Setelah Irian Barat lepas dari cengkeraman penjajah Belanda, berkumpul para tokoh masyarakat dan beberapa orang guru di Sorong dan Doom, untuk memikirkan kelanjutan pendidikan tingkat atas, khususnya di Sorong.

Dari hasil musyawarah tersebut kemudian terbentuklah sebuah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau yang saat ini dikenal dengan nama



SMAN 1 Sorong, SMA negeri yang ke-413 di Indonesia dan pertama di Irian Jaya



Foto kenangan upacara di SMAN 1 Sorong

SMA. Meski belum memiliki payung hukum, namun proses belajar mengajar terus berlangsung. Kemudian, pada 27 September 1963 barulah Surat Keputusan Nomor: 4037/1963 Tanggal 27 September 1963 yang ditandatangani V. Bonay sebagai Gubernur Provinsi Irian Barat kala itu.

Melalui surat itu, pemerintah menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri di Sorong. "Waktu itu namanya bukan SMA 1, tetapi SMA 413, sesuai dengan nomor urut dari seluruh SMA Negeri yang telah ada Indonesia," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Sorong, Yoseph Kamu, S.sos. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, SMAN 413 resmi beroperasi sekaligus mengukuhkan diri sebagai SMA pertama di seluruh Irian Jaya.

KBM Pagi dan Sore

Di awal pendirian, SMUN 413 belum memiliki bangunan sendiri. Proses pembelajaran saat itu masih dilaksanakan di gedung SMP Negeri 1 Sorong. Kemudian, SMAN 413 mendapat sumbangan gedung dari *Nederland New Guinea Petroleum Matshapiy* (NNGPM), sebuah perusahaan minyak yang berada di Sorong. Sejak itulah SMUN 413 Sorong berpindah tempat ke bangunan baru yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 36, Sorong.



Foto kenangan peserta didik SMAN 1 Sorong

Jumlah siswa perdana saat itu sebanyak 21 orang dan Drs. Sudjatmiko sebagai Kepala Sekolah Pertama. Pada tahun pelajaran 1964/1965 sekolah ini berhasil meluluskan siswa sebanyak 15 orang, yakni dari jurusan A, B dan C. Dalam perkembangannya, SMU Negeri 413 Sorong kembali mendapatkan bantuan gedung dari pemerintah berupa 6 ruang belajar, satu kantor dan satu ruang laboratorium pada 1978. "Sehingga, mulai tahun pelajaran 1979/1980, SMA ini kembali pindah ke gedung baru dan terus bertahan hingga saat ini. Lokasinya berada di Jalan Danau Toba Nomor 2, Kota Sorong, Papua Barat," ujar Yoseph yang saat ini menjadi Kepala Sekolah ke-10 SMA itu.

Untuk menjamin kelangsungan dan kemudahan pelaksanaan proses belajar mengajar, lanjut Yoseph, mulai tahun tersebut, kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pagi dan siang hari. Hal itu dilakukan mengingat belum ada keseimbangan antara jumlah siswa dengan fasilitas gedung yang tersedia. Proses belajar mengajar yang berlangsung pagi dan siang ini berjalan hingga tahun pelajaran 1994/1995.

Berubah Nama

Dengan berlakunya kurikulum 1994 yang di dalamnya mengharuskan KBM berjalan selama delapan jam pelajaran sehari, maka KBM yang tadinya berlangsung pagi dan siang hari tidak mungkin lagi dilak-



Visi dan misi SMAN 1 Sorong

sanakan. Sehingga, kata Yoseph, kepala sekolah yang menjabat waktu itu mengambil kebijaksanaan, bahwa mulai tahun pelajaran 1995/1996, KBM SMA Negeri 413 seluruhnya dilaksanakan di pagi hari. "Nah, pada tahun itu pula lah SMA Negeri 413 Sorong berubah nama menjadi SMU Negeri 1 Sorong," terang Yoseph.

Seiring berjalannya waktu, SMU Negeri 1 Sorong terus berkembang. Dan saat diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sekolah ini kembali berubah nama, dari SMU 1 Sorong menjadi SMA Negeri 1 Sorong. Sejak tahun pelajaran 2004/2005, dan 2007/2008 sekolah ini menjalankan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Sebagai lembaga pendidikan pertama yang ada di wilayah Papua, SMAN 1 Sorong telah berhasil meluluskan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Bahkan pada 2010 lalu, SMA ini berstatus sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Saat ini, sekolah yang menjadi salah satu pilot project penerapan Kurikulum 2013 ini memiliki jumlah guru PNS sebanyak 45 orang dan non-PNS 22 orang. Sedangkan jumlah muridnya yakni sebanyak 836 dari 30 rombongan belajar. □

MENGUBAH WAJAH PENDIDIKAN MAMUJU

Sempat terkendala di awal pembangunannya, pada 1964 berdiri sebuah SMA di Mamuju. kini, SMAN 1 Mamuju telah menunjukkan kiprahnya di wilayah Sulawesi Barat.

SMA Negeri 1 Mamuju berdiri pada tanggal 30 Juli 1964 ketika sekolah ini didirikan hanya memiliki beberapa kelas saja. Abd. Rohim Mustofa, BA selaku pendiri dan juga kepala sekolah pertama yang berada di kabupaten Mamuju. Sebelumnya bernama SMA Negeri 288, pada tahun 1979 yang terletak di Jl. Pendidikan No.1 Mamuju.

Mamuju pernah masuk ke dalam Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga di masa itu daerah Mamuju sulit dibangun. Pada mulanya ketika sekolah akan dibangun pemerintah pusat tidak mengizinkan siapapun untuk mendirikan bangunan jika tidak mempunyai pondasi, maka pada waktu itu Abd. Rohim Mustofa tidak kehabisan akal dan dengan penuh semangat dan perjuangan yang gigih iapun mampu untuk meyakinkan pemerin-



SMAN 1 Mamuju



Kondisi SMAN 288 Mamuju di masa awal pendirian.

tah untuk segera mendirikan sekolah ini. Akhirnya jadilah SMA Negeri 288 sesuai dengan keputusan Menteri (SKM) yang kemudian sekolah ini dipimpin oleh Abd. Rohim Mustofa, BA. SMA Negeri 288 kemudian berubah menjadi SMA Negeri 1 Mamuju.

Dalam perkembangannya, sekolah ini memiliki banyak tantangan. Pada awal pendirian, salah satunya adalah banyaknya guru-guru yang mengajar di sekolah ini berasal dari luar wilayah Mamuju sehingga di SMA Negeri 288 ini menyediakan tempat tinggal untuk guru. Setelah berdirinya sekolah ini maka akses pendidikan khususnya di Kabupaten Mamuju menjadi semakin mudah. SMA Negeri 1 Mamuju sekarang terletak di Jalan Kumbang Lolo Nomor 1 Mamuju.

Kini, sekolah yang dipimpin oleh Rusman ini memiliki peserta didik sebanyak 973 siswa dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 28 rombongan belajar. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 51 orang dan sarana yang cukup memadai, ini menjadi daya dukung SMA Negeri 1 Mamuju untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Hal ini terbukti dengan diraihnya berbagai prestasi baik di tingkat kabupaten maupun menjadi peserta secara nasional.

Dalam proses pembelajaran, SMA Negeri 1 Mamuju melaksanakan kurikulum tahun 2013. Dalam keseharian proses pembelajaran, di sekolah ini ditanamkan pendidikan karakter terhadap siswa-siswanya mulai dari awal



Aktivitas peserta didik SMAN 1 Mamuju.

masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah. Seluruh warga sekolah bahu membahu untuk membiasakan diri bersikap sopan, ramah, disiplin dan bertanggung jawab menjaga kebersihan.

Setiap pagi guru-guru menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah untuk saling menyapa satu sama lain, siswa diarahkan untuk parkir dengan rapi dan sebelum memulai belajar selalu dibiasakan untuk berdoa. SMA Negeri 1 Mamuju sudah menerapkan 5 hari sekolah, meskipun banyak tantangan. Di tangan guru-guru yang professional, SMA Negeri 1 Mamuju berupaya untuk terus meningkatkan kualitas lulusannya. Dari tahun ke tahun, jumlah alumni SMA Negeri 1 Mamuju yang diterima di perguruan tinggi negeri baik di wilayah Sulawesi maupun di wilayah lainnya semakin meningkat.

Sekolah selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Hal ini dilakukan dengan mulainya menata lingkungan sekolah. Proses pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa-siswi SMA Negeri 1 Mamuju memiliki motivasi yang kuat dalam belajar.

Kepala sekolah berharap peningkatan mutu pendidikan harus menjadi tujuan utama. Penanaman nilai-nilai karakter betul-betul harus dilaksanakan melalui berbagai aktivitas atau proses pembiasaan. Dengan penguatan karakter itulah kemudian mampu mengubah wajah pendidikan di kota Mamuju. "Dengan potensi yang ada di kota Mamuju ini, kami berharap besar pada pelajar-pelajar di kota ini agar bisa mengembangkan dan memajukan tanah kelahirannya" ujar Rusman. □

SETIA MENDIDIK SISWA AGAR BERBUDI

Meski menuai banyak kendala di awal pendirian, mimpi untuk mendirikan sekolah menengah atas tetap terwujud berkat kerja keras dan dukungan semua kalangan. Tenaga guru pun sampai didatangkan dari Jawa, di samping karyawan PN Timah.

Dibandingkan profil sekolah lainnya, SMAS Setia Budi terbilang muda. Namun kisahnya menarik. Pada era tahun 1975-an ada satu nama yang begitu dikenal Sungailiat, Bangka, Provinsi Sumatera Selatan (sekarang menjadi provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Namanya Pak Yan. Sebut nama ini kebanyakan penduduk di sana langsung menunjukkan SMAS Setia Budi yang berlokasi di di Jalan Jenderal Sudirman, No. 16, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Tentu sedikit aneh,



SMA Setia Budi Sungailiat

sebutan sekolah memakai nama orang. Rupanya Pak Yan adalah sebutan populer untuk SMA Pak Yan yang tak lain adalah SMAS Setia Budi. Satu-satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota Sungailiat di tahun itu, ya SMA Pak Yan, sesuai dengan kepala sekolah yang memimpin ketika itu, yakni Sopyan Ilazim. Bangunan yang dipakai adalah milik Yayasan Pendidikan Lembaga Nasional Setia Budi.

Pada saat itu kegiatan belajar mengajarnya (KBM) berlangsung sore hari dan pulang malam hari. Hampir semua guru yang mengajar di SMA Pak Yan karyawan PN Timah, termasuk kepala sekolahnya. Karena merupakan sekolah menengah atas satu-satunya, SMA Pak Yan menjadi incaran semua lulusan SMP di Sungailiat. Calon siswa yang tidak tertampung di sekolah swasta ini akhirnya melanjutkan pendidikan ke Palembang, Pangkalpinang, ataupun ke Pulau Jawa. Kebanyakan tentu yang orang tuanya memiliki dana cukup. "Melihat kondisi ini muncul gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah menengah atas yang dinamakan SMAS Setia Budi," kata Ujang Rusman, Kepala Sekolah SMAS Setia Budi saat menceritakan awal mula sekolah ini. Alasan paling kuat adalah karena pada saat itu belum ada sekolah menengah atas yang berstatus negeri di Sungailiat.

Di saat pemerintah belum dapat memberikan pemerataan pendidikan di bidang sekolah menengah atas, sejumlah tokoh dengan semangat berusaha mewujudkan gagasan. Kemudian secepatnya diadakan pertemuan antara pihak yayasan yang dihadiri oleh Fuad Man, Hendri Purnomo, Soetikno, Suradi Setiawan (Sak Sun) dengan para pejabat pemerintah daerah yang terdiri dari Khoiri, Abdulah Umar, Aseli Effendi, Damhuri Razak, serta Ahyar Anwar. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kemudian diambil kesepakatan agar tim dibagi dua. Satu tim melakukan lobi dengan Bupati Bangka yang ketika itu dijabat oleh H. M. Arub, SH, tim yang lainnya mencari dana awal pembentukan dengan menemui Setiawan Barin (Tjhong A Djin) di Jakarta, serta melobi Gunawan Gomar (Ng Djun Nyun) seorang pengusaha yang cukup terkenal dikota Sungailiat ketika itu.

Ujang mengatakan, saat itu, proses keluarnya rekomendasi kembali mengalami kendala menyangkut komposisi siswa dan ketersediaan guru pengajar. Pemerintah daerah saat itu menginginkan komposisi jumlah siswa 60% untuk pribumi dan 40% untuk WNI keturunan. Begitu pula dengan komposisi gurunya. "Saat itu yang dapat dipenuhi hanya komposisi jumlah guru karena alasan ingin memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan. Akhirnya pihak Pemda dapat memaklumi dan menyetujui," katanya. Setelah proses yang cukup alot, kemudian terbitlah Surat Kepu-



Siswa SMA Setia Budi Sungailiat di masa silam

tusan Kepala Daerah TK II Bangka Nomor 253/ kpts/ VI/ 1975 tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Yayasan Pendidikan Lembaga Nasional Setia Budi. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Bangka dengan petikan pengesahan oleh Sekretaris Wilayah daerah Drs. Zaini Anwar tertanggal 22 Agustus tahun 1975.

Mencari Dana dan Guru Tambahan

Meski ijin pendirian sekolah telah dikantongi, kondisi bangunan yang ditempati oleh SMAS Setia Budi kurang memadai. Akhirnya, dengan bantuan Pemda Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah donatur, bangunan sekolah pun bisa diperbaiki. Namun tantangan yang dihadapi bukan hanya fasilitas. Ketersediaan tenaga pengajar juga menjadi kendala tersendiri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut, salah satu guru SMAS Setia Budi bernama Soetikno berangkat ke Jogjakarta untuk menemui kepala SMAS Bhineka Agung Krisna yang kebetulan adalah alumni SMA itu. "Kemudian dapatlah beberapa orang guru dari sana," ujar Ujang.

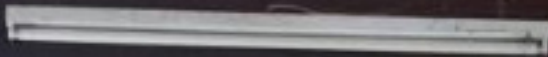
Untuk fasilitas tempat tinggal, sejumlah guru tersebut ditempatkan pada lingkungan sekolah dengan kondisi yang tidak terlalu memadai. Maklum, saat itu kondisi keuangan sekolah belum baik. karena dirasa masih kurang, untuk melengkapi tambahan guru, Bupati memberi rekomendasi

beberapa pegawai Pemda untuk membantu kegiatan belajar mengajar dengan syarat tidak melalaikan tugas utamanya sebagai pegawai Pemda. “Guru-guru tersebut pada waktu itu harus bolak balik antara kantor di Pemda dan mengajar di SMA Setia Budi,” ujarnya.

SMAS Setia Budi memulai kegiatan operasionalnya secara resmi pada Agustus 1976. Saat itu, penerimaan awal kelas satu sebanyak tiga kelas dengan jumlah siswa kurang lebih 100 orang. Sedangkan untuk kelas dua, adalah pengalihan siswa titipan dari kelas jauh SMA 1 Pangkalpinang ke SMAS Setia Budi. Seiring berjalannya waktu, siswa SMAS Setia Budi semakin banyak. Maka pada sekitar tahun 1991, dilaksanakan pembangunan gedung berlantai dua dan perubahan pola manajemen. Prestasi dengan prestasi pun berdatangan ke sekolah ini melalui keikutsertaan siswa-siswanya di berbagai ajang lomba olahraga, seni dan lainnya. Di tingkat kabupaten, siswa sekolah ini menyabet juara 1 untuk lomba puisi, monolog sampai lomba nyanyi. Manajemen sekolah juga aktif memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pendidikan dengan mengadakan seminar berkala berkaitan dengan peringatan hari pendidikan nasional. “Kami ingin pendidikan di Indonesia maju,” begitu kata Kepala Sekolah SMAS Setia Budi.

Untuk mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada mutu, berbudaya cinta dan peduli lingkungan, serta mampu menghasilkan keluaran yang berwawasan lokal dan global, berbudaya bangsa dalam semangat kebangsaan dan model sekolah yang multi budaya, SMAS Setia Budi akan membuka jurusan baru, yaitu jurusan Bahasa Mandarin, untuk melengkapi jurusan yang sudah ada yaitu IPA dan IPS. Pembukaan jurusan baru mulai tahun ajaran 2018/2019. Latar belakangnya adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan masa depan. Pada dasarnya bahasa mandarin bukan pelajaran yang asing bagi siswa SMAS Setia Budi Sungailiat, karena bahasa Mandarin sudah diajarkan sejak beberapa tahun yang lalu. Guru yang mengajar Bahasa Mandarin direkrut dari alumni SMAS Setia Budi sendiri yang dikirim belajar ke China.

Langkah pembukaan jurusan ini sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan nomor surat 421.3/2888/Disdik/2017 tertanggal 26 September 2017. Penduduk Kota Bangka sendiri banyak dari keturunan Cina dan mereka dapat hidup berdampingan secara damai karena menjunjung tinggi keberagaman. Jayalah SMAS Setia Budi yang selalu setia mendidik siswa agar berbudi. □



SMAN 1 SURABAYA

08-11-2017 Rabu 07:08:31



SMAN
1
SBY



Bab VI

SMA MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21

Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Hal ini menuntut kompetensi yang juga berubah. Juga dalam proses pembelajaran di SMA. Bagaimana SMA dalam menghadapi tantangan abad 21?

Dinamika pendidikan tidak lepas dari perubahan zaman. Perubahan dalam dunia pendidikan terkait erat dengan kompetensi yang dibutuhkan pada zamannya. Anak-anak yang saat ini belajar, akan memasuki abad 21 yang juga memerlukan keterampilan hidup yang berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi di abad 21.

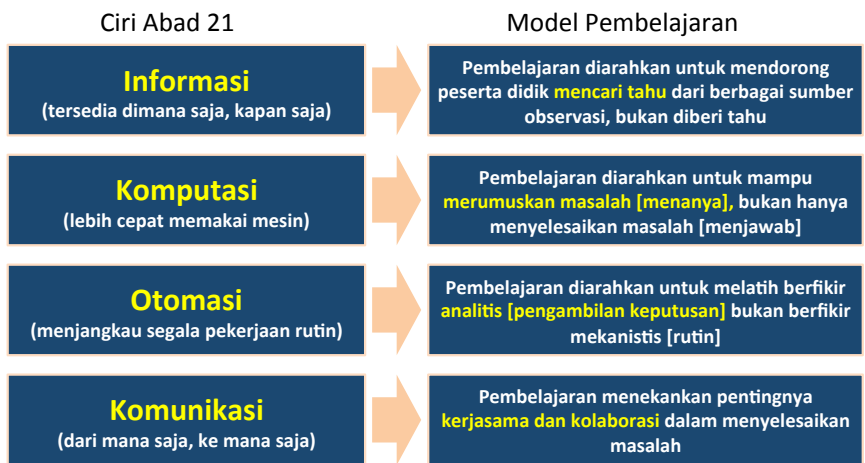
A. KONDISI ABAD 21

Anak-anak yang saat ini belajar di SMA, akan menghadapi tantangan kehidupan pada beberapa tahun ke depan. Mereka akan hidup di abad 21 yang situasi dan kondisinya sangat berbeda dibandingkan zaman ini, manakala mereka sedang belajar. Oleh karena itu proses pembelajaran yang dilakukan saat ini benar-benar harus menyiapkan anak untuk hidup di zamannya. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian setiap sekolah ketika menyiapkan peserta didiknya saat ini.

1. Perubahan Teknologi dan Informasi

Teknologi dan informasi berubah sangat drastis dan mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Sejumlah hal mendasar mengalami perubahan yang sangat drastis yang bertolak belakang. Beberapa kondisi yang dialami pada abad 21 adalah sebagai berikut:

1. Informasi tersedia di mana saja, kapan saja. Gelombang informasi secara massif diterima oleh semua orang secara real time. Sumber informasi tersedia dengan mudah, siapapun dapat mengakses informasi dengan mudah. Peristiwa di satu wilayah secara real time dapat diketahui oleh orang di belahan dunia lain. Hal ini mengubah konsepsi orang tentang akses dan konten informasi.
2. Komputasi digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Kegiatan dan aktivitas manusia dilakukan lebih cepat dan penggunaan mesin pada berbagai aktivitas.
3. Otomasi merupakan aktivitas dilakukan pada semua aktivitas. Semua kegiatan dilakukan secara otomatis terutama pekerjaan rutin yang merupakan pengulangan pekerjaan.
4. Komunikasi dapat dilakukan dari mana saja kapan saja secara



Gambar 6.1 Ciri abad 21 dan perubahannya terhadap model pembelajaran

mudah menggunakan alat komunikasi yang bukan hanya berbasis audio, melainkan teks, visual, dan audio visual.

Semua kondisi itu berdampak pada perubahan dalam pendidikan di seluruh satuan pendidikan, tak terkecuali di SMA. Transfer pengetahuan tidak bisa lagi bersumber dari guru, karena informasi tentang pengetahuan apapun tersedia dengan mudah melalui fasilitas internet.

Pola pikir kreatif menjadi hal yang penting karena bukan hanya membutuhkan pola pikir linier yang dilakukan dengan mekanistik rutin. Melainkan harus mampu menganalisis dan mengambil keputusan kreatif.

Yang tak kalah penting adalah persaingan tidak selalu relevan, karena yang lebih utama adalah kolaborasi dan kerjasama, di mana setiap pihak mengedepankan kompetensi masing-masing

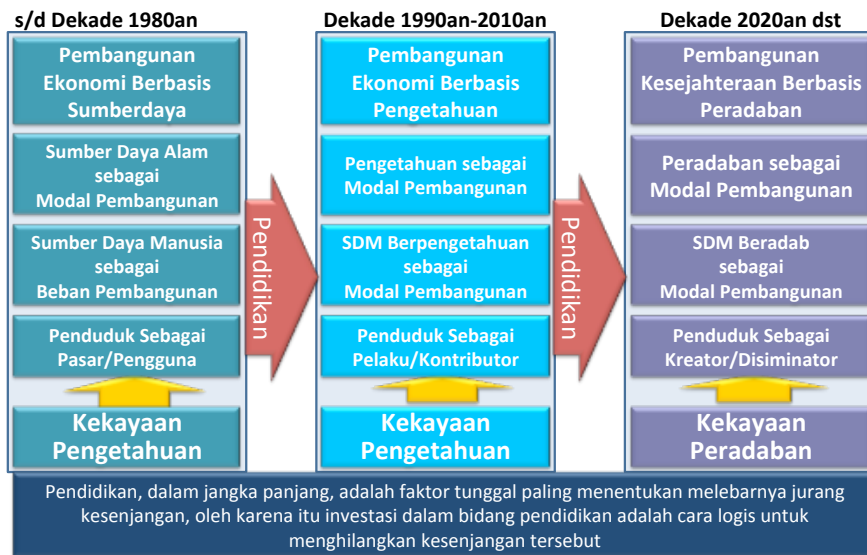
2. Pergeseran Paradigma Pembangunan

Pembangunan manusia mengalami tiga periode yang sangat penting. Yakni periode sampai dekade 80-an, periode 1990-2010 dan periode setelah 2010. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Pada periode 80-an pembangunan manusia didasarkan pada ekonomi berbasis sumberdaya. Yang menjadi modal pembangunan adalah sumber daya alam. Pada periode ini eksplorasi

dan eksploitasi sumber daya alam menjadi aktivitas yang dilakukan sebagai penopang kegiatan ekonomi. Dalam kondisi demikian, sumberdaya manusia adalah pasar dari semua produk dan cenderung menjadi beban pembangunan. Yang terpenting di sini adalah kekayaan pengetahuan.

Pada periode 1990 s.d. 2010 pembangunan manusia lebih mengandalkan basis pengetahuan. Yang menjadi modal pembangunan adalah pengetahuan. Dalam kondisi ini SDM berpengetahuan adalah modal pembangunan. Dalam konteks ini, penduduk berperan sebagai pelaku atau kontributor. Dalam kaitan ini kekayaan pengetahuan juga menjadi hal yang penting.

Akan tetapi dalam periode 2020 dan seterusnya, pembangunan lebih fokus pada pembangunan kesejahteraan berbasis peradaban. Modal utama yang menjadi modal pembangunan adalah peradaban itu sendiri di mana SDM beradab menjadi kekuatan yang utama. Posisi penduduk sebagai kreator/diseminator. Kekayaan yang terpenting di sini adalah kekayaan peradaban. Secara skematis dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Pergeseran paradigma pembangunan

3. Globalisasi

Globalisasi menjadi suatu keniscayaan mengingat lalu lintas di dunia maya dapat terjadi tanpa batas lagi. Hal ini berdampak pada kehidupan manusia secara luas. Baik di bidang perdagangan, industri dan pergerakan manusia antarwilayah. Kondisi ini membutuhkan kompetensi baru yang harus dipelajari manusia melalui satuan pendidikan agar dapat mengimbangi perubahan dunia yang mengglobal.

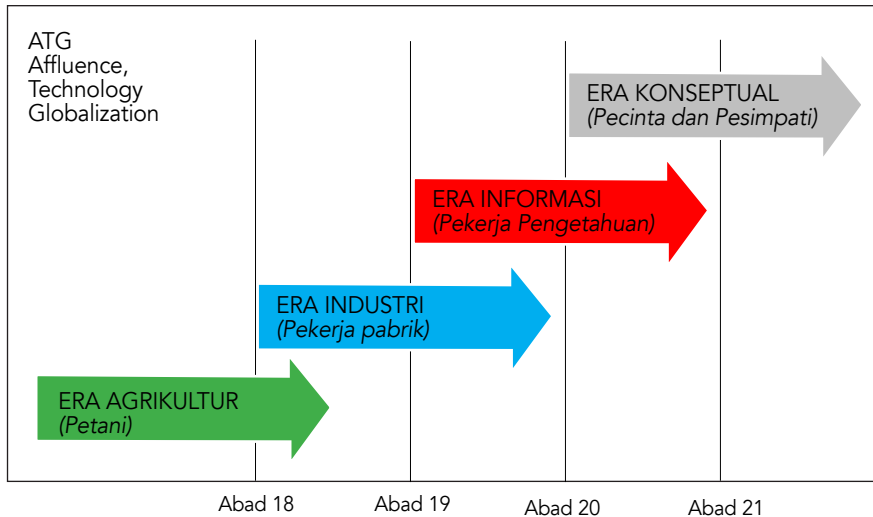
4. Keterampilan abad 21

Semua perubahan yang terjadi membawa konsekuensi pada keterampilan hidup yang dibutuhkan. Itulah yang disebut sebagai 21st Century Skill Competencies atau Kompetensi abad 21. Para ahli merinci jenis keterampilan abad 21 yang berbeda tetapi memiliki fokus yang sama.

Daniel Pink dalam bukunya *Misteri Otak Kanan Manusia* (2006), menyebut zaman itu sebagai Era Konseptual. Pada era itu, yang akan sukses adalah para pencipta dan pesimpati. Secara lebih rinci, Pink mengemukakan bahwa manusia yang akan menjadi pemimpin di era ini harus memiliki apa yang ia sebut sebagai *Six High-Concept And High-Tought Senses In The Conceptual Age*. Inilah konsep yang berperan penting untuk kesuksesan hidup di masa datang.

Keenam konsep yang diungkap Pink adalah (1) Bukan hanya fungsi, di era konseptual "Desain" akan memiliki peran yang penting; (2) Bukan hanya argumentasi, "Kisah" akan menjadi sesuatu yang bernilai; (3) Bukan hanya fokus, tetapi juga diperlukan "Simfoni"; (4) Tidak hanya logis, tetapi diperlukan "Empati"; (5) Bukan hanya serius, tapi lebih dari itu harus "Melakukan secara langsung"; dan (6) Bukan hanya akumulasi, melainkan yang penting adalah memiliki "Makna". Inilah yang harus menjadi perhatian lulusan sekolah pada Era Konseptual.

Di Era Konseptual tersebut, menurut Wagner dalam bukunya *Global Achievement Gap* (2008) akan terjadi kesenjangan antara apa yang dibelajarkan di sekolah-sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia nyata. Sekolah-sekolah yang tidak menyadari hal ini, hanya akan melahirkan lulusan yang tidak bisa



Sumber : Pink (2006)

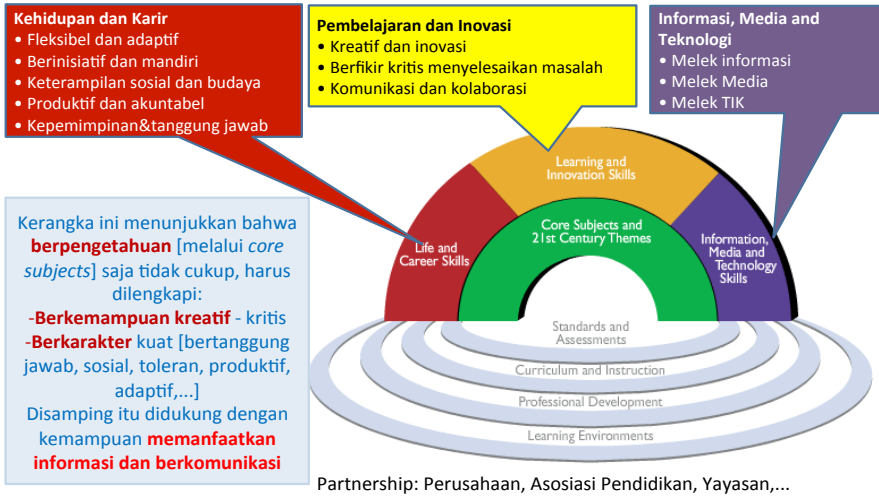
Gambar 6.3. Perkembangan menuju Era Konseptual

hidup optimal di zamannya. Oleh karena itu, lanjut Wagner, siswa di Amerika Serikat, sangat berkepentingan untuk menguasai keterampilan utama agar bertahan hidup dan beradaptasi dengan perubahan.

Terdapat tujuh jenis keterampilan, menurut Wagner, yang diperlukan, yakni: (1) terampil berpikir kritis dan memecahkan masalah; (2) kolaborasi berbasis jaringan dan memimpin dengan pengaruh; (3) mampu mengubah arah dan bergerak secara cepat dan efektif dan beradaptasi; (4) memiliki daya inisiatif dan berkewirausahaan; (5) bicara dan memiliki kemampuan menulis secara efektif; (6) mengakses dan menganalisis informasi; dan (7) bersikap selalu ingin tahu dan berimajinasi.

Secara lebih komprehensif, kompetensi abad 21 diidentifikasi dalam sebuah istilah yang disebut "kerangka kompetensi". Penyebutan kerangka kompetensi menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak lah cukup untuk bekal hidup di abad 21. Melainkan harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, berpikir kritis, dan memiliki karakter yang kuat, serta harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lulusan sekolah harus menyadari tentang kehidupan dan karir yang akan mereka dihadapi. Hal tersebut akan membawa pengaruh

Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008



Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008

Gambar 6.4 Kerangka Kompetensi Abad 21

pada apa saja yang harus mereka pelajari. Sementara itu, penguasaan teknologi, media, dan informasi merupakan hal yang mutlak. Secara grafis kerangka kompetensi disajikan pada Gambar 6.4.

Uraian di atas menjadi dasar mengapa lulusan SMA perlu menguasai kompetensi abad 21. Selain itu, sudut pandang dari dunia ketenagakerjaan juga menjadi pertimbangan yang penting. Pekerjaan sektor jasa, baik jenis pekerjaan “upah rendah” maupun “upah tinggi” menurut Jerald (2009), akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sebagai contoh dengan pensiunnya para pekerja profesional akan terbuka peluang kerja untuk layanan jasa perawatan lansia, dan di sisi lain membuka kesempatan pekerja terampil yang kompeten untuk menggantikan mereka.

B. TUNTUTAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Terdapat empat kompetensi abad 21 yang menjadi dasar yang harus dikuasai oleh seluruh manusia yang hidup pada abad 21. Apapun pendidikan yang diikuti setiap individu, keempat kompetensi ini mutlak dikuasai. Keempat kompetensi itu adalah berpikir kritis, berkomunikasi, kreativitas,

dan kolaborasi. Dalam istilah populer dikenal dengan 4-C yakni *Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration*. Oleh karena itu semua orang dituntut untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat bersaing pada abad 21.

Dengan perubahan itu, maka berbagai jenis pekerjaan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dohm dan Shniper (2007) menyebut 20 jenis pekerjaan yang tumbuh pesat membutuhkan kompetensi yang sesuai. Secara lengkap disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1. Duapuluh jenis pekerjaan dengan pertumbuhan tertinggi dan menyediakan banyak lapangan kerja

20 Pekerjaan dengan laju pertumbuhan terpesat	20 pekerjaan yang akan paling banyak menyediakan lapangan kerja
Analisis sistem jaringan dan komunikasi data	Perawat
Pembantu pribadi dan rumah tangga	Tenaga penjualan ritel
Pembantu perawatan kesehatan di rumah	Perwakilan layanan pelanggan
Ahli peranti lunak komputer dan aplikasi	Pekerja usaha makanan
Penasihat keuangan pribadi	Pegawai administrasi dan umum
Ahli teknologi dan teknisi kedokteran hewan	Asisten pribadi dan rumah tangga
Perias artis, teater dan panggung	Asisten perawatan kesehatan di rumah
Asisten medis	Pengajar perguruan tinggi (dosen)
Dokter hewan	Petugas kebersihan selain pembantu dan pembersih rumah tangga
Konselor penyalahgunaan NAPZA dan gangguan perilaku	Perawat, pendamping perawat, dan pembantu
Ahli perawatan kulit	Petugas pembukuan, akuntansi dan audit
Analisis keuangan	Pelayan
Asisten layanan sosial dan kesejahteraan	Pekerja penitipan anak
Petugas pengawasan gaming dan penyelidikan gaming	Sekretaris eksekutif dan asisten administrasi
Asisten terapis fisik	Ahli peranti lunak komputer, aplikasi
Teknisi farmasi	Akuntan dan auditor
Teknisi ilmu forensik	Petugas lansekap dan tukang kebun
Ahli kebersihan gigi	Guru SD, selain pendidikan khusus
Konselor kesehatan mental	Resepsionis dan pegawai bagian informasi
Pekerja sosial kesehatan mental dan penyalahgunaan NAPZA	Sopir truk dan kendaraan berat

Sumber: Dohm, A. & Shniper, L. (2007).

Jenis pekerjaan di atas pada umumnya memerlukan tenaga lulusan sekolah pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan penguasaan kompetensi yang relevan pada zamannya. Oleh karena itu, jenjang pendidikan menengah, sebagai jembatan menuju perguruan tinggi dan dunia kerja memiliki posisi yang sangat strategis.

C. PERUBAHAN PARADIGMA BELAJAR.

Sejalan dengan pergeseran kompetensi yang dibelajarkan di sekolah, menyesuaikan dengan *21st Century Skill Competencies*, diperlukan penyesuaian dalam proses pembelajaran. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi, dicirikan dengan empat fenomena yang terjadi.

Pertama, perkembangan informasi membuat informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Hal ini berakibat, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses sumber informasi dan materi ajar. Kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang mutlak dikuasai dan dibarengi dengan kompetensi untuk menyeleksi sumber informasi yang benar di tengah banyaknya informasi yang menyesatkan.

Kedua, perkembangan teknologi juga melahirkan era komputasi di mana aktivitas manusia lebih cepat dilakukan dengan memanfaatkan mesin. Segala aktivitas manusia yang mekanis dan membutuhkan waktu lama, akan digantikan oleh mesin dan dapat diselesaikan lebih cepat. Tidak terkecuali hal-hal dalam dunia pendidikan.

Ketiga, pekerjaan rutin dan berulang akan tergantikan dengan piranti lunak dan aneka instrumen. Kegiatan pembelajaran tidak akan lepas dari perkembangan teknologi ini. Misalnya dalam kegiatan penilaian dan pengadministrasian pembelajaran akan didukung aplikasi yang sesuai.

Keempat, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah di seluruh permukaan bumi, dari mana saja dan ke mana saja. Bukan saja komunikasi berbasis teks, melainkan komunikasi audio dan visual. Semua perubahan yang terjadi ini jelas mempengaruhi model pembelajaran.

Dengan berbagai perubahan paradigma itu, maka secara teknis pembelajaran pun akan mengalami pergeseran. Pembelajaran abad 21 adalah proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, berbasis kebutuhan (*inquiry based*), kaya teknologi, interdisiplin, kolaboratif, dan personal. Untuk menumbuhkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga mereka memiliki keterampilan beradaptasi dengan perubahan secara berkelanjutan.

Adapun secara teknis, pergeseran yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Proses pembelajaran akan lebih variatif, berpusat pada siswa, dengan menggunakan aneka sumber dan bahan belajar dalam lingkungan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan dominasi penggunaan komputer;
- Sistem penilaian dan pengadministrasian pendidikan dilakukan lebih komprehensif dan kredibel dengan menggunakan basis teknologi informasi secara optimal, di mana acuan penilaian menggunakan acuan kriteria dan penilaian berbasis kinerja;
- Lingkungan belajar yang berubah karena pada abad ini belajar lebih menekankan pada *interconnected and technology-driven world, a learning environment can be virtual, online, remote*. Dengan kata lain belajar dapat dilakukan tidak hanya di dalam kelas. Lebih jauh lingkungan sekolah lebih dibutuhkan sebagai pusat pembelajaran bagi sebuah komunitas dengan layanan waktu yang lebih panjang karena di dalamnya tersedia layanan teknologi, tempat rekreasi dan pusat layanan kesehatan.
- Konsep ruang kelas akan berubah sesuai perubahan proses pembelajaran dan tuntutan kompetensi yang dibelajarkan.
- Budaya berproduksi (menghasilkan sesuatu) menjadi bagian penting dalam pembelajaran sebagai upaya melahirkan masyarakat yang produktif. Materi pembelajaran lebih kompleks berorientasi pada permasalahan yang ada di masyarakat;
- Tren TIK mengarah ke *mobile communication* akan melahir-

kan kebutuhan pembelajaran yang individual. Komputer akan digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas pendidikan;

- Untuk mengantisipasi pembelajaran berbasis teknologi informasi, maka kompetensi guru di bidang teknologi informasi menjadi sesuatu yang sangat signifikan.

Menghadapi perubahan itu, maka fokus pada pada pendidikan agama dan kewarganegaraan harus makin kokoh sebagai basis dasar pendidikan nasional.

- Pendidikan agama di sekolah makin diperkuat sebagai landasan pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur di tengah gelombang perubahan yang dahsyat;
- Pendidikan kewarganegaraan diperkuat untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, nilai-nilai toleransi, penghargaan pada keragaman sosial budaya, hak-hak sipil dan kewarganegaraan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik;
- Karakter dan budaya Indonesia adalah kekayaan yang memiliki nilai sangat penting untuk dikembangkan di satuan pendidikan.

D. PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR

Di era globalisasi pergerakan manusia memiliki mobilitas yang luas dan lintas negara. Mobilitas manusia dalam berbagai kebutuhan ini akan membawa konsekuensi pada perlunya kompetensi yang setara dan diakui oleh masyarakat dunia. Keteraan dan pengakuan ini akan mendorong lahirnya sertifikasi terhadap segala hal yang akhirnya berujung pada perlunya standarisasi.

Standar berisi tentang spesifikasi teknis dan kriteria-kriteria khusus terukur lainnya, terbuka, dan menggunakan bahasa umum. Ciri standar adalah sebagai kriteria minimal, fleksibel, dinamis, kontekstual, dapat diukur (*measurable*) dan dapat dicapai (*achievable*).

Standar dirancang untuk digunakan secara konsisten sebagai aturan, pedoman, acuan, atau sebagai definisi. Dalam penyusunan dan pengembangannya, standar harus dirancang untuk bersifat sukarela

dan bukan aturan yang mengikat. Namun demikian, peraturan perundang-undangan dapat mengacu dan menggunakan standar tertentu untuk dipatuhi. Hal ini menyebabkan standar bersifat wajib dan mengikat.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia di era globalisasi, maka pendidikan Indonesia harus didorong pada pengakuan dunia terhadap hasil pendidikan satuan pendidikan Indonesia. Untuk itu, maka proses pendidikan harus didorong pada pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengertian umum, standar pendidikan dibagi dalam dua kelompok yakni kelompok standar kompetensi yang dikuasai peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dan standar layanan pendidikan.

Standar dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disusun dengan prasyarat yakni:

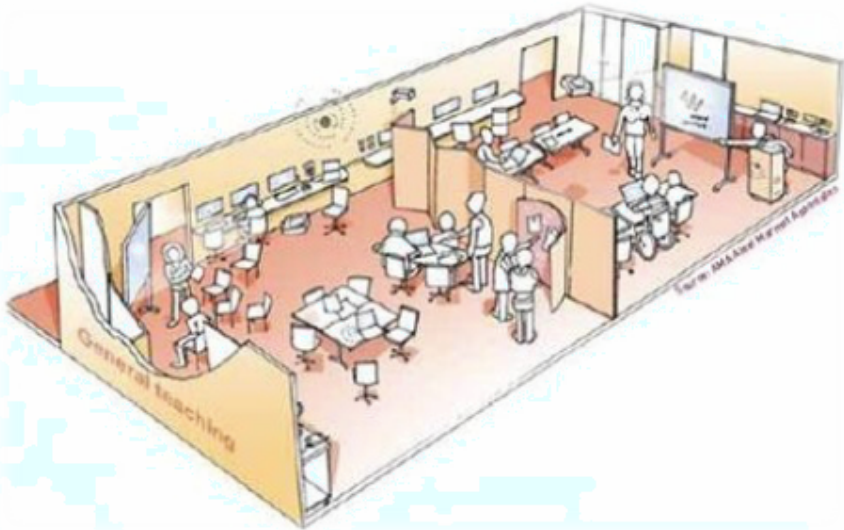
- untuk semuanya dalam konteks NKRI;
- untuk memantau kemajuan mutu pendidikan;
- sebagai tanggung jawab kita dalam memberikan layanan pendidikan;
- untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- untuk menjadi acuan untuk belajar para guru, dan siswa.

Atas dasar itulah maka SMA menggunakan SNP sebagai salah satu basis dalam pemenuhan layanan pendidikan. Terdapat delapan SNP yang harus menjadi acuan.

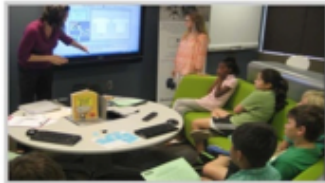
E. LINGKUNGAN BELAJAR SMA MASA DEPAN

Mengingat peserta didik SMA berada pada masa remaja, lingkungan belajar di SMA harus memenuhi persyaratan terutama bagi pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pemberdayaan potensi peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya yang disertai dengan pertumbuhan secara emosional, sosial, fisik, dan akademik.

Istilah "*learning environment*" perlu lebih diberdayakan lagi pada abad ke-21 karena pada abad ini belajar lebih menekankan pada *in-*



Pengelompokan Interdisiplin:
Format ruang dimanfaatkan secara bersama sesuai dengan tujuan.



Sumber: the American Architectural Foundation (2005).

Gambar 6.5. Desain Ruang kelas untuk pembelajaran abad 21

terconnected and technology-driven world, lingkungan belajar lebih banyak dilakukan secara virtual, online, dan dikendalikan secara jarak jauh. Dengan kata lain belajar dapat dilakukan tidak hanya di dalam kelas semata-mata. Inilah keunikan belajar pada abad ke-21 yang perkembangannya perlu diantisipasi sejak awal.

Berkean dengan itu, Sammon (1999) mengatakan bahwa desain ruang pembelajaran abad 21 bukan berbasis bangunan, melainkan

tempat yang mengakomodasi hubungan antarmanusia sebagai kunci sukses pada abad 21. Harus dirancang suasana lingkungan di mana anak dan guru satu dengan lain saling berhubungan bukan sebagai guru dan murid melainkan sebagai sesama manusia. Suasana sekolah harus bersahabat, terbuka, terbuka akses untuk kerjasama dan interaksi, jauh dari potensi suasana yang tidak menyenangkan. Ruang kelas seperti apakah yang cocok sebagai lingkungan belajar bagi pembelajaran semacam itu? Di bawah ini disajikan ruang kelas pada abad ke-21 yang dirancang oleh the *American Architectural Foundation* (2005).

Ruang kelas pada abad ke-21 mungkin tidak terlalu besar, tetapi menampung segala kebutuhan belajar bagi peserta didik. Menurut the *American Architectural Foundation* (2005) bahwa ruang kelas akan menjadi ruang berbagi untuk semua aktivitas yang dilakukan siswa. □



Bab VIII

PENUTUP

Perjalanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dari masa ke masa turut mewarnai perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Perubahan demi perubahan terus terjadi. Tantangan yang tak kalah ringan adalah tantangan di masa depan.

Menelusuri perjalanan pendidikan menengah umum di Indonesia, seperti menelusuri jalan panjang dan berliku. Sejak zaman penjajahan, era kemerdekaan, era orde baru, era reformasi hingga saat ini, penuh dengan perubahan demi perubahan. Banyak hal yang melatarbelakangi perubahan-perubahan yang terjadi. Mulai dari direbutnya kemerdekaan, pergantian kepemimpinan bangsa, hingga perubahan zaman yang tidak dapat dihindari.

Untuk memudahkan penelusuran perjalanan SMA dari masa ke masa, perlu dilakukan pembabakan sejarah terkait dengan posisi Sekolah Menengah Atas. Di masa penjajahan, terdapat dua jalur pendidikan yang dibedakan sasaran muridnya. Ada HBS yang lamanya lima tahun, yang merupakan pendidikan setara SMP-SMA. HBS diperuntukkan bagi anak-anak orang Eropa dan segelintir pribumi. Satu lagi adalah AMS yang setara SMA berdurasi tiga tahun yang diperuntukkan bagi pribumi lulusan MULO, yang setara SMP yang juga berdurasi tiga tahun.

Di Era penjajahan ini nampak sekali diskriminasi yang ditunjukkan kaum kolonial dalam melakukan proses pendidikan. Hal ini tentu bagian dari penjajahan yang dialami.

Setelah merdeka, terjadi perubahan yang drastis. Sekolah-sekolah nasional berdiri dan mulai melakukan proses pendidikan ala Indonesia. Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa dan Mohammad Syafei melalui INS Kayutanam, merupakan pola pendidikan ala Indonesia yang diperkenalkan kala itu. Pola-pola pendidikan pada zamannya diakui cukup ampuh dalam membangun jiwa dan badan manusia Indonesia kala itu.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan pun mengalami perubahan yang cukup banyak. Bukan saja dalam kebijakan kurikulum, melainkan juga dalam kelembagaan, dan dukungan pemerintah terhadap satuan pendidikan. Jika pada awal kemerdekaan lebih banyak satuan pendidikan swasta yang melayani pendidikan bagi masyarakat, maka lambat laun pemerintah mengambil alih pengelolaan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya sekolah negeri yang cikal bakalnya adalah sekolah masyarakat. Akibatnya, sekolah negeri pun bermunculan di berbagai wilayah. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan ini, bukan saja mengubah model kelembagaan dan keterlibatan guru, juga mengubah sistem pendidikan secara nasional.

Rata-rata setiap sepuluh tahun terjadi perubahan kebijakan kurikulum dalam dunia pendidikan yang berimplikasi pada perubahan dalam bi-

dang kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan. Selain itu juga berdampak pada sistem secara keseluruhan.

Era Reformasi yang salah satu intinya adalah terjadinya proses otonomi daerah, juga berdampak pada pengelolaan satuan pendidikan yang semula terpusat, berubah menjadi terdesentralisasi di daerah. Hal ini membawa pengaruh luas dalam dunia pendidikan. Terlebih sejak keluarnya Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003.

Perubahan demi perubahan ini, perlu didokumentasikan secara rinci sebagai bahan referensi bagi semua pihak dalam upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dengan berkaca pada pengalaman di masa silam. Terjadinya perubahan nomenklatur SMOA (Sekolah Menengah Oemoem Atas), ke SMT (Sekolah Menengah Tinggi), SMA, lalu SMU, dan kembali SMA, dapat dipotret sebagai konsekuensi dari adanya perubahan kebijakan dalam layanan pendidikan menengah di Tanah Air.

Demikian pula halnya dengan pola pembinaan satuan pendidikan SMA misalnya, di masa silam ada penomoran sekolah sesuai usia sekolah, serta model pembinaan SMA Teladan, merupakan hal-hal yang perlu dicermati sebagai bahan referensi dalam pembinaan sekolah menengah atas ke depan.

Belum lagi kalau melihat proyeksi pembinaan SMA ke depan yang akan mengalami banyak perubahan sejalan dengan perubahan zaman. Kondisi abad 21 yang sangat berbeda dibandingkan zaman sebelumnya berdampak luas pada proses pendidikan. Bukan saja pada pembelajaran, pengelolaan, bahkan daya dukung sarana prasarana dan model pendanaan akan mengalami banyak perubahan. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan kini dan masa yang akan datang.

Melalui buku ini, yang disajikan dari hasil peliputan jurnalistik, diharapkan dapat menjadi bahan berharga bagi semua pihak dalam meningkatkan layanan pendidikan menengah umum, baik dari segi akses (partisipasi) maupun mutu dan relevansi pendidikan SMA. □

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sunarto dan Agung Hartono. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Gramedia.
- Ary H. Gunawan. 1986. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aiko Kurasawa. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia.
- Benny Susetyo. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Dewantara, Ki Hajar. 1974. *Pendidikan*. Majelis Luhur Taman Siswa. Yogyakarta.
- Dewantara, Ki Hajar. 1974. *Kebudayaan*. Majelis Luhur Taman Siswa. Yogyakarta.
- Dewantara, Ki Hadjar. 2004. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- H. A. R. Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: IndonesiaTera.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Algemeene_Middelbare_School
- <http://sejarah.pancaproject.com/2015/05/koning-willem-iii-school-tebatavia.html>
- <http://lenterakecil.com/pengertian-sekolah/diknas>
- https://id.wikipedia.org/wiki/SMA_Muhammadiyah_1_Yogyakarta
- Isjoni Ishaq. 2006. *Membangun Visi Bersama: Aspek-aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Istarani. 2012. *58 Model Pembelajaran Inovati*. Medan: Media Persada.
- Kunandar. 2009. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendi-

dikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2016. *Roadmap Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMA 2025*.

- Muhammad Rifa'i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mohammad Ali. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Mohammad Yamin. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.
- Madiri Thamrin Sianipar. 1984. *Pendidikan Politik Bangsa*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Marasamin 2011. *Telaah Kurikulum Sekolah Menengah Umum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ngalim Purwanto. 1997. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Karya
- Ngalimun. 2016. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Najamuddin. 2005. *Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air (Tahun 1800-1945)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rianti Nugroho. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Roestiyah N.K. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 8.
- Somarsono Moestoko. 1986. *Sejarah Pendidikan dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sri Rumini & Siti Sundari. (2004). *Perkembangan Anak & Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soemanto, Wasty dan F.x. Soeyarno. 1983. *Landasan historis pendidikan indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Sjamsudin. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Setijadi. 1975. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarino Mangoenpranoto. 1984. *Menuju Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syafei, M. 2010. *Arah Aktif, Sebuah Seni Mendidik Berkreativitas dan Berakhlak Mulai*. Solo: Tiga Serangkai
- S. Nasution. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. Cet ke-5
- S Nasition. 2011, *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya Wina. 2010. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana. Cet ke-3
- Soedirdjo, dkk., 2010. *Sejarah Pusat Kurikulum*. Yogyakarta: BPPKDIKNAS
- Winarno Surakhmad. 1980. *Metode Pengajaran Nasional*. Bandung: Jemmars.

Sumber Foto:

Sumber foto-foto tua tercantum dalam kredit di bawah foto. Yang tidak tercantum kredit, foto bersumber dari dokumentasi sekolah.



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN